



IMPLEMENTASI

PROPER

STRATEGI PENEMPATAN PERSONEL PENGAMANAN BERBASIS DIGITAL
DALAM RANGKA HARKAMTIBMAS DI KOTA PALEMBANG

M. Hadi Wijaya

NDH : 63

AKBP. Andes Purwanti, S.E., M.M

Mentor

Parlindungan, S.E., Ak., M.T

Coach



PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN XXIV TAHUN 2023

PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
BEKERJASAMA DENGAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2023



IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

**STRATEGI PENEMPATAN PERSONIL PENGAMANAN BERBASIS DIGITAL
DALAM RANGKA HARKAMTIBMAS DI KOTA PALEMBANG**

Oleh

M. HADI WIJAYA

NDH : 63

PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II

ANGKATAN XXVIII

PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

BEKERJASAMA DENGAN

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II

Judul : Strategi Penempatan Personil Pengamanan Berbasis Digital dalam rangka Harkamtibmas di Kota Palembang
Nama Peserta : M. Hadi Wijaya
NDH : 63
NRP : 76071063
Unit Kerja : Bagian Operasi Polrestabes Palembang

Telah Diuji di Depan Penguji pada hari Kamis, 30 Nopember 2023

Mentor



ANDES PURWANTI, S.E., M.M
AKBP NRP. 73120857

Pembimbing / Coach

PARLINDUNGAN, S.E., AK., M.T
PEMBINA NIP. 197605162005011005

Penguji

HARJONO, S.PD.,MM.
NIP.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan rancangan proyek perubahan dengan judul **“Strategi Penempatan Personil Pengamanan Berbasis Digital dalam rangka Harkamtibmas di Kota Palembang”** dapat disusun dan diselesaikan dengan lancar dan tepat waktu. Penulisan laporan ini merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023 yang telah mendapatkan persetujuan mentor kami, yaitu Wakapolrestabes Palembang AKBP. Andes Purwanti, S.E., M.M

Penyelesaian Rancangan ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak KBP. DR. Harryo Sugihhartono, S.I.K., M.H Kapolrestabes Palembang selaku atasan Langsung penulis yang telah memberikan motivasi dalam proyek Perubahan ini
2. Ibu. AKBP. Andes Purwanti selaku mentor dan atasan penulis yang telah memberikan dukungan dan bimbingan atas proyek perubahan ini;
3. Bapak PARLINDUNGAN, S.E., AK., M.Tselaku Coach pada kegiatan proyek perubahan ini yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan motivasi selama ini;
4. Bapak/Ibu Widyaiswara yang telah memberikan wawasan, bimbingan dan motivasi dalam kegiatan belajar mengajar berlangsung;
5. Para personel di lingkungan Polrestabes Palembang khususnya Tim Efektif yang dari awal meluangkan waktu dan tenaganya secara ikhlas dalam membantu pelaksanaan proyek perubahan ini;
6. Semua pihak yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah memberikan bantuan moril dan materil dalam pelaksanaan proyek perubahan ini.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan serta penyempurnaan perubahan yang telah dilaksanakan. Semoga Allah SWT selalu memberkati kegiatan proyek perubahan.

Bandung, 30 Nopember 2023
Penulis,

M. Hadiwijaya, M.T

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
EKSEKUTIF SUMMARY	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	8
1. Sumber Daya Manusia.	14
2. Sarana Prasarana.....	15
3. Metode Penyelesaian	15
4. Anggaran.....	15
C. Tujuan	15
1. Tujuan Jangka Pendek.	15
2. Tujuan Jangka Menengah.	16
3. Tujuan Jangka Panjang	16
D. Manfaat	16
1. Nilai Ekonomis.....	16
2. Penerima Manfaat	17
a. Pihak Eksternal.	17
b. Pihak Internal.	17
E. Output.....	18
F. Outcome	18
G. Ruang Lingkup.....	18
BAB II ANALISA MASALAH.....	19
A. PROFILE ORGANISASI	19

1.	Visi dan Misi Polrestabes Palembang	19
2.	Tugas dan fungsi organisasi	19
3.	Bagian operasional Polrestabes Palembang.....	21
4.	Jumlah Personel Polrestabes Palembang	22
B.	ANALISA MASALAH.....	23
1.	Identifikasi Masalah Organisasi	23
2.	Permasalahan yang timbul akan di Analisa dengan Analisis SWOT	24
BAB III	STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH	33
A.	Terobosan inovatif	33
1.	Kondisi saat ini.	34
2.	Strategi yang di laksanakan.....	34
3.	Kondisi yang diharapkan.....	34
B.	Pentahapan rencana proyek perubahan	35
C.	Rencana Strategi Marketing	39
1.	Identifikasi Strategi Marketing.....	39
2.	Pemetaan Stakeholder	41
3.	Strategi Mempengaruhi Stakeholders	43
4.	Strategi Marketing Hasil Proyek Perubahan.....	45
D.	Mata Pelatihan Pilihan Mendukung Proyek Perubahan.....	46
1.	Merumuskan Kebijakan Publik Menggunakan Big Data Analysis	47
2.	Menguasai Seni Berkomunikasi dalam Hubungan Kerja:	47
3.	Mengaktifkan Transformasi Digital pada Sektor Pemerintahan	47
E.	Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Adopsi Proyek Perubahan	47
F.	Pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan rencana Strategi pengembangan Potensi diri	51
1.	Hasil Self Asesment.....	51
2.	Rencana Pengembangan Potensi Diri.	51

a.	Orientasi Pelayanan.....	51
b.	Adaptabilitas.....	52
c.	Pengembangan diri dan Orang lain.....	52
G.	Identifikasi Potensi resiko / kendala dan solusinya.....	52
H.	Faktor Kunci Keberhasilan	53
1.	Dukungan Kepemimpinan yang kuat.	54
2.	Pasrtisipasi dan Keterlibatan Stakeholders.....	54
3.	Pemahaman Teknologi dan Keterampilan	54
4.	Sumber Daya yang memadai	54

BAB IV	PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN	55
A.	Capaian Pelaksanaan Tahapan Jangka Pendek.....	56
1.	Membentuk Tim Efektif.....	59
2.	Focus Group Discussion untuk rencana pembuatan Surat Edaran Kapolrestabes Palembang.....	60
a.	Identifikasi Kebutuhan	63
b.	Penyusunan Draf Surat	63
c.	Peninjauan dan Revisi.....	64
3.	Pengajuan Draf Surat Edaran Kapolrestabes Palembang	64
4.	Focus Group Discussion untuk rencana pembuatan Aplikasi Penempatan Personel Berbasis Digital.....	67
5.	Pembuatan Aplikasi Penempatan Personel Berbasis Digital	68
a.	Perencanaan Proyek.....	71
b.	Analisis Kebutuhan.....	71
c.	Desain Aplikasi.....	71
d.	Pengembangan Website	71
e.	Integrasi dan Pengujian.....	72
6.	SOP Aplikasi Penempatan Personel Berbasis Digital	72
7.	Pembuatan buku manual	74
8.	Terlaksananya Perjanjian Kerjasa Sama dengan Stakeholder di Kota Palembang.....	75

9.	Terlaksananya Tactical Floor Game Strategi Pengamanan kota bersama Stakeholder	78
10.	Sosialisasi Aplikasi Penempatan Personel Berbasis Digital dalam rangka Harkamtibmas di Kota Palembang ...	81
B.	Pentahapan rencana proyek perubahan	85
1.	Efisiensi	85
2.	Efektivitas	86
C.	Kepemimpinan Strategis	88
D.	Implementasi Strategi Marketing dan Desiminasi	90
1.	Peta Stakeholders	91
2.	4P 1C (Product, Price, Promotion, Place dan customer)	93
a.	Product (Produk)	93
b.	Price (Harga)	93
c.	Promotion (Promosi)	94
d.	Place (Tempat)	94
e.	Customer (Pelanggan)	94
E.	Keberlanjutan Proyek Perubahan	95
F.	Monitoring dan Evaluasi	96
G.	Mata Pelatihan Pilihan Mendukung Proyek Perubahan	107
H.	Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi SDM dalam Proyek Perubahan	114
I.	Hasil Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri (Kompetensi Team Leader)	118
BAB V	PENUTUP	122
A.	Lesson Learnd	123
B.	Kesimpulan.	124
C.	Rekomendasi.	125

DAFTAR TABEL

HALAMAN

TABEL 1.	Analisa SWOT.....	29
TABEL 2.	Rencana Tahapan Jangka Pendek	36
TABEL 3.	Rencana Tahapan Jangka Menengah.....	37
TABEL 4.	Rencana Tahapan Jangka Panjang	38
TABEL 5.	Identifikasi Stakeholder & Strategi Komunikasi	40
TABEL 6.	Peta Strategi Komunikasi	31
TABEL 7.	Strategi Komunikasi Stakeholders.....	45
TABEL 8.	Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi	48
TABEL 9.	Potensi Masalah, Resiko dan Rencana Mitigasi	53
TABEL 10.	Capaian Jangka Pendek	57
TABEL 11.	Tabel Quisioner	98
TABEL 12.	Strategi Pengembangan Kompetensi	115

DAFTAR GAMBAR

	HALAMAN
GAMBAR 1. Skema Struktur Organisasi Polrestabes Palembang	3
GAMBAR 2. Kegiatan Masyarakat Kota Palembang tahun 2020 - 2023.....	5
GAMBAR 3. Data kegiatan Aksi Unjuk Rasa di Kota Palembang Tahun 2020 – 2023.....	8
GAMBAR 4. Data 10 Kota dengan Tingkat Kriminalitas tertinggi di Indonesia tahun 2019 - 2021.....	10
GAMBAR 5. Situasi Kamtibmas di Kota Palembang tahun 2021 - 2023.....	11
GAMBAR 6. Pemetaan Stakeholders Proyek Perubahan.....	42
GAMBAR 7. Peta Strategi Komunikasi	44
GAMBAR 8. Tata Kelola Proyek Perubahan	49
GAMBAR 9. Grafik capaian hasil quisioner	102



EKSEKUTIF SUMMARY

Proyek Perubahan yang dilakukan oleh Polrestabes Palembang adalah inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas pelayanan pengamanan di Kota Palembang melalui penerapan integrasi informasi berbasis digital. Tujuan utama proyek ini adalah untuk menciptakan situasi harkamtibmas yang kondusif di kota ini serta di seluruh wilayah Sumatera Selatan.

Proyek ini terbagi dalam tiga tahap strategis, Tahap Jangka Pendek Fokus pada pembangunan tim yang efektif, pengadaan forum diskusi dengan berbagai pihak terkait, dan pengembangan sistem integrasi informasi digital. Tahap ini juga mencakup penyusunan standar operasional prosedur, pelatihan SDM, uji coba sistem, peluncuran website, dan upaya sosialisasi serta kerjasama dengan stakeholder untuk mendukung deklarasi damai. Tahap Jangka Menengah: Melanjutkan pengembangan dan penyempurnaan sistem yang telah dibangun. Tahap ini melibatkan perluasan sosialisasi dan implementasi ke jajaran Polda Sumsel, serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan stakeholder di tingkat regional untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi dalam aspek keamanan. Tahap Jangka Panjang: Bertujuan untuk menyebarkan sistem integrasi informasi berbasis digital ke seluruh Polres di Sumatera Selatan, yang melibatkan sosialisasi dan implementasi di tingkat nasional, serta kerjasama dengan stakeholder di seluruh Indonesia.

Proyek ini mencerminkan upaya yang signifikan dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan keamanan masyarakat, dengan tujuan akhir menciptakan situasi harkamtibmas yang aman dan kondusif di Kota Palembang dan di seluruh Sumatera Selatan. Proyek Perubahan ini bukan hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga pada peningkatan kolaborasi antara Polrestabes, masyarakat, dan stakeholder lainnya, memastikan pendekatan yang lebih terintegrasi dan komprehensif dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

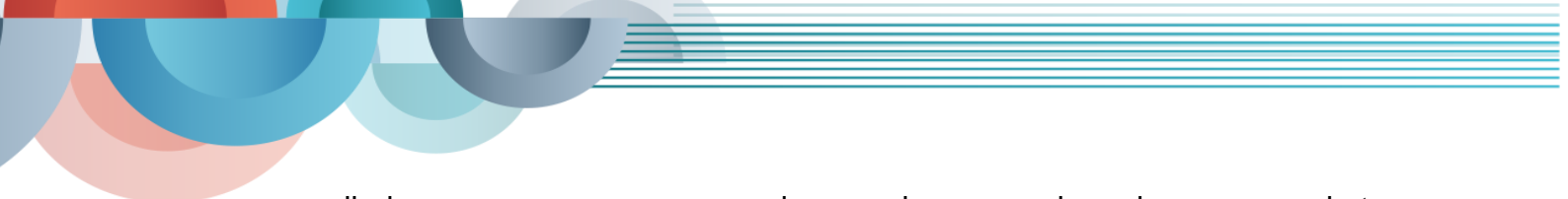
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kota Palembang memang menjadi aspek penting yang mencerminkan kesejahteraan dan stabilitas kota. Dinamika perkotaan modernnya, menghadapi tantangan yang sama seperti kota-kota besar lain dalam memelihara keamanan dan ketertiban. Pemerintah dan lembaga penegak hukum di Palembang telah menanggapi tantangan ini dengan serius, menerapkan pendekatan holistik mencakup penegakan hukum yang tegas dan program pencegahan kejahatan. Patroli rutin, operasi khusus, dan penyelidikan kasus kriminal adalah bagian dari upaya ini. Pendidikan masyarakat tentang peraturan lalu lintas dan cara-cara pencegahan kejahatan, serta kerjasama dengan komunitas melalui forum keamanan dan kegiatan sosial, adalah kunci untuk mengurangi insiden sebelum terjadi. Peringkat kerawanan Kamtibmas di Palembang bukanlah sesuatu yang statis dan dapat berubah seiring waktu, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah, kondisi sosial-ekonomi, dan situasi politik. Pemerintah kota terus berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan stabilitas dengan strategi yang responsif.

Palembang memiliki luas sekitar 400,61 kilometer persegi dan terbagi menjadi 18 kecamatan dan 107 kelurahan. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kota Palembang diperkirakan sebesar 1.570.409 jiwa, dengan luas wilayahnya 369,22 km² dan kepadatan penduduk sekitar 4.250.889 jiwa per km². Keterlibatan aktif masyarakat menjadi fondasi bagi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Keberhasilan upaya ini pada akhirnya akan tercermin dalam peningkatan peringkat kerawanan kota, menandakan Palembang sebagai kota yang lebih aman dan sejahtera bagi warganya.

Pada pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan tentang fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

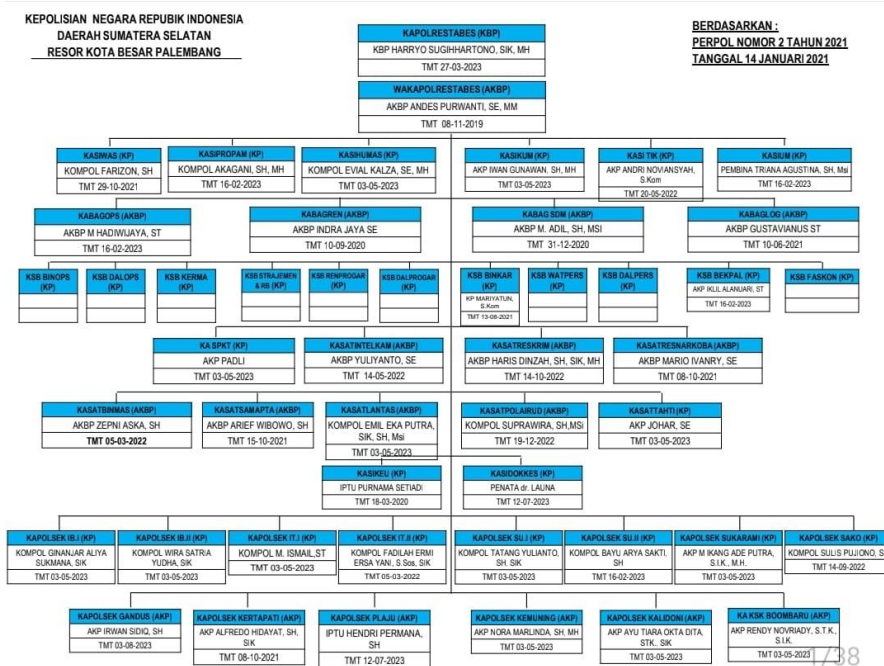


perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. terwujudnya pelaksanaan tersebut harus berdampak baik dan nyata di lapangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara eksplisit menetapkan fungsi kepolisian sebagai bagian integral dari pemerintahan negara yang berfokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh kepolisian harus memberikan dampak positif yang nyata dalam kehidupan masyarakat.

Teori manajemen organisasi menggarisbawahi pentingnya struktur organisasi yang jelas dan efisien dalam mencapai tujuan. Hal ini dijabarkan dalam Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2021 yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada tingkatan Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek). Struktur ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembagian tugas dan tanggung jawab di setiap unit kerja terdefinisi dengan baik, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Dalam konteks Kamtibmas, teori-teori seperti "*broken windows*" dan "*community policing*" juga relevan. Teori "*broken windows*" mengusulkan bahwa lingkungan yang tampak tidak terurus dan memiliki tanda-tanda perusakan akan mendorong lebih banyak kejahatan dan anti-sosial. Oleh karena itu, pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan menjadi penting. Sedangkan "*community policing*" menekankan pentingnya keterlibatan komunitas dalam upaya pemeliharaan Kamtibmas, dengan asumsi bahwa kerjasama antara polisi dan masyarakat dapat mengurangi kejahatan dan meningkatkan rasa aman di masyarakat. Hal ini ketika diimplementasikan dengan baik, dapat mengarah pada sistem Kamtibmas yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini mengharuskan kepolisian untuk tidak hanya fokus pada aspek penegakan hukum yang reaktif, tetapi juga pada aspek preventif dan edukatif yang proaktif. Dengan struktur organisasi yang kuat dan pendekatan yang berorientasi pada masyarakat, kepolisian dapat lebih efektif dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif untuk semua.

Skema struktur organisasi Polrestabes Palembang dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.
Skema struktur organisasi Polrestabes Palembang




Sumber : Polrestabes Palembang, 2023

Berdasarkan struktur organisasi Kepolisian yang ditetapkan dalam Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2021, Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes) Palembang dibantu oleh Bagian Operasi yang dipimpin oleh Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops). Tugas Kabag Ops mencakup beberapa fungsi kunci yang vital untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan operasi kepolisian di wilayah hukumnya.

Fungsi dan tugas utama Kabag Ops adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Operasi Kepolisian: Mereka merencanakan strategi dan taktik operasional kepolisian yang efektif untuk menjawab kebutuhan keamanan yang spesifik, termasuk perencanaan untuk pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah.
2. Koordinasi Operasi Kepolisian: Mengoordinasikan pelaksanaan operasi kepolisian yang melibatkan berbagai satuan kerja di dalam kepolisian,

- 
- serta berkoordinasi dengan lembaga lainnya bila ada operasi kepolisian terpadu yang memerlukan kerja sama antar instansi.
3. Pelaksanaan dan Pengendalian Operasi Kepolisian: Melaksanakan rencana operasi yang telah ditetapkan dan mengendalikan semua aspek dari manajemen operasi kepolisian, termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah.
 4. Pengendalian Pengamanan Markas: Mengendalikan keamanan intern kepolisian sendiri, yaitu pengamanan fisik markas kepolisian agar tetap aman dari segala ancaman dan gangguan yang mungkin terjadi.

Tugas-tugas ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa tindakan kepolisian dapat dilakukan secara efektif dan efisien, sekaligus mempertahankan hubungan yang baik dengan masyarakat dan lembaga lain. Kabag Ops harus memastikan bahwa semua tindakan operasional dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan operasional yang tepat pada waktu yang diperlukan.

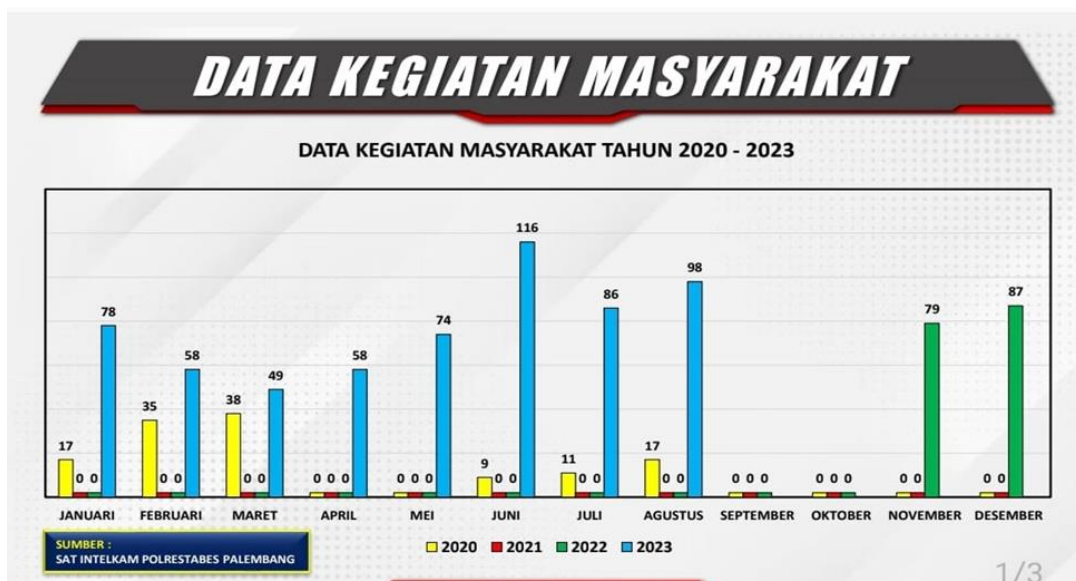
Kapolrestabes Palembang bertugas memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya. Oleh karena itu harus mempunyai strategi dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di kota Palembang bersama stakeholder.

Palembang adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Sumatera Selatan, menempati posisi penting sebagai salah satu dari sepuluh kota terbesar di Indonesia. Dengan luas wilayah sekitar 400,61 km², Palembang menjadi rumah bagi lebih dari 1.570.409 juta orang berdasarkan data tahun 2023. Kota ini menonjol sebagai kota terpadat kedua di pulau Sumatera setelah Medan dan kota terpadat kelima di Indonesia, mengungguli Bandung dalam hal kepadatan penduduk serta menduduki peringkat kesembilan belas dalam daftar kota terbesar di kawasan Asia Tenggara. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang besar pada kehidupan sosial dan ekonomi di Palembang, seperti halnya di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Namun, pasca pandemi, telah terjadi peningkatan aktivitas masyarakat dan pemerintahan, menandai pergerakan menuju pemulihan. Peran Polri menjadi

krusial dalam konteks ini, memastikan bahwa transisi ke normal baru berlangsung dengan lancar dan aman. Peningkatan kegiatan pasca pandemi merupakan indikator pemulihan ekonomi dan sosial yang positif, namun juga memerlukan kewaspadaan dan kepatuhan yang tinggi terhadap protokol kesehatan untuk mencegah kemungkinan gelombang infeksi baru. Terutama karena COVID-19 masih menjadi risiko yang nyata, dan perubahan situasi dapat terjadi dengan cepat. Oleh karena itu, Polrestabes Palembang memiliki tanggung jawab penting dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat, termasuk menegakkan aturan kesehatan, memelihara ketertiban umum, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan bersama.


Dalam menjalankan tugasnya, Polrestabes Palembang tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum tetapi juga pada aspek preventif dan promotif, terutama terkait dengan protokol kesehatan di masa pandemi. Hal ini menunjukkan adaptasi Polri dalam menghadapi tantangan yang diakibatkan oleh pandemi dan memainkan peran penting dalam membentuk respon kota terhadap krisis kesehatan yang berkelanjutan.

Gambar 2.
Kegiatan Masyarakat Kota Palembang tahun 2020-2023



Sumber : Sat Intelkam Polrestabes Palembang, 2023

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat Data Kegiatan Masyarakat untuk tahun 2020 hingga 2023 yang telah dicatat oleh Satuan Intelkam



Polrestabes Palembang. Grafik ini menggunakan batang vertikal untuk menunjukkan jumlah kegiatan yang tercatat di setiap bulan selama periode tersebut. Pada bulan Januari, terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, tercatat ada 17 kegiatan, yang naik menjadi 35 pada tahun 2021, dan kemudian mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat menjadi 78 pada tahun 2022. Tidak ada data yang tersedia untuk tahun 2023. Di bulan Februari, kita melihat tren yang serupa dengan bulan Januari, namun dengan jumlah yang lebih rendah. Tahun 2020 mencatat 58 kegiatan yang berkurang menjadi 38 pada tahun 2021, namun tidak ada data yang tersedia untuk Februari 2022 dan 2023.

Untuk bulan Maret, jumlah kegiatan terus menurun setiap tahun dari 49 kegiatan pada tahun 2020 menjadi 0 kegiatan pada tahun 2022, dan sekali lagi tidak ada data yang tersedia untuk tahun 2023. April dan Juni menunjukkan penurunan dari tahun 2020 ke 2021 tetapi mengalami lonjakan pada tahun 2022, dengan April memiliki 58 kegiatan dan Juni memiliki 116 kegiatan, yang menunjukkan aktivitas masyarakat yang sangat tinggi pada bulan tersebut. Mei dan Juli mengalami penurunan yang tajam, dengan Mei turun dari 74 kegiatan di tahun 2020 menjadi 9 kegiatan di tahun 2022, dan Juli turun dari 86 kegiatan di tahun 2021 menjadi 11 kegiatan di tahun 2022. Agustus melihat kenaikan dari 17 kegiatan di tahun 2021 menjadi 98 kegiatan di tahun 2022, menandakan peningkatan aktivitas yang luar biasa. Data untuk September hingga Desember tidak tersedia untuk tahun 2022 dan 2023. Namun, pada tahun 2020 dan 2021, tidak tercatat adanya kegiatan pada bulan-bulan tersebut.

Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan variasi yang besar dalam jumlah kegiatan masyarakat dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun. Terdapat pula bulan-bulan tertentu tanpa data yang tersedia, yang bisa menunjukkan ketiadaan kegiatan yang tercatat atau kemungkinan data belum dikumpulkan atau dilaporkan. Trend yang bisa kita amati menunjukkan peningkatan aktivitas pada pertengahan tahun, terutama pada bulan Juni dan Agustus untuk tahun 2022, yang kemudian tidak diikuti dengan data pada bulan-bulan berikutnya. Ketidadaan data di beberapa titik, terutama untuk tahun 2023, menuntut perhatian khusus untuk mengidentifikasi apakah ini adalah akibat dari kurangnya pengumpulan data

atau alasan lainnya. Memasuki era pasca pandemi COVID-19, Kota Palembang mengalami transformasi yang signifikan dalam dinamika kegiatan masyarakat. Antara September hingga Desember 2022, terjadi peningkatan jumlah kegiatan yang mencerminkan pemulihan dari periode sebelumnya yang minim aktivitas. Momentum ini berlanjut hingga Juni 2023, menandai adaptasi masyarakat terhadap 'normal baru' dengan semangat baru.

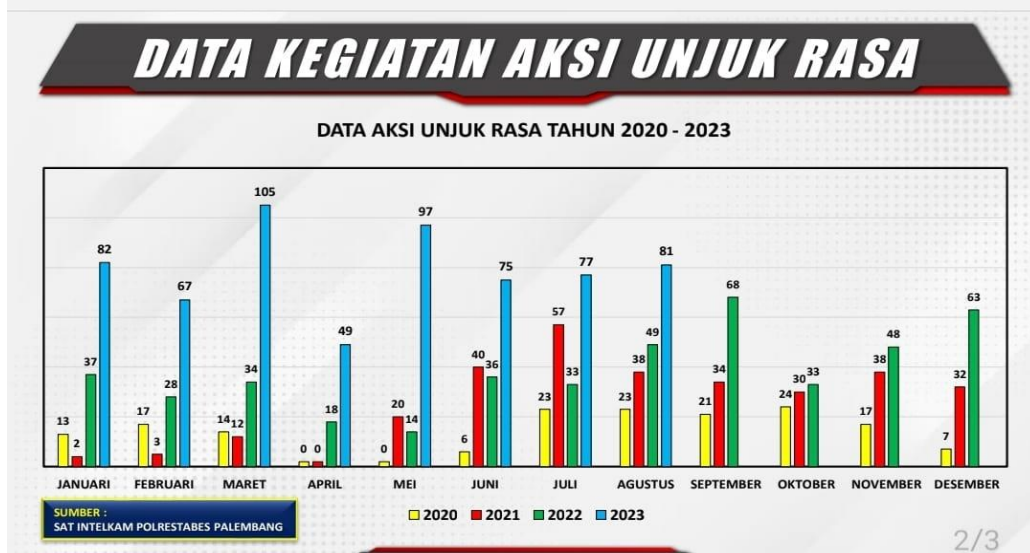


Pemilihan umum (Pemilu) 2024 menjadi fokus utama dalam meningkatnya partisipasi sosial dan politik pasca pandemi. Proses demokratis yang sempat terhambat selama pandemi kini

mendapatkan momentum baru. Pemilu serentak 2024 di Palembang bukan hanya penting dalam hal ekspresi hak suara, tetapi juga sebagai cerminan dari kebangkitan partisipasi masyarakat. Ini menandai era baru dalam sejarah demokrasi Indonesia, dengan tingkat partisipasi yang tinggi dan kesiapan masyarakat dalam pengambilan keputusan penting.


Dengan peristiwa penting ini mendekat, penting bagi semua pihak, termasuk masyarakat, otoritas, dan pemimpin terpilih, untuk berperan aktif dalam menyukseskan Pemilu. Melalui kerja sama, kesadaran akan pentingnya setiap suara, dan dedikasi untuk proses demokratis yang adil dan transparan, Pemilu 2024 di Palembang berpotensi menjadi tonggak sejarah, membawa kemakmuran dan kemajuan kolektif. Hal ini selaras dengan regulasi terkini, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum. UU ini mengatur tentang proses pemilihan umum di Indonesia, termasuk aspek-aspek seperti penyelenggaraan pemilu, hak dan kewajiban pemilih, serta mekanisme pemungutan suara. UU ini dirancang untuk menjamin bahwa proses pemilu berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel, mencerminkan aspirasi rakyat secara nyata.

Gambar 3.
Data Kegiatan Aksi Unjuk Rasa di Kota Palembang Tahun 2020-2023



Sumber : Sat Intelkam Polrestabes Palembang, 2023

Data Kegiatan Aksi Unjuk Rasa tahun 2020 sampai dengan 2023, berdasarkan informasi yang bersumber dari Satuan Intelkam Polrestabes Palembang. Grafik ini terbagi menjadi empat warna yang merepresentasikan empat tahun berbeda, dengan baris-baris vertikal yang menunjukkan jumlah aksi unjuk rasa yang terjadi setiap bulan selama periode tersebut. Pada bulan Januari Aktivitas aksi unjuk rasa terlihat mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2020 mencatat jumlah yang relatif tinggi dengan 82 aksi, kemudian menurun tajam ke 37 aksi di tahun 2021, dan turun lagi ke 13 aksi di tahun 2022, serta meningkat ke 17 aksi pada 2023. Februari: Terjadi peningkatan dari 17 aksi di tahun 2020 ke 67 aksi di tahun 2021, menunjukkan periode kegiatan politik atau sosial yang aktif. Namun, ada penurunan menjadi 28 aksi pada tahun 2022 dan sedikit lebih rendah lagi menjadi 14 aksi di tahun 2023. Maret: Bulan ini mencatat puncaknya pada tahun 2021 dengan 105 aksi. Tahun 2020 memiliki 49 aksi, yang menunjukkan peningkatan yang sangat besar tahun berikutnya. Di tahun 2022 terjadi penurunan drastis ke 18 aksi, dan tahun 2023 memiliki 14 aksi. Pada bulan April Terdapat variasi aktivitas dengan 14 aksi pada 2020, peningkatan besar ke 97 aksi di tahun 2021, dan kembali turun menjadi 20 aksi di tahun 2022, serta 10 aksi di tahun 2023. Sedangkan pada bulan Mei Ada penurunan dari 40 aksi di tahun 2020, ke 6 aksi pada tahun 2022,



menunjukkan penurunan signifikan dalam kegiatan aksi unjuk rasa. Untuk bulan Juni sampai Desember: Tren naik-turun terus berlanjut, dengan Juni dan Juli cenderung memiliki jumlah aksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan akhir tahun. Tahun 2023 menunjukkan peningkatan kegiatan aksi unjuk rasa pada bulan Juni dan Juli dibandingkan dengan tahun 2022, tetapi masih lebih rendah dari puncak yang terjadi di tahun 2021. Secara keseluruhan, pola yang terlihat menunjukkan bahwa tahun 2021 merupakan tahun dengan aktivitas aksi unjuk rasa yang paling sibuk, terutama pada bulan Maret dan April. Hal ini mungkin disebabkan oleh kondisi sosial-politik atau kejadian tertentu yang mendorong warga untuk melakukan aksi unjuk rasa. Setelah 2021, terlihat penurunan aktivitas yang cukup konsisten hingga tahun 2023, menandakan berkurangnya insiden atau perubahan dalam respons masyarakat terhadap berbagai isu.

Dari data tentang kegiatan aksi unjuk rasa di Kota Palembang selama tahun 2020 hingga 2023, pemangku kebijakan dan penegak hukum dapat memahami pola dan tren yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, atau politik. Informasi ini penting dalam mengidentifikasi periode-periode kritis ketika mungkin ada peningkatan kebutuhan akan perencanaan keamanan yang lebih terstruktur dan manajemen kerumunan yang efisien. Khususnya, mengingat peningkatan kegiatan masyarakat pasca pandemi, terlihat bahwa aksi unjuk rasa menjadi sarana ekspresi masyarakat terhadap isu-isu penting. Menjelang pemilihan umum serentak di tahun 2024, dimana masyarakat akan memilih perwakilan mereka di berbagai tingkatan pemerintahan, ada potensi peningkatan frekuensi aksi unjuk rasa sebagai refleksi dari dinamika politik yang semakin intens. Aksi unjuk rasa merupakan bagian dari proses demokrasi, memberikan warga kesempatan untuk menyuarakan pendapat dan menuntut perubahan atau kebijakan yang lebih baik dari pemerintah. Hal ini sejalan dengan peningkatan partisipasi politik yang diinginkan oleh warga Kota Palembang.

Memperhatikan posisi Palembang sebagai salah satu kota dengan tingkat kriminalitas yang tinggi di Indonesia, peningkatan kegiatan unjuk rasa dapat menjadi indikator penting untuk mengantisipasi dan mengelola potensi

risiko keamanan. Diperlukan strategi yang adaptif dan proaktif dari aparat keamanan untuk memastikan bahwa unjuk rasa berjalan damai dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, sambil tetap menjaga hak warga untuk berkumpul dan berpendapat secara bebas. Lebih lanjut, analisis data kegiatan unjuk rasa dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan yang berfokus pada pencegahan konflik dan peningkatan dialog antara pemerintah dengan masyarakat. Melalui pendekatan kolaboratif ini, diharapkan Palembang dapat mencapai stabilitas sosial yang lebih baik, sambil memperkuat proses demokrasi dan memastikan bahwa suara setiap warga didengar dan dihargai.

Gambar 4.
Data 10 Kota dengan Tingkat Kriminalitas Tertinggi di Indonesia
Tahun 2019-2021



Sumber : Sat Intelkam Polrestabes Palembang, 2023

Dari data ini, pemangku kebijakan dan penegak hukum dapat memperoleh wawasan mengenai pola aksi unjuk rasa dan potensi waktu-waktu krusial di mana perencanaan keamanan dan manajemen kerumunan mungkin diperlukan lebih intensif. Peningkatan kegiatan unjuk rasa juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam konteks meningkatnya aktivitas masyarakat di Kota Palembang selama empat tahun terakhir, terutama menjelang Pemilu 2024. Seiring dengan semangat demokrasi yang kuat dan keinginan untuk berpartisipasi aktif dalam politik, masyarakat Palembang juga semakin terlibat dalam aksi-aksi unjuk rasa.

Palembang sebagai salah satu kota penyumbang kriminalitas di Indonesia yang berada di posisi ke 4.

Tingkat kriminalitas di Kota Palembang, yang menduduki peringkat keempat sebagai kota penyumbang kriminalitas di Indonesia, berpotensi memengaruhi situasi harkamtibmas saat terjadi unjuk rasa dengan potensi meningkatnya konflik dan tindakan kriminal selama demonstrasi, serta menuntut tindakan penegakan hukum yang lebih tegas dari aparat keamanan.


Gambar 5.
Situasi Kamtibmas di Kota Palembang Tahun 2021-2023



Sumber : Bagops Polrestabes Palembang, 2023

Data dari Bagian Operasi Polrestabes Palembang yang menunjukkan peningkatan tindak pidana dari tahun 2021 hingga 2023 mencerminkan situasi kamtibmas yang semakin memprihatinkan, terutama menjelang Pemilu. Peningkatan tindak pidana bisa menjadi indikator meningkatnya ketidakstabilan sosial, yang mungkin terkait dengan perdebatan politik yang semakin intens dan rivalitas antar-kelompok politik menjelang pemilihan umum. Situasi politik yang memanas seringkali dapat mempengaruhi tingkat kejahatan di masyarakat, baik yang terkait dengan konflik politik maupun pelanggaran hukum lainnya.


Peningkatan tindak pidana dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) lainnya dapat menyebabkan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi di Palembang.



Ketidakamanan yang ditimbulkan oleh kejahatan dapat menyebabkan kecemasan di kalangan masyarakat, mengganggu kegiatan sehari-hari, serta menghambat pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kepolisian, khususnya Polrestabes Palembang, yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

Menyikapi situasi ini, Polrestabes Palembang diharuskan untuk meningkatkan kinerjanya, terutama dalam konteks Pengamanan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) yang melibatkan banyak partai politik dan aktivitas masyarakat yang intens. Keberadaan Polri dalam berbagai kegiatan masyarakat dan dalam menghadapi unjuk rasa menjadi sangat penting untuk menjaga kestabilan Kamtibmas yang kondusif. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan responsivitas, diperlukan integrasi kerjasama antar stakeholder dengan dukungan sistem informasi berbasis digital. Hal ini bertujuan untuk memberikan respon yang cepat dan meningkatkan kehadiran polri serta instansi terkait dalam setiap event masyarakat.

Perubahan arah Reformasi Birokrasi (RB) pada tahun 2022, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, termasuk penerapan RB Berdampak, yang mencakup empat tema nasional: pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual presiden. Penerapan prinsip-prinsip RB ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Polrestabes Palembang dalam menanggapi berbagai tantangan keamanan, dengan cara yang lebih efisien dan transparan, menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Reformasi Birokrasi (RB) tematik merupakan sebuah pendekatan dalam proses reformasi birokrasi yang menitikberatkan pada tema-tema spesifik yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan aktual. Pada konteks ini, RB tematik yang diarahkan oleh Presiden Joko Widodo khususnya menekankan pada digitalisasi administrasi pemerintahan. Ini berarti transformasi proses kerja birokrasi dari sistem yang konvensional menjadi sistem yang lebih modern melalui pemanfaatan teknologi digital.




Tujuan dari RB tematik khususnya digitalisasi administrasi pemerintahan adalah untuk menciptakan birokrasi yang lebih tangkas, efisien, dan efektif. Digitalisasi diharapkan dapat mempermudah akses informasi dan pelayanan publik, mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan integrasi informasi berbasis digital, birokrasi diharapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik. Ini termasuk dalam aspek keamanan dan ketertiban masyarakat, dimana Polrestabes Palembang dan lembaga lainnya dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja mereka dalam menjaga keamanan dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. RB tematik ini membawa implikasi besar terhadap kinerja organisasi pemerintahan, dimana setiap unit kerja diharapkan dapat mengadopsi teknologi digital dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Dalam konteks RB tematik tentang digitalisasi administrasi pemerintahan, setiap elemen dalam birokrasi harus beradaptasi dengan perubahan ini, mengembangkan kapasitas digital mereka, dan mengimplementasikan sistem yang dapat mendukung operasional kerja yang lebih modern dan terintegrasi.

B. PERMASALAHAN

Menjelang pemilihan umum (Pemilu), dinamika kegiatan masyarakat di Kota Palembang mengalami peningkatan signifikan. Ini mencakup berbagai kegiatan yang berdimensi politik, keagamaan, sosial-budaya, dan ekonomi, yang tidak hanya berskala lokal, tetapi juga nasional dan internasional. Pemilu merupakan periode penting yang menandai puncak partisipasi demokrasi, di mana warga negara berkesempatan untuk menentukan arah kebijakan pemerintahan melalui proses pemungutan suara.

Dalam periode intensif ini, kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang diwujudkan dalam bentuk unjuk rasa, sering kali menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi mereka terkait isu-isu penting yang berlangsung di Kota Palembang serta daerah lain di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari



proses demokrasi yang sehat, di mana warga negara aktif terlibat dalam diskursus publik dan pengambilan keputusan.

Tahapan pemilu sendiri meliputi beberapa fase penting, mulai dari perencanaan dan persiapan, pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga penetapan dan pengumuman hasil. Selama periode ini, kepolisian, khususnya Polrestabes Palembang, memegang peranan vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa semua tahapan pemilu dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan damai.

Polrestabes Palembang, dalam rangka menjalankan fungsi pengamanan pemilu, harus menyiapkan strategi komprehensif yang melibatkan pengamanan fisik tempat pemungutan suara, pengawalan logistik pemilu, serta pengendalian massa selama kampanye dan unjuk rasa. Kerjasama dengan berbagai stakeholder, termasuk penyelenggara pemilu, partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat, juga menjadi aspek penting untuk menciptakan suasana pemilu yang kondusif dan konstruktif.

Permasalahan yang dihadapi oleh Polrestabes Palembang dalam menjalankan tugasnya, khususnya menjelang tahapan pemilu dan dalam menghadapi peningkatan kegiatan masyarakat, dapat dirinci sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia:

Keterbatasan Personil: Meskipun kegiatan masyarakat meningkat, jumlah personil yang tersedia terbatas, yang dapat mempengaruhi kemampuan Polrestabes Palembang untuk merespons secara efektif dan efisien.

Ego Sektoral Antar-Satker : Terdapat tantangan dalam kolaborasi antar-unit kerja (satuan kerja) di mana terkadang terjadi ego sektoral yang menghambat sinergi dan kerjasama.

2. Sarana Prasarana:

Alat Komunikasi yang Tidak Memadai: Keberadaan alat komunikasi yang minim menyulitkan koordinasi dan komunikasi yang cepat dan tepat antar personil dan unit kerja.

Proses permohonan yang masih menggunakan sistem konvensional kurang efisien dan cenderung memperlambat respon terhadap situasi yang dinamis.

3. Metode Penyelesaian:

Kurangnya Koordinasi baik di internal organisasi maupun dengan lembaga eksternal, terdapat kekurangan dalam koordinasi yang efektif, yang dapat mengakibatkan redundansi atau celah dalam penanganan kegiatan.

Komunikasi yang Lambat dengan Stakeholder, adanya keterlambatan dalam komunikasi dengan pihak terkait menyebabkan respon yang tidak segera terhadap perkembangan situasi.

Pengamanan Dadakan, seringkali surat perintah pengamanan dibuat secara mendadak, yang berpotensi menimbulkan ketidaktersediaan sumber daya atau persiapan yang tidak memadai.

4. Anggaran:

Keterbatasan Anggaran untuk Kegiatan Masyarakat: Tidak adanya dukungan anggaran yang memadai untuk mengamankan kegiatan masyarakat, yang dapat mempengaruhi kualitas dan cakupan pengamanan.

C. Tujuan

1. Tujuan jangka pendek

- a. Terwujudnya system penempatan personel Polrestabes Palembang.
- b. Tersusunnya buku Manual tentang penempatan personel Polrestabes Palembang.
- c. Teselenggarannya kegiatan Harkamtibmas di Kota Palembang.

2. Tujuan Jangka Menengah

- a. Pengembangan fitur-fitur system penempatan personel Polrestabes Palembang.
- b. Implementasi system penempatan personel di Polres terdekat (Polres Ogan Ilir dan Polres Banyuasin)

3. Tujuan Jangka Panjang

Implementasi system penempatan personel di Polres jajaran Polda Sumsel.

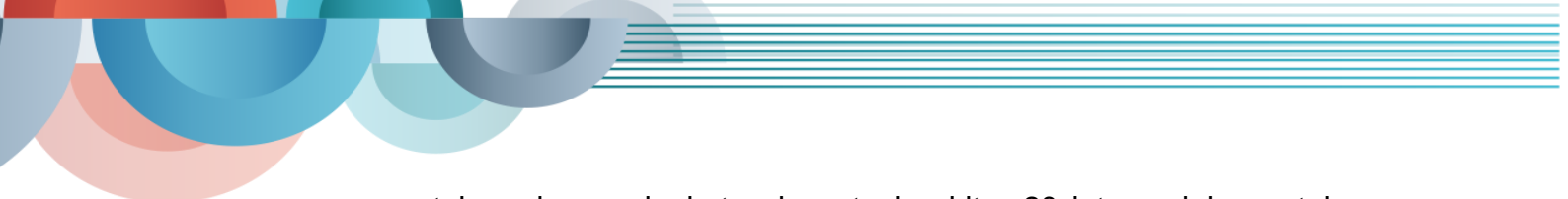
D. Manfaat

1. Nilai Ekonomis

Penerapan strategi pengamanan melalui sistem integrasi informasi berbasis digital di Kota Palembang dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Teori ekonomi yang relevan untuk menjelaskan dampak ini adalah teori efisiensi ekonomi dan teori pertumbuhan ekonomi.

Teori efisiensi ekonomi menjelaskan bahwa pengurangan kerugian akibat kriminalitas melalui strategi pengamanan yang efektif dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dalam suatu perekonomian. Dalam kasus ini, pengurangan kerugian bisnis akibat pencurian dan peminjaman sebesar 500 juta rupiah setiap tahunnya akan mengurangi kerugian yang dialami oleh perusahaan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya yang sebelumnya digunakan untuk mengatasi kerugian tersebut ke kegiatan produktif lainnya, seperti peningkatan produksi atau peningkatan investasi. Dengan demikian, efisiensi ekonomi meningkat karena sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

Bila ditinjau dari teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan bahwa peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat menciptakan dampak positif yang lebih besar dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, penghematan biaya keamanan sekitar 30 juta rupiah



per tahun dan peningkatan investasi sekitar 20 juta rupiah per tahun akan memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Penghematan biaya keamanan tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan produktif lainnya, seperti peningkatan produksi atau peningkatan kualitas produk dan layanan. Di sisi lain, peningkatan investasi akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Pendapatan yang lebih tinggi akan mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Oleh karena itu, dengan penerapan strategi pengamanan melalui sistem integrasi informasi berbasis digital diharapkan dapat mengurangi kerugian akibat kriminalitas, meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dampak positifnya tidak hanya terlihat dalam pengurangan kerugian usaha, penghematan biaya keamanan, dan peningkatan investasi, tetapi juga dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan peningkatan pendapatan perusahaan.

2. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari proyek perubahan ini terdiri dari pihak eksternal maupun internal.

a. Pihak eksternal

Pihak eksternal yang menerima manfaat dari proyek perubahan adalah:

- 1) Terciptanya informasi dan komunikasi satu pintu
- 2) Mempermudah pelayanan kepada masyarakat
- 3) Akses informasi yang cepat kepada masyarakat sehingga timbul rasa aman
- 4) Mempermudah birokrasi dalam proses permintaan pengamanan.

b. Pihak Internal

Pihak internal yang menerima manfaat dari proyek perubahan adalah:

- 1) Mempermudah penempatan personil pengamanan terhadap kegiatan Masyarakat
- 2) Mempermudah dalam berkordinasi dan sinergi antar stakeholder
- 3) Lebih mudah mengendalikan personal
- 4) Berjalannya Standar Operasional Polri dengan baik

E. Output

1. Sistem Penempatan Personel berbasis Digital;
2. Buku Manual panduan tentang Sistem Penempatan Personel berbasis Digital;

F. Outcome

1. Pengambilan keputusan dalam penempatan personel menjadi lebih cepat.
2. Terciptanya harkamtibmas yang kondusif di kota Palembang

G. Ruang Lingkup

Proyek perubahan ini di dasari pada meningkatnya Kegiatan Masyarakat sehingga perlu strategi pengamanan yang cepat, terencana dan sesuai standar operasional polri sehingga perlu terintegrasi informasi tentang kegiatan masyarakat yang berbasis Digital sehingga mempermudah Polri memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Peningkatan kegiatan masyarakat secara umum dapat mencakup berbagai aspek, seperti peningkatan aktivitas bisnis, kegiatan sosial, dan kegiatan publik lainnya. Dalam hal ini, strategi pengamanan yang efektif menjadi krusial untuk menjaga keamanan dan menjaga keamanan dalam masyarakat. Selain itu, penggunaan teknologi digital dalam pengumpulan dan analisis informasi juga mempermudah proses penyebaran informasi kepada petugas kepolisian di lapangan. Dengan memiliki akses yang cepat dan akurat terhadap informasi tentang kegiatan masyarakat, petugas dapat memberikan respon yang lebih efisien dan tepat waktu dalam menangani situasi keamanan. Hal ini akan meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

BAB II ANALISA MASALAH

A. PROFILE ORGANISASI

1. Visi dan Misi Polrestabes Palembang

Dalam menghadapi perubahan yang cepat, Polrestabes Palembang harus memiliki pandangan kedepan sehingga mampu membimbing dan memberikan arah pengembangan dan kemajuan begitu pesat dibandingkan dengan intensitas permasalahan yang dihadapi. Sebagai pedoman kedepan telah dirumuskan Visi dan Misi Polrestabes Palembang sebagai berikut :

a. Visi

“Terwujudnya Kota Palembang yang aman dan tertib”;

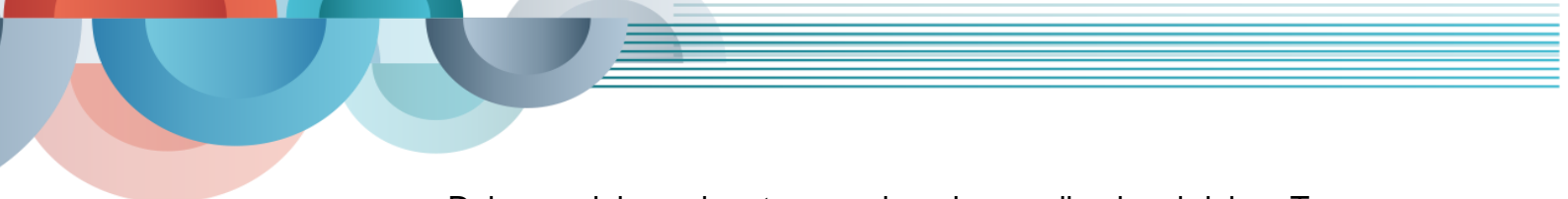
b. Misi

“Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat di Daerah Hukum Polrestabes Palembang”.

2. Tugas dan fungsi organisasi

Tugas Polrestabes Palembang :

- a. menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah hukum Polrestabes Palembang;
- b. menegakkan hukum secara berkeadilan di daerah hukum Polrestabes Palembang;
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;
- d. mewujudkan Polrestabes Palembang yang profesional;
- e. modernisasi pelayanan Polri di jajaran Polrestabes Palembang;
- f. menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya di jajaran Polrestabesbes Palembang;



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Tugas Polrestabes menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelayanan kepolisian kepada masyarakat : Polri bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Hal ini meliputi penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat, pemberian bantuan dan pertolongan, serta pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah. Polri juga bertugas memberikan pelayanan surat izin atau keterangan yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, Polri juga menerima pengaduan terkait tindakan anggota Polri yang melanggar ketentuan peraturan-undangan;
- b. Pelaksanaan fungsi intelijen : Polri memiliki peran penting dalam bidang intelijen keamanan. Fungsi ini bertujuan untuk melakukan deteksi dini dan peringatan dini terkait keamanan. Melalui kegiatan intelijen, Polri dapat mengumpulkan informasi, menganalisis, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan masyarakat;
- c. Penyelidikan dan penyidik tindak pidana : Polri bertanggung jawab dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana. Fungsinya meliputi identifikasi tindak pidana, pengumpulan bukti, dan penggunaan laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum. Polri juga bertugas dalam pembinaan, koordinasi, dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- d. Pembinaan masyarakat : Fungsi ini meliputi kegiatan pelatihan intelijen sosial, pelatihan keamanan swakarsa, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan satuan pengamanan, pemolisian masyarakat, serta pelatihan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Dalam hal ini, Polri berperan dalam membina masyarakat agar terciptanya perdamaian dan keamanan yang baik.

- e. Pelaksanaan fungsi Samapta Kepolisian : Fungsi ini mencakup kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah. Polri juga bertugas dalam penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, pengendalian massa, pengamanan objek vital, serta memberikan bantuan dalam penanganan satwa.
- f. Pelaksanaan fungsi lalu lintas : Polri mempunyai tanggung jawab dalam mengatur, menjaga, mengawali, dan melakukan patroli terhadap lalu lintas. Hal ini meliputi penindakan pelanggaran lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan keamanan, keselamatan, kelancaran, dan kelancaran lalu lintas.
- g. Pelaksanaan fungsi perairan dan udara : Polri juga bertugas menjaga keamanan di perairan dan udara. Fungsinya meliputi patroli perairan, penanganan pertama terhadap pelanggaran pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pelatihan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, serta pemeliharaan keamanan di wilayah perairan dan dukungan logistik pesawat udara.
- h. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut, Polri berperan penting dalam menjaga keamanan dan menjaga masyarakat serta melindungi kepentingan publik.

3. Bagian operasional di pimpin oleh Kabag operasional Polrestabes Palembang yang bertugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan manajemen operasi kepolisian, kegiatan

- kepolisian terpadu, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama; dan
- c. mengendalikan pengamanan markas.

Bagian Operasi juga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan administrasi dan pelaksanaan operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu;
- b. perencanaan pelaksanaan pelatihan praoperasi, termasuk kerja sama dan pelatihan dalam rangka operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu;
- c. perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu, termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta pelaporan data operasi dan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah;
- d. pembinaan manajemen operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu yang meliputi perencanaan, pelaksanaan administrasi dan pengendalian operasi kepolisian, dan kegiatan kepolisian terpadu serta tindakan kontinjensi;
- e. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengamanan markas; dan
- f. pengoordinasian dan pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pemerintah/lembaga nonpemerintah tingkat kabupaten/kota serta melaksanakan monitoring dan evaluasinya

4. Jumlah Personel Polrestabes Palembang

- a. Kekuatan Personel Polrestabes Palembang untuk mengamankan Kota Palembang selama 24 Jam adalah berjumlah 1.837 Personel yang tersebar di Polrestabes Palembang dan Polsek Jajaran, jumlah personel ini masih terdapat kekurangan sebesar 416 bila dilihat dari DSPP 2.253 personel Polrestabes Palembang berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 2 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Tentunya hal ini sangatlah belum

cukup untuk mengamankan masyarakat kota Palembang yang berjumlah 1.7 Juta Jiwa atau dengan perbandingan Ratio 1 Polri mengankan 982 masyarkat.

- b. Sedangkan untuk personel Polrestabes Palembang pada bidang Operasional (Sat Reskrim, Sat Intelkam, Sat Sabhara, Sat Lantas, Sat Binmas, Sat Polair dan polsek jajaran) yang melakukan tugas pada jam dinas (07.00 sd 16.00 wib) adalah 1 : 1.114. Rasio anggota Polri yang melayani masyarakat di luar jam dinas (16.00 sd 07.00 wib) terdiri dari piket yang di dukung anggaran sebanyak 147 pers dan piket yang tidak di dukung anggaran sebanyak 370 pers adalah 1 : 3.288.

B. ANALISA MASALAH

1. Identifikasi Masalah Organisasi

Kegiatan masyarakat menjelang pemilu semakin meningkat baik kegiatan politik, keagamaan, sosial budaya dan ekonomi yang ber skala daerah, nasional maupun internasional. Belum lagi kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum (unjuk rasa) terhadap permasalahan di Kota Palembang yang berasal dari Kabubupaten dan kota di wilayah Provinsi Sumatera selatan. Dalam menghadapi situasi tersebut Polrestabes Palembang

- a. Sumber daya manusia
 - 1) meningkatnya kegiatan masyarakat namun personil terbatas
 - 2) ego sektoral satker
- b. Sarana prasarana
 - 1) Minimnya alat komunikasi
 - 2) Permohonan masih bersifat konvensional
- c. Metode penyelesaian
 - 1) kurangnya kordinasi di internal maupun eksternal

- 2) lambatnya komunikasi dengan stakeholder informasi yang terlambat
- 3) pembuatan surat perintah pengamanan yang dadakan

d. Anggaran

Kegiatan masyarakat tidak di dukung anggaran

2. Permasalahan yang timbul akan di Analisa dengan Analisis SWOT

a. Kekuatan (*strengths*)

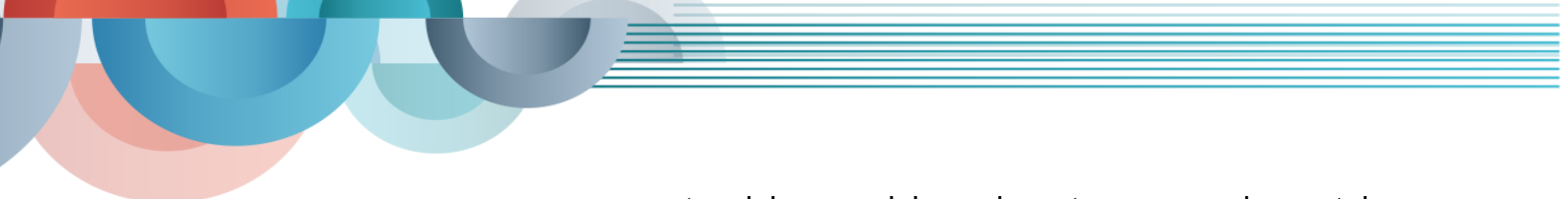
- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 2 tahun 2022 tentang Kepolisian Republik Indonesia : Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini memungkinkan kepolisian untuk bertindak secara efektif dan efisien dalam menjaga keamanan dan mengamankan masyarakat;
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 1998 tentang persetujuan di muka umum : Undang-undang ini memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Hal ini memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat serta mendukung terciptanya komunikasi yang harmonis dalam menjaga keamanan dan perdamaian;
- 3) Standar Operasional Prosedur Kapolda Sumatera Selatan tentang Manajemen Pengamanan Massa pada Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat lainnya dan Kegiatan Politik : Adanya SOP ini memastikan bahwa kegiatan massa dapat diatur dan ditutup dengan baik oleh kepolisian. Hal ini penting

untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan pemeliharaan selama kegiatan tersebut;

- 4) Adanya sumber daya manusia/personel di setiap Sub Bidang yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas kepolisian : Keberadaan personel yang dilatih dan berkompoten dalam setiap sub bidang kepolisian merupakan kekuatan yang penting. Mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat;
- 5) Adanya keinginan pimpinan dalam mendukung kegiatan secara Digital : Dukungan dari pimpinan kepolisian dalam mengadopsi teknologi digital memberikan keuntungan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Penggunaan teknologi dapat membantu mempercepat proses, memperbaiki komunikasi, dan meningkatkan responsifitas terhadap perubahan situasi;
- 6) Tersedianya sarana (peralatan) dalam mendukung pelaksanaan proyek perubahan seperti jaringan internet, komputer dan lain-lain : Ketersediaan sarana dan peralatan yang memadai, seperti jaringan internet dan komputer, mendukung pelaksanaan proyek perubahan yang melibatkan teknologi. Hal ini memungkinkan kepolisian untuk meningkatkan kinerja dan memperbaiki proses kerja mereka.

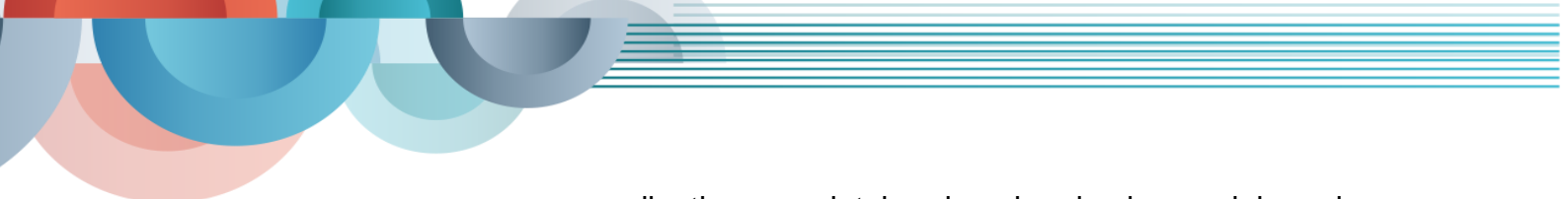
b. Kelemahan (*weaknesses*)

- 1) Salah satu kelemahan di Polrestabes Palembang adalah kurangnya kesadaran dan tanggung jawab



anggota dalam melaksanakan tugas mereka untuk memberikan informasi tentang kegiatan masyarakat. Hal ini dapat menghambat upaya kepolisian dalam mengumpulkan informasi diperlukan untuk menjaga keamanan dan perdamaian di wilayah tersebut.

- 2) **Keterbatasan anggaran penyelenggaraan fungsi operasional** : Keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam penyelenggaraan fungsi operasional kepolisian. Kurangnya alokasi anggaran dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya yang diperlukan, termasuk peralatan, pelatihan, dan pemeliharaan sarana yang mendukung tugas-tugas kepolisian. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi tugas-tugas kepolisian.
- 3) **Belum adanya sistem Digital** sebagai sarana memberikan informasi tentang kegiatan masyarakat : Kelemahan lain di Polrestabes Palembang adalah belum adanya sistem digital mampu sebagai sarana untuk memberikan informasi tentang kegiatan masyarakat. Dengan sistem digital baik, kepolisian dapat mengumpulkan dan menyebarkan informasi lebih efisien kepada masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan transparansi, aksesibilitas, dan responsivitas dalam menjaga keamanan dan kenyamanan.
- 4) **Kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan** : Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan merupakan tantangan utama Polrestabes Palembang. Kurangnya koordinasi seringkali menghambat pertukaran informasi penting dan kolaborasi efektif dalam menjaga keamanan serta ketentraman. Pemangku kepentingan



meliputi pemerintah daerah, lembaga lain, dan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, perlu upaya terfokus pada pembentukan forum komunikasi reguler. Pertemuan berkala antara Polrestabes Palembang dengan para stakeholder akan mendiskusikan isu keamanan dan mengembangkan strategi bersama. Pengembangan sistem pelaporan dan umpan balik efisien akan memudahkan pertukaran data dan informasi. Penting juga melaksanakan program kerja sama menargetkan masalah keamanan tertentu, melibatkan berbagai pihak relevan secara langsung. Pelatihan dan workshop bersama dapat meningkatkan pemahaman bersama dan menemukan solusi terbaik dalam mengatasi tantangan keamanan. Inisiatif-inisiatif ini akan berkontribusi pada peningkatan kerja sama dan komunikasi antara kepolisian dengan pemangku kepentingan, krusial dalam menjaga keamanan dan ketentraman di Palembang.

c. Peluang (*opportunities*)

- 1) Adanya dukungan dari *stake holder* eksternal dalam rangka pembangunan sistim integrasi informasi database berbasis Digital;
- 2) Adanya masyarakat yang mampu membuat website berbasis IT, dan dapat dimanfaatkan dalam membangun sistem informasi yang terintergrasi berbasis Digital
- 3) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
- 4) Adanya dukungan masyarakat sebagai pemberi informasi setiap kegiatan masyarakat

d. Ancaman (*threats*)

- 1) Anggapan dari masyarakat birokrasi di Polri berbelit-belit

- 2) Adanya anggapan Polri adalah polisi India;
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat arti kehadiran Polri
- 4) Sebagai ibukota provinsi kota Palembang tempat konsentrasi kegiatan masyarakat.

Berdasarkan analisis SWOT, dapat diambil kesimpulan bahwa Polrestabes Palembang membutuhkan sistem informasi yang terintegrasi secara digital untuk memperkuat upaya pengamanan terhadap kegiatan masyarakat. Kesimpulan ini didasarkan pada identifikasi beberapa kelemahan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu kurangnya kesadaran dan tanggung jawab anggota Polrestabes dalam memberikan informasi, keterbatasan dukungan anggaran, belum adanya sistem digital, dan kurangnya koordinasi dengan pemangku kepentingan. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi secara digital, Polrestabes Palembang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan informasi tentang kegiatan masyarakat. Sistem informasi digital dapat memfasilitasi pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi dengan lebih cepat dan akurat. Hal ini akan memungkinkan polisi untuk dengan mudah mengakses dan membagikan informasi kepada anggota polisi lainnya, pemerintah daerah, dan secara masyarakat secara real-time. Keuntungan lain dari sistem informasi digital adalah peningkatan transparansi dan aksesibilitas informasi. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, anggota Polrestabes Palembang dapat dengan mudah mengakses data dan informasi terkait kegiatan masyarakat, termasuk laporan kejahatan, kegiatan sosial, dan informasi penting lainnya. Dalam hal ini, sistem informasi digital dapat membantu polisi dalam mengidentifikasi pola kejahatan, menganalisis tren, dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif. Selain itu, sistem informasi digital juga dapat memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara Polrestabes Palembang dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintah daerah, lembaga lain, dan masyarakat. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, pertukaran informasi dan koordinasi antara berbagai pihak dapat dilakukan dengan lebih efisien dan responsif. Hal ini akan

membantu dalam memperkuat upaya pengamanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

Kesimpulannya, perlunya sistem informasi yang terintegrasi secara digital di Polrestabes Palembang sangat penting untuk meningkatkan pengamanan terhadap kegiatan masyarakat. Dengan adanya sistem ini, polisi dapat lebih efisien dan efektif dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi. Selain itu, sistem ini juga dapat meningkatkan transparansi, aksesibilitas, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait. Dalam jangka panjang, implementasi sistem informasi digital dapat membantu Polrestabes Palembang menjadi lebih responsif dan adaptif dalam menjaga keamanan dan perdamaian masyarakat.


Tabel 1.
ANALISA SWOT

ANALISA SWOT	Strength : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 2 tahun 2022 tentang Kepolisian Republik Indonesia 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum 3. Adanya SOP Kapolda Sumatera Selatan tentang Manajemen Pengamanan Massa pada Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat lainnya dan Kegiatan Politik. 4. Adanya sumber daya manusia/ personel di setiap Sub Bidang yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas kepolisian; 5. Adanya keinginan pimpinan dalam mendukung kegiatan secara Digital; 6. Tersedianya sarana (peralatan) dalam mendukung pelaksanaan proyek perubahan seperti jaringan internet, komputer dan lain-lain.	Weaknesses : 1. Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab anggota Polrestabes Palembang untuk melaksanakan tugasnya dalam memberikan informasi tentang kegiatan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban; 2. Keterbatasan dukungan anggaran penyelenggaraan fungsi operasional . 3. Belum adanya sistem Digital sebagai sarana memberikan informasi tentang kegiatan masyarakat 4. Kurangnya kordinasi dan komunikasi dengan stakeholder
	Opportunities : 1. Adanya dukungan dari	Strategi SO : Memanfaatkan kekuatan internal

<p>stake holder eksternal dalam rangka pembangunan sistim integrasi informasi database berbasis Digital;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Adanya masyarakat yang mampu membuat website berbasis IT, dan dapat dimanfaatkan dalam membangun sistem informasi yang terintergrasi berbasis Digital 3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri. 4. Adanya dukungan masyarakat sebagai pemberi informasi setiap kegiatan masyarakat 	<p>seperti Standar Operasional Prosedur dan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung peluang eksternal seperti dukungan stakeholder dan kemampuan masyarakat dalam teknologi informasi</p>	<p>seperti kurangnya koordinasi dengan stakeholder dengan memanfaatkan peluang eksternal seperti dukungan masyarakat sebagai pemberi informasi.</p>
<p>Threats :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggapan dari masyarakat birokrasi di Polri berbelit-belit 2. Adanya anggapan Polri adalah polisi India; 3. Kurangnya kesadaran masyarakat arti kehadiran Polri 4. Sebagai ibukota provinsi kota Palembang tempat kosentrasi kegiatan masyarakat. 	<p>Strategi ST :</p> <p>Memanfaatkan kekuatan internal seperti dukungan pimpinan untuk mengatasi ancaman seperti anggapan negatif terhadap birokrasi di Polri dengan meningkatkan transparansi dan komunikasi.</p>	<p>Strategi WT :</p> <p>Mengurangi kelemahan internal seperti kurangnya kesadaran anggota Polri dengan mengatasi ancaman seperti anggapan negatif tentang Polri melalui kampanye penyadaran masyarakat dan pelatihan internal.</p>

Dengan menyusun strategi berdasarkan analisis SWOT ini, Polrestabes Palembang dapat lebih efektif dalam menjaga keamanan dan keamanan masyarakat serta memanfaatkan peluang yang ada untuk memperkuat peran mereka dalam melayani masyarakat. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) adalah langkah yang sangat penting untuk membantu Polrestabes Palembang dalam mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja mereka. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil dalam merumuskan strategi berdasarkan analisis SWOT:

1. Memaksimalkan kekuatan (Strengths) : Polrestabes Palembang perlu mengidentifikasi dan memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki untuk menjaga keamanan dan keamanan masyarakat. Contohnya, keanggotaan anggota polisi, pengetahuan lokal, dan jaringan kerja yang kuat. Dalam strategi ini, Polrestabes Palembang dapat meningkatkan pelatihan dan pengembangan anggota polisi, memperkuat kerja sama dengan lembaga lain, dan memanfaatkan pengetahuan lokal untuk mengoptimalkan kinerja mereka;
2. Mengatasi kelemahan (Weaknesses) : Polrestabes Palembang perlu mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan-kelemahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Misalnya, dengan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab anggota polisi dalam memberikan informasi kepada masyarakat, mengadvokasi alokasi anggaran yang memadai, dan mengembangkan sistem informasi digital yang efektif. Strategi ini dapat membantu mengatasi hambatan yang ada dan meningkatkan kinerja Polrestabes Palembang;
3. Memanfaatkan peluang (Opportunities) : Polrestabes Palembang perlu mengidentifikasi peluang-peluang yang ada untuk memperkuat peran mereka dalam melayani masyarakat. Misalnya, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan responsifitas dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Polrestabes Palembang juga dapat memanfaatkan kerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan sektor swasta untuk meningkatkan keamanan dan perdamaian;
4. Menghadapi ancaman (Threats) : Polrestabes Palembang perlu mengidentifikasi ancaman-ancaman yang mungkin mempengaruhi kinerja mereka dalam menjaga harkamtibmas. Misalnya, perkembangan teknologi yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, mengubah pola kejahatan, atau ketidakstabilan sosial. Dalam strategi ini, Polrestabes Palembang dapat mengadopsi pendekatan proaktif dan inovatif untuk menghadapi



ancaman-ancaman ini, seperti meningkatkan pemantauan, penegakan hukum yang tegas, dan kerja sama dengan pihak terkait.

Polrestabes Palembang dapat meningkatkan efektivitas dan kinerjanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan memaksimalkan kekuatan internal seperti keanggotaan anggota polisi, pengetahuan lokal, dan jaringan kerja. Meningkatkan pelatihan, memperkuat kerjasama, dan memanfaatkan pengetahuan lokal adalah kunci dalam strategi ini. Mengatasi kelemahan internal seperti kesadaran dan tanggung jawab anggota, alokasi anggaran, dan sistem informasi digital juga penting untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi hambatan.

Di sisi lain, memanfaatkan peluang eksternal seperti perkembangan teknologi dan kerjasama lintas sektor dapat membantu Polrestabes Palembang meningkatkan efisiensi dan responsivitasnya. Adopsi teknologi informasi dan komunikasi terkini serta kolaborasi yang kuat dengan pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan sektor swasta dapat meningkatkan keamanan dan perdamaian.



BAB III

STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

A. Terobosan inovatif

Terobosan inovatif merupakan konsep atau ide yang membawa pendekatan baru, menghasilkan solusi yang lebih efisien, efektif, dan seringkali revolusioner untuk menyelesaikan masalah atau memperbaiki suatu tugas. Konsep ini melampaui perubahan kecil atau inkremental, seringkali menciptakan perubahan besar yang dapat mendisrupsi atau mengubah secara fundamental status quo dalam suatu bidang atau industri. Dalam konteks teknologi, terobosan inovatif bisa berupa pengembangan alat atau platform baru yang mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital. Di bidang bisnis, ini dapat berkaitan dengan model bisnis yang baru, strategi pemasaran yang belum pernah ada sebelumnya, atau cara-cara inovatif dalam manajemen sumber daya manusia. Dalam ilmu pengetahuan, terobosan inovatif sering terlihat dalam penemuan-penemuan baru yang membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut atau aplikasi praktis yang belum pernah terpikirkan.

Terobosan inovatif juga sangat relevan dalam layanan sosial, dimana pendekatan baru dalam penanganan masalah sosial dapat memberikan dampak yang signifikan pada kesejahteraan masyarakat. Misalnya, pengembangan program sosial yang bertarget atau penerapan teknologi untuk meningkatkan akses dan efisiensi layanan sosial. Pendekatan-pendekatan inovatif ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penanganan masalah kamtibmas, tetapi juga dapat memperkuat hubungan antara aparat penegak hukum dan masyarakat.

Dengan demikian, terobosan inovatif tidak hanya penting untuk kemajuan dan pertumbuhan di berbagai bidang, tetapi juga esensial dalam menanggapi tantangan yang terus berkembang di dunia modern.

1. Kondisi saat ini

- a. meningkatnya kegiatan masyarakat namun personil terbatas
- b. meningkatnya gangguan kamtibmas di kota Palembang menjelang pemilu
- c. kurangnya kordinasi di internal maupun eksternal
- d. lambatnya komunikasi antara stakeholder
- e. informasi yang terlambat
- f. pembuatan surat perintah pengamanan yang dadakan

2. Strategi yang di laksanakan

- a. Analisa kebijakan
- b. Terselenggarakannya Kegiatan FGD dengan pemerintah daerah, akademisi,KPU, bawaslu, parpol tomas, toga dan toda dalam rangka terbentuknya Sistem integrasi informasi database berbasis Digital
- c. Sistem integrasi informasi database berbasis Digital
- d. Tersusunnya Standar Operasional Prosedur tentang Sistem integrasi informasi database berbasis Digital
- e. Tersusunnya buku Manual panduan Strategi Penempatan Personel Berbasis Digital
- f. Pelatihan peningkatan kemampuan SDM
- g. Terlaksananya sosialisasi & implementasi aplikasi sistem informasi secara *Digital* ke stakeholder
- h. Terlaksananya PKS dengan Stakeholder di wilayah kota Palembang (Deklarasi Damai)
- i. Terlaksananya Tactical Floor Game dalam rangka kegiatan sistim pengamanan kota

3. Kondisi yang diharapkan

- b. Terplotingnya personil pengamanan di setiap kegiatan masyarakat
- c. Menurunnya gangguan kamtibmas di kota Palembang menjelang pemilu sebanyak 25%

- d. Terbangunnya kordinasi dan komunikasi yang baik di internal maupun eksternal
- e. Terbangunnya kepedulian komunikasi antar stakeholder
- f. informasi yang cepat
- g. pembuatan surat perintah pengamanan yang real time

B. Pentahapan rencana proyek perubahan

Dalam rangka menjamin kegiatan proyek perubahan dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan milestone yang telah dibuat maka pada saat **off campus I** dilakukan kegiatan-kegiatan persiapan dalam rangka proyek perubahan antara lain :

1. Rapat Identifikasi permasalahan dan penyusunan proyek perubahan dengan staf;
2. Menjelaskan proyek perubahan kepada Kapolrestabes Palembang selaku pimpinan langsung dan wakapolrestabes Palembang selaku Mentor ;
3. Permohonan persetujuan Mentor tentang rancangan proyek perubahan,;
4. Mengajukan surat perintah penunjukan Mentor dari Kapolrestabes Palembang ke Wakapolrestabes Palembang selaku atasan langsung Mentor .
5. Menerima Surat Perintah penunjukan Mentor dari Kapolrestabes Palembang;
6. Sosialisasi rancangan proyek perubahan kepada stakeholder internal, menerima dukungan dari Kapolrestabes, wakapolrestabes dan para Kabag, Kasat dan Kasi;

Sedangkan pada kegiatan **off campus II** (Implementasi Proyek Perubahan) untuk mencapai keberhasilan Proyek Perubahan maka disusun beberapa tahapan kegiatan yaitu:

Tabel 2
Rencana Tahapan Jangka Pendek
(Minggu Ke II September sampai dengan Minggu IV Nopember 2023)

NO	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU	STAKEHOLDER
1.	Pembentukan Tim Efektif 1. Pengembangan uraian tugas 2. Diskusi tugas dan tanggung jawab 3. Pembentukan Sprin	Surat Perintah Tim efektif	M3 SEPT 2023	Kapolrestabas Akademisi
2.	Focus Grup Discussion untuk rencana pembuatan Surat Edaran Kapolrestabas	Rancangan Surat Edaran	M4 SEPT 2023	Kabag Ops, Kabag Sdm Kasat Sabahra, Kasat Intel, Kasat Reskrim, Kasat Lantas, Kasat Binmas Kasi Tik
3.	Mengajukan draft surat edaran kepada Kapolrestabas Palembang Untuk aplikasi Penempatan Personel Berbasis Digital dalam rangka Harkamtibmas di Kota Palembang 1. Audiensi dengan Kapolrestabas 2. Menyusun Surat edaran Kapolrestabas 3. Pengesahan & Pengiriman Surat Keputusan Kapolrestabas Palembang	Surat Edaran/Kebijakan Kapolrestabas Palembang Tentang Sistem Integrasi informasi Berbasis Digital	M4 SEPT 2023	Kapolrestabas Wakapolres Tim Efektif Kabag Ops, Kabag Sdm Kasat Sabahra, Kasat Intel, Kasat Reskrim, Kasat Lantas, Kasat Binmas Kasi Tik Kasi Hukum
4.	Focus Group Discussion Untuk Rencana Pembuatan Aplikasi Penempatan Personel Berbasis Digital dalam rangka Harkamtibmas di Kota Palembang	Rancangan system integrasi informasi berbasis Digital Pembuatan surat undangan Penyiapan sarana & Prasarana FGD Pelaksanaan FGD Notulensi hasil FGD	M1 OKT 2023	Kabag Ops, Kabag Sdm Kasat Sabahra, Kasat Intel, Kasat Reskrim, Kasat Lantas, Kasat Binmas Kasi Tik Kapolsek
5.	Pembuatan aplikasi Penempatan Personel Berbasis Digital dalam rangka Harkamtibmas di Kota Palembang 1. Pengembangan Prototype System Berbasis Teknologi informasi 2. pengembangan framework dari sistem Integrasi 3. pengembangan sistem basis teknologi	Aplikasi	M2 OKT 2023	Bag Ops, Tim Efektif
6	Pembentukan SOP Penyusunan website Strategi Penempatan Personel Berbasis Digital dalam	Surat Undangan Naskah SOP Dokumentasi	M3 OKT 2023	Kabag Ops, Kabagg Sdm Kasat Sabahra,

NO	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU	STAKEHOLDER
	<p>rangka Harkamtibmas di Kota Palembang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan draft SOP 2. Pengesahan SOP 	Notulen		Kasat Intel, Kasat Reskrim, Kasat Lantas, Kasat Binmas Kasi Tik Kapolsek
7.	<p>Pembuatan Buku manual Book aplikasi Penempatan Personel Berbasis Digital dalam rangka Harkamtibmas di Kota Palembang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Draft rancangan 2. Penulisan Buku Manual Book 3. Proses pencetakan 	Buku Manual Book	M4 OKT 2023	Bag Ops Tim Efektif
8.	<p>Terlaksananya PKS dengan Stakeholder di wilayah kota Palembang</p>	Deklarasi Damai	M1 NOV 2023	Kapolrestabes Walikota Plg Ketua DPRD Ketua Parpol Ketua Kpu Ketua Bawaslu TOGA, TOMAS, Akademisi Media Massa, LSM
9.	<p>Telaksananya Tactical Floor Game dalam rangka kegiatan strategi pengamanan kota bersama stakehder</p>	Laporan kegiatan	M2 NOV 2023	Kapolrestabes Kodim Pemda
10.	<p>Sosialisasi aplikasi Penempatan Personel Berbasis Digital dalam rangka Harkamtibmas di Kota Palembang & Stakeholder Terkait</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Surat Undangan Sosialisasi 2. Penyiapan Sarana & Prasarana 3. Pelaksanaan Sosiaaisasi 	Surat Perintah Sosialisasi, Notulensi Hasil Sosialisasi	M3 NOV 2023	Kabag Ops, Kabag Sdm Kasat Sabahra, Kasat Intel, Kasat Reskrim, Kasat Lantas, Kasat Binmas Kasi Tik Kasi Humas Kapolsek

Tabel 3
Rencana Tahapan Jangka Menengah
(Minggu Ke III Nopember 2023 sampai dengan Minggu Ke III April 2024)

NO	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU	STAKEHOLDER
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan & Penyempurnaan aplikasi Penempatan Personel Berbasis Digital dalam rangka Harkamtibmas di Jajaran Polda Sumsel 2. pengembangan framework dari sistem Integrasi 3. pengembangan sistem basis teknologi 	Platform Integrasi Data & Informasi	Minggu III Nopember 2023 s/d Minggu III April 2024	Kapolrestabes Wakapolres Kabag Ops Para Kasat Kasi Tik Kasi Hukum

NO	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU	STAKEHOLDER
	4. uji coba aplikasi sistem 5. finalisasi sistem			
2.	Sosialisasi aplikasi Penempatan Personel Berbasis Digital dalam rangka Harkamtibmas di jajaran Polda Sumsel	Surat Perintah Sosialisasi, Notulensi Hasil Sosialisasi	Minggu III Nopember 2023 s/d Minggu III April 2024	Kapolrestabes Wakapolres Kabag Ops Para Kasat Kasi Tik Kasi Hukum
3.	Implementasi aplikasi Penempatan Personel Berbasis Digital dalam rangka Harkamtibmas di Jajaran Polda Sumsel 1. Instalasi aplikasi 2. Uji coba Sistem 3. Evaluasi Sistem	Surat Perintah Implementasi, Laporan hasil implementasi serta ANEV	Minggu III Nopember 2023 s/d Minggu III April 2024	Kapolrestabes Wakapolres Kabag Ops Para Kasat Kasi Tik Kasi Hukum
4.	Pilot project di 2 Polres terdekat	Terlaksananya Pilot Project	Minggu III Nopember 2023 s/d Minggu III April 2024	Bag Ops Polresta Palembang Tim Efektif Polres Oi Polres Banyuasin

Tabel 4
Rencana Tahapan Jangka Panjang
(Bulan April 2024 sd April 2025)

NO	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU	STAKEHOLDER
1.	Terlaksananya Sosialisasi & implementasi aplikasi Penempatan Personel Berbasis Digital dalam rangka Harkamtibmas Di Polda Se-Sumatera Selatan	Surat Perintah Sosialisasi, Notulensi Hasil Sosialisasi	April 2024 s/d April 2025	Internal Tim Efektif Polda Sumsel Eksternal KPU BAWASLU PARPOL TNI SAT POL PP Pemerintah Provinsi DPRD Kejaksaan Tinggi Provinsi
2.	Terintegrasi semua Strategi Penempatan Personel Berbasis Digital dalam rangka Harkamtibmas di Se Sumatera Selatan	Sistem Informasi Pengamanan Regional Sumatera Selatan	April 2024 s/d April 2025	Internal Tim Efektif Polda Sumsel Eksternal KPU BAWASLU PARPOL TNI SAT POL PP Pemerintah Provinsi

NO	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU	STAKEHOLDER
				DPRD Kejaksanaan Tinggi Provinsi
3.	Analisa evaluasi Proyek perubahan	Laporan Evaluasi, hasil Audiensi & MOU	April 2024 s/d April 2025	Internal Tim Efektif Polri Eksternal KPU BAWASLU PARPOL TNI SAT POL PP Pemerintah Provinsi DPRD Kejaksanaan Tinggi Provinsi

C. Rencana Strategi Marketing

1. Identifikasi Stakeholder

Identifikasi stakeholder merupakan langkah penting dalam proyek perubahan Polrestabes Palembang, mengingat keberhasilan proyek sangat bergantung pada interaksi dan kolaborasi antara berbagai pihak. Stakeholder dapat dibagi berdasarkan pengaruh mereka terhadap proyek, yang bisa bersifat positif (mendukung), negatif (menghambat), atau netral (tidak berpengaruh secara langsung). Menghubungkan dengan teori kerjasama, identifikasi dan manajemen stakeholder dalam proyek perubahan Polrestabes Palembang melibatkan strategi komunikasi yang efektif, negosiasi, membangun kemitraan, dan memahami dinamika kekuasaan dan kepentingan. Pendekatan ini membantu dalam membina hubungan yang baik, meminimalisir konflik, dan memaksimalkan dukungan untuk mencapai tujuan proyek yaitu menciptakan situasi harkamtibmas yang kondusif di Kota Palembang dan di seluruh Sumatera Selatan.

a. Stakeholders internal :


Bag Ops Polresta Palembang, Kapolrestabes Palembang, Wakapolrestabes Palembang dan PJU Polrestabes Palembang

b. Stakeholders eksternal : Pemerintah Kota Palembang, KPU, Bawaslu, Parpol, TNI, Satpol, DPRD dan Kejaksaan

Tabel 5
Identifikasi Stakeholder dan Strategi Komunikasi

NO	STAKEHOLDERS	STRATEGI KOMUNIKASI	DUKUNGAN / PENGARUH	ANALISA STAKEHOLDERS	JENIS STAKEHOLDERS
Stakeholders Internal					
1	Kapolerstabes Palembang	Intruksi dan Penugasan	++12	Promoters	Utama
2	Wakapolrestabes Palembang	Intruksi dan Penugasan	++12	Promoters	Utama
3	PJU Polrestabes Palembang	Intruksi dan Penugasan	++12	Promoters	Utama
Stakeholders Eksternal					
1	Pemerintah Kota Palembang	Koordinasi dan Konsultasi	++12	Latens	Primer
2	DPRD	Koordinasi dan Konsultasi	++10	Latens	Primer
3	Kodim 0418/Gapo	Koordinasi dan Konsultasi	++12	Latent	Sekunder
4	KPU	Koordinasi dan Konsultasi	++12	Promoters	Utama
5	Bawaslu	Koordinasi dan Konsultasi	++12	Promoters	Utama
6	Kejaksaan	Koordinasi dan Konsultasi	++10	Defenders	Sekunder
7	Parpol	Koordinasi dan Konsultasi	++12	Promoters	Utama
8	Satpol PP	Koordinasi dan Konsultasi	++10	Defenders	Sekunder
9	LSM	Koordinasi dan Konsultasi	++10	Apathetics	Sekunder
10	Media Massa	Koordinasi dan Konsultasi	++10	Apathetics	Sekunder
11	Even Organiser	Koordinasi dan Konsultasi	++10	Apathetics	Sekunder
12	Mahasiswa	Koordinasi dan Konsultasi	++10	Apathetics	Sekunder
13	Masyarakat	Koordinasi dan Konsultasi	++10	Apathetics	Sekunder

Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa Polrestabes Palembang memiliki sejumlah stakeholders internal dan eksternal yang penting. Stakeholders internal utama memiliki dukungan dan pengaruh yang tinggi dan dianggap sebagai promoters. Di sisi lain, stakeholders eksternal terdiri dari berbagai entitas dengan tingkat pengaruh dan



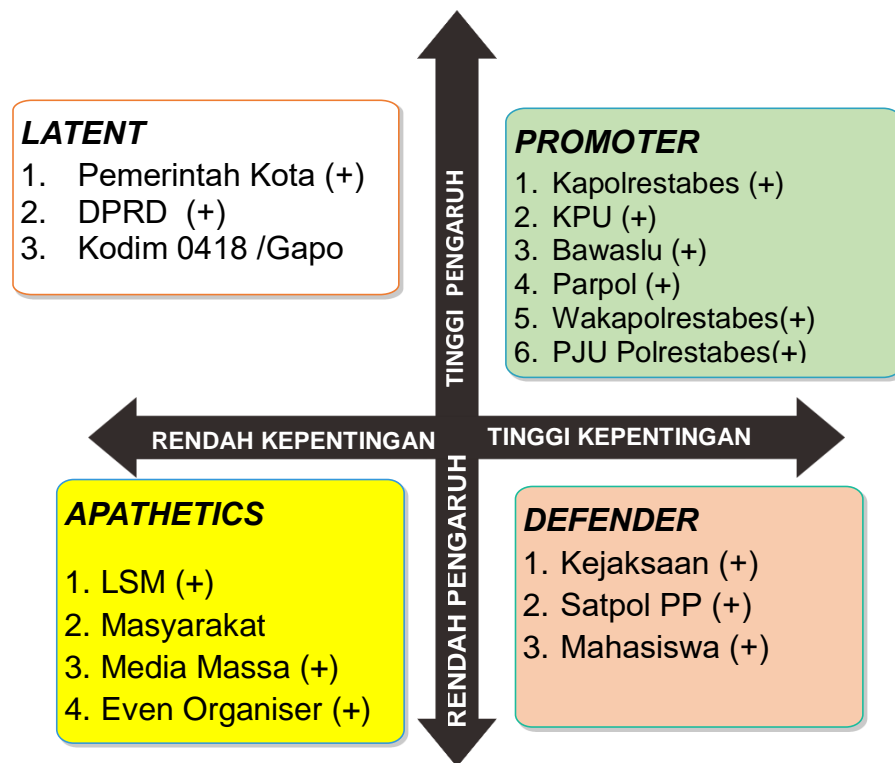
dukungan yang berbeda, serta peran yang bervariasi sebagai promoters, latent, defenders, atau apathetics. Strategi komunikasi utama untuk semua stakeholders adalah koordinasi dan konsultasi, dengan penekanan pada intruksi dan penugasan untuk stakeholders internal. Kesuksesan Polrestabes dalam menjalankan strategi dan kebijakannya bergantung pada seberapa efektif mereka berkomunikasi dan berkolaborasi dengan stakeholders ini.

b. Pemetaan Stakeholder

Proses pemetaan stakeholder dalam konteks proyek perubahan Polrestabes Palembang adalah langkah krusial yang melibatkan identifikasi menyeluruh terhadap semua pihak yang terlibat atau terkena dampak oleh proyek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap stakeholder kemudian dievaluasi berdasarkan sifat dukungan terhadap proyek: **positif (+)**, **negatif (-)**, atau **netral (+/-)**. Stakeholder dengan dukungan positif adalah mereka yang mendukung proyek karena menerima atau diperkirakan akan menerima dampak positif dari implementasinya. Sebaliknya, stakeholder dengan dukungan negatif mungkin menolak atau menghambat proyek karena dampak negatif yang dirasakan atau diantisipasi.

Lebih lanjut, pemetaan ini juga melibatkan penilaian terhadap tingkat kepentingan dan pengaruh setiap stakeholder terhadap proyek. Kepentingan merujuk pada seberapa besar stakeholder tersebut terpengaruh oleh proyek, sedangkan pengaruh menyangkut kemampuan stakeholder untuk mempengaruhi jalannya proyek. Penilaian ini membantu dalam menentukan strategi manajemen stakeholder yang tepat.

Gambar 6
Pemetaan Stakeholder Proyek Perubahan



1) Promoters (High Influence/ High Interest)

Komunikasi dengan stakeholders yang dikategorikan dalam kelompok promoters merupakan strategi komunikasi kunci yang dilakukan dalam pelaksanaan proyek perubahan, project leader melakukan berbagai metode meliputi konsultasi, penyampain informasi secara langsung dan menyeluruh serta intensif.

2) Latens (High Influence/ Low Interest)

Walaupun dikategorikan memiliki kepentingan rendah terhadap proyek perubahan, project leader akan berupaya untuk membangun komunikasi yang optimal dalam mendapatkan kepercayaan dan komitmen dalam pelaksanaan proyek perubahan tersebut. Strategi komunikasi yang dilakukan adalah dengan metode informatif, koordinatif dan komunikatif untuk mendapatkan komitmen dan kesepahaman antar stakeholders.

3) Defenders (Low Influence/ High Interest)

Komunikasi yang baik yang dilakukan project leader dengan kelompok stakeholders defenders sebagai penerima manfaat dari proyek perubahan. Upaya komunikasi yang dilakukan menggunakan strategi komunikasi dengan metode informatif, koordinatif dan edukatif dengan memberikan informasi secara komprehensif berkaitan dengan data faktual dan pemahaman terkait manfaat proyek perubahan secara persuasif.

4) Apathetics (Low Influence/ Low Interest)

Upaya komunikasi yang dibangun oleh project leader kepada kelompok stakeholders Apathetics yaitu dengan menginformasikan secara komprehensif dan intensif yang diharapkan memberikan pengaruh dan pemahaman terkait pentingnya proyek perubahan ini. Strategi komunikasi yang dilakukan dengan metode informatif, edukatif dan persuasif dengan tujuan memberikan informasi secara persuasif meliputi manfaat, data faktual dan pengetahuan terhadap stakeholders kelompok ini.

c. Strategi Mempengaruhi Stakeholders

Setelah melakukan identifikasi dan pemetaan Stakeholder, selanjutnya adalah menyusun strategi agar stakeholder yang masih memiliki pengaruh rendah atau kepentingan rendah bisa ditarik pada kuadran yang tinggi pengaruh dan kepentingannya. Untuk itu, peta strategi komunikasi yang disusun adalah sebagai berikut.

Gambar 7
Peta Strategi Komunikasi



Strategi komunikasi yang dilakukan sesuai dengan kuadran Stakeholder masing-masing. Untuk Stakeholder pada kuadran **Promoters**, strategi yang digunakan adalah **manage closely** yaitu konsultasi, penyampain informasi secara langsung dan menyeluruh serta intensif.

Kemudian, untuk Stakeholder pada kuadran **Defender** strategi yang digunakan adalah **keep informed** yaitu metode informatif, koordinatif dan edukatif dengan memberikan informasi secara komprehensif berkaitan dengan data faktual dan pemahaman terkait manfaat proyek perubahan secara persuasif.

Untuk kuadran **Latent** strategi komunikasi yang digunakan adalah **Keep Satisfied**, metode informatif, koordinatif dan komunikatif untuk mendapatkan komitmen dan kesepahaman antar stakeholders.

Sedangkan pada kuadran **Aphatetis** akan digunakan strategi **minimal effort**, yaitu metode informatif, edukatif dan persuasif dengan tujuan memberikan informasi secara persuasif meliputi manfaat, data faktual dan pengetahuan terhadap stakeholders kelompok ini.

Tabel 7
Strategi Komunikasi Stakeholders

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	EKSPEKTASI	STRATEGI KOMUNIKASI
1	Kapolerstabes Palembang	Menyetujui dan mengesahkan proyek perubahan	Memberikan laporan
2	Wakapolrestabes Palembang	Mengarahkan, menyetujui dan memberikan dukungan terkait proyek perubahan	Konsultasi
3	PJU Polrestabes Palembang	Memberikan dukungan	Konsultasi
4	Pemerintah Kota Palembang	Memberikan dukungan dan masukan terkait proyek perubahan	Diskusi berkala
5	KPU		Konsultasi Diskusi intensif
6	Bawaslu		
7	Parpol		
8	Dandim 0418 /TNI		
9	Satpol PP		
10	DPRD		
11	Kejaksaan		
12	Mahasiswa		
13	LSM		
14	Masyarakat		
15	Even Organiser	Memberikan dukungan	Edukatif informatif

2. Strategi Marketing Hasil Proyek Perubahan

Strategi marketing terhadap hasil proyek perubahan dilakukan dengan memperhatikan elemen dalam pemasaran sektor publik, yaitu **4 P 1 C** (**Product, Price, Promotion, Place dan customer**).

a. Customer

Internal : Personel Polri (Polrestabes Palembang)

Eksternal : Pemerintah Kota Palembang, KPU, Bawaslu, Parpol, TNI, Satpol, DPRD, Kejaksaan dan Masyarakat

b. Product

Sistem Penempatan Personel Berbasis Digital

c. Price

Kemudahan dalam kegiatan penempatan personel dalam rangka kegiatan Harkamtibmas.

d. Place

Pelaksanaan proyek akan berpusat di Polrestabes Palembang, sebagai lembaga Polri yang berperan dalam menjaga harkamtibmas di kota Palembang. Selain itu, proyek ini juga akan memastikan kemudahan akses informasi melalui website resmi Polrestabes Palembang. Website ini akan menjadi sumber informasi yang dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, termasuk stakeholder eksternal.

e. Promotion

Untuk memastikan pemahaman dan dukungan dari berbagai pihak, proyek ini merencanakan sosialisasi kebijakan. Ini mencakup sosialisasi kepada stakeholder internal (personel Polri) untuk memastikan pemahaman dan keterlibatan yang baik dalam implementasi . Selain itu, stakeholder eksternal juga akan dilibatkan dalam sosialisasi untuk memastikan pemahaman tentang website sistem integrasi informasi

D. Mata Pelatihan Pilihan Mendukung Proyek Perubahan

Proyek perubahan " Strategi Penempatan Personel Berbasis Digital dalam rangka Harkamtibmas yang Kondusif di Kota Palembang" sangat relevan dengan mata kuliah pilihan seperti Merumuskan Kebijakan Publik Menggunakan Big Data Analysis, Menguasai Seni Berkomunikasi dalam Hubungan Kerjadan dan Mengaktifkan Transformasi Digital pada Sektor Pemerintahan."

1. **Merumuskan Kebijakan Publik Menggunakan Big Data Analysis:**
Proyek ini melibatkan penggunaan teknologi berbasis Digital untuk mengintegrasikan informasi dan data dalam mengelola keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Palembang. Dalam mata kuliah ini, project leader akan belajar bagaimana menganalisis big data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk merumuskan kebijakan publik yang lebih efektif. Data yang dikumpulkan dari sistem integrasi informasi berbasis Digital dapat digunakan untuk merancang kebijakan keamanan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kondisi di lapangan.

2. **Menguasai Seni Berkomunikasi dalam Hubungan Kerja:** Penerapan strategi pengamanan berbasis Digital juga melibatkan komunikasi yang efektif antara berbagai pihak, termasuk aparat keamanan, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Mata kuliah ini dapat membantu project leader dalam mengembangkan keterampilan komunikasi yang dibutuhkan untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait proyek perubahan ini. Kemampuan berkomunikasi yang baik sangat penting dalam menjalankan proyek ini dengan sukses dan mendapatkan dukungan dari semua pihak terkait.

3. **Mengaktifkan Transformasi Digital pada Sektor Pemerintahan:**
Proyek ini merupakan contoh nyata dari upaya untuk mengaktifkan transformasi Digital pada sektor pemerintahan. Project leader dalam mata kuliah ini akan memahami pentingnya teknologi Digital dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan responsivitas pemerintahan. Mereka akan belajar bagaimana menerapkan solusi berbasis teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengelola kebijakan keamanan secara lebih efektif.

E. Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Adopsi Proyek Perubahan

Adopsi sebuah inovasi atau perubahan memiliki konsekuensi munculnya kebutuhan kompetensi baru yang harus dikuasai siapapun yang terdampak

atas inovasi tersebut. Pada bagian ini dijelaskan kebutuhan pengembangan kompetensi bagi pegawai pada unit kerja dimana perubahan dilakukan atau stakeholder yang terdampak atas proyek perubahan peserta pelatihan. Identifikasi dan penjelasan ini disertai dengan strategi untuk meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan tersebut. Rencana strategi pengembangan kompetensi untuk adopsi proyek perubahan paling tidak memuat siapa pihak yang terdampak proyek perubahan, kompetensi baru apa saja yang dibutuhkan, dan bagaimana cara (strategi) pengembangannya. Poin-poin tersebut dapat dirangkum ke dalam tabel seperti berikut:

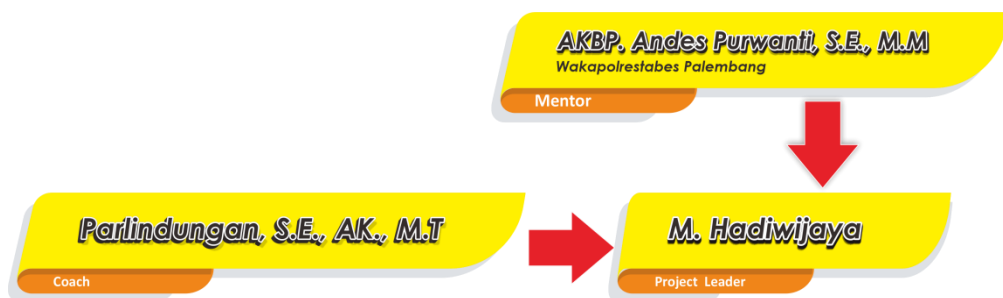
Tabel 8
Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi

Pihak Terdampak	Perubahan Kompetensi yang dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi (Klasikal/Non Klasikal)
Aparat Kepolisian di Polrestabes Palembang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan Integrasi Data Digital 2. Kemampuan Analisis Data 3. Kemampuan Komunikasi dan Kolaborasi. 4. Kemampuan Keamanan Cyber 	<p>Secara klasikal : Pelatihan Klasikal</p> <p>Non Klasikal :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Workshop dan Pelatihan On-the-Job b. Kerjasama dan Kolaborasi dengan Bidang IT c. Memanfaatkan sumber daya online seperti kursus daring, webinar, dan materi pelatihan Digital untuk terus meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang teknologi informasi
Stakeholders Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman tentang Integrasi Informasi Berbasis Digital. 2. Kemampuan Mengelola Data Digital 3. Kemampuan Berkomunikasi dan Berkolaborasi 	<p>Secara klasikal : Pelatihan formal atau seminar dapat diselenggarakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang integrasi informasi berbasis Digital dan manfaatnya.</p> <p>Non Klasikal :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Aktif berkolaborasi dengan pihak terkait dalam proyek perubahan b. Memanfaatkan sumber daya online seperti artikel, tutorial, dan materi pelatihan yang tersedia di internet untuk memperdalam pemahaman mereka tentang teknologi informasi.

Pihak Terdampak	Perubahan Kompetensi yang dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi (Klasikal/Non Klasikal)
Tim Efektif	Kemampuan manajemen proyek, keterampilan kepemimpinan, kolaborasi tim dan pemahaman tentang proyek perubahan	Secara klasikal, Pelatihan dalam manajemen proyek, kepemimpinan tim, dan kolaborasi. Secara Non Klasikal, analisa dan pembelajaran dari pengalaman nyata dalam mengelola proyek perubahan

SDM yang juga akan dikembangkan kompetensinya adalah anggota dari Tim Efektif Proyek perubahan, berikut ini :


Gambar 7
Tata Kelola Proyek Perubahan



Berdasarkan Gambar 7. Akan dijelaskan peran dan fungsi masing-masing struktur tata Kelola proyek perubahan sebagai berikut :

1. Mentor

- a. Sebagai mentor, peran ini melibatkan memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk yang tidak hanya fokus pada aspek teknis proyek, tetapi juga pada aspek pengembangan kapasitas tim.
- b. Dalam konteks proyek perubahan, mentor membantu anggota tim memahami dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, memandu mereka dalam menavigasi tantangan baru dan situasi yang tidak pasti.

- 
- c. Mentor seringkali memberikan perspektif strategis, membantu tim untuk melihat gambaran besar dan memahami bagaimana perubahan tersebut berdampak pada organisasi secara keseluruhan.

2. Coach

- a. Sebagai coach, peran ini lebih berfokus pada peningkatan kinerja individu dan tim dalam konteks spesifik proyek perubahan.
- b. Coach akan membantu tim dalam menetapkan tujuan yang realistis dan terukur, memberikan umpan balik secara rutin, dan mendukung pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk berhasil dalam proyek.
- c. Dalam proyek perubahan, coach seringkali membantu tim dalam mengelola resistensi terhadap perubahan, mempromosikan pola pikir yang adaptif, dan membangun kemampuan untuk berinovasi dan bereksperimen.

3. Project Leader

- a. Project Leader bertanggung jawab atas kepemimpinan dan manajemen keseluruhan proyek perubahan, dari konsepsi hingga implementasi.
- b. Mereka bertanggung jawab dalam merancang strategi proyek, mengalokasikan sumber daya, dan memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan timeline dan budget yang telah ditetapkan.
- c. Dalam proyek perubahan, Project Leader juga memainkan peran kunci dalam komunikasi dengan stakeholder, termasuk menyampaikan visi perubahan, memperoleh dukungan, dan menangani masalah yang muncul selama proses perubahan.

F. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri

1. Hasil Self Asesment

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta	: M. HADIWIJAYA, S.T.	Nama Mentor	: ANDES PURWANTI, S.E., M.M.
NIP	: 76071063	NIP:	: 73120857
Jabatan	: KABAGOPS POLRESTABES PALEMBANG POLDA SUMSEL	Jabatan	: WAKAPOLRESTABES PALEMBANG POLDA SUMSEL
Instansi	: POLRI	Instansi	: POLRI
Program	: PKN TK II ANGGARAN XXVIII TAHUN ANGGARAN 2023		

	Nilai Komponen			Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan		
Peserta	9,00	9,00	8,20	8,73	Baik
Mentor	9,00	9,00	9,00	9,00	Istimewa
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	9,00	9,00	8,76	8,92	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Istimewa	Istimewa	Baik	Baik	

Keterangan Kualifikasi

9.99-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

Akhir Sikap Perilaku
8,92
Kualifikasi: Baik

2. Rencana Pengembangan Potensi Diri

Setelah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2023, telah mendapat beberapa pengetahuan untuk mengembangkan diri dalam berorganisasi untuk lebih maju serta percepatan capaian target melalui strategi – strategi yang sudah di pelajari. Sehingga kedepan sistem berjalan Optimal diantaranya:

a. Orientasi Pelayanan

- 1) **Penugasan Mentor** : Mendukung dalam memahami peran pelayanan kepada masyarakat dalam konteks proyek perubahan keamanan dan ketertiban Masyarakat dan Memberikan arahan dalam mengembangkan sikap empati, komunikasi efektif, dan kemampuan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait pelayanan publik.
- 2) **Penilaian Diri** : Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur sejauh mana kemampuan pelayanan saya telah berkembang dan meminta masukan dari rekan-rekan kerja dan stakeholders.

b. Adaptabilitas

1) Penugasan Mentor :

Mendorong untuk terus memantau perkembangan teknologi informasi dan perubahan dalam kebijakan keamanan dan memberikan panduan tentang bagaimana beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan kerja yang dinamis.

2) Penilaian Diri :

mencari peluang untuk belajar tentang perkembangan terbaru dalam teknologi informasi dan praktik keamanan dan mencatat bagaimana proses mengatasi perubahan dan tantangan yang muncul selama proyek perubahan ini.

c. Pengembangan Diri dan Orang Lain

1) Penugasan Mentor :

Memberikan dukungan dalam mengidentifikasi peluang pengembangan diri, termasuk pelatihan atau sumber daya yang relevan serta Mendorong untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan rekan kerja dan memberikan bimbingan kepada mereka yang memerlukan.

2) Penilaian Diri:

membuat rencana pengembangan pribadi yang mencakup pelatihan, pembacaan, atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan kualifikasi.

G. IDENTIFIKASI POTENSI RISIKO/KENDALA DAN SOLUSINYA

Dalam setiap proyek atau inisiatif, mengidentifikasi potensi risiko dan kendala merupakan langkah penting untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan. Risiko dan kendala dapat bervariasi tergantung pada sifat proyek, lingkungan operasional, dan sumber daya yang tersedia. Berikut ini adalah narasi yang menjelaskan bagaimana risiko dan kendala diidentifikasi serta cara mengatasi dan mengelolanya. Rincian identifikasi potensi

risiko/kendala dan solusinya dalam proses pembuatan rancangan proyek perubahan dijelaskan secara rinci Tabel 9.

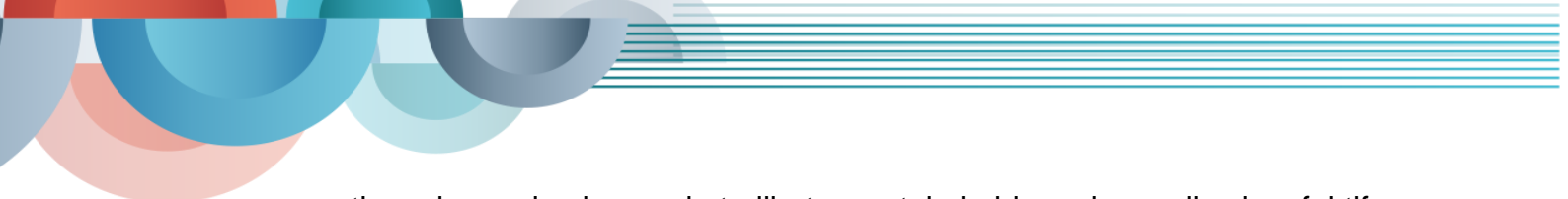
Tabel 9.
Potensi Masalah, Resiko dan Rencana Mitigasi

NO	POTENSI MASALAH	RISIKO	RENCANA MITIGASI
1	Padat rutinitas kerja dan beban kerja yang tinggi	Unsur pelaksana tidak optimal dalam melaksanakan pentahapan proyek perubahan secara optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kesadaran unsur pelaksana terkait pentingnya proyek perubahan khususnya terkait tata Kelola pelayanan yang optimal 2. Melakukan Rapat rutin bersama unsur pelaksana
2	Ego Sektoral antar stakeholder	Tidak optimalnya sistem integrasi data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan pendekatan persuasif dengan Stakeholders yang dikategorikan latens 2. Memberikan pemahaman urgensi Proyek Perubahan 3. Melakukan FGD Rutin

H. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

perubahan adalah suatu konstanta yang tidak dapat dihindari. Organisasi yang berfokus pada pertumbuhan dan adaptasi harus mampu mengelola perubahan dengan baik. Namun, keberhasilan dalam mengimplementasikan perubahan tidak terjadi begitu saja. Dibutuhkan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang dapat memengaruhi kesuksesan suatu proyek perubahan. Dalam tulisan ini, akan membahas faktor-faktor kunci keberhasilan dalam proyek perubahan. Proyek perubahan adalah upaya yang direncanakan dan terstruktur untuk mengubah aspek-aspek tertentu dalam organisasi, mulai dari proses operasional hingga budaya perusahaan. Untuk mencapai tujuan perubahan dengan baik, identifikasi dan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor pendukung keberhasilan sangatlah penting.

faktor-faktor kunci yang dapat memastikan bahwa proyek perubahan berjalan dengan lancar dan tujuan perubahan tercapai. Ini mencakup peran



penting kepemimpinan, keterlibatan stakeholder, komunikasi efektif, manajemen perubahan terstruktur, dan banyak faktor lainnya yang saling terkait. Melalui pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor ini, organisasi dapat mengurangi ketidakpastian, mengatasi hambatan, dan memaksimalkan peluang untuk kesuksesan dalam perubahan. Mari kita eksplorasi lebih lanjut mengenai faktor-faktor kunci keberhasilan dalam proyek perubahan yang dapat memberikan dampak positif pada organisasi dan mengantarkan mereka menuju masa depan yang lebih baik.

Tujuan dalam Proyek perubahan akan terealisasi dengan baik dikarenakan adanya faktor pendukung kunci keberhasilan sebagai berikut:

1. Dukungan Kepemimpinan yang Kuat

Adanya kepemimpinan yang kuat dari Polrestabes Palembang dalam mendorong dan mendukung proyek ini adalah kunci. Kepemimpinan yang efektif akan menginspirasi seluruh tim proyek dan pemangku kepentingan untuk bekerja menuju tujuan bersama.

2. Partisipasi dan Keterlibatan Stakeholders

Dukungan dan komitmen dari berbagai stakeholders, termasuk aparat kepolisian, pemangku kepentingan eksternal, dan masyarakat umum, sangat penting. Semua pihak harus terlibat aktif dalam proyek ini.

3. Pemahaman Teknologi dan Keterampilan

Pihak terlibat harus memiliki pemahaman yang memadai tentang teknologi informasi, keamanan siber, dan manajemen data. Mereka juga harus memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengintegrasikan informasi berbasis Digital dengan baik.

4. Sumber Daya yang Memadai

Infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk jaringan internet yang stabil, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan, harus tersedia untuk mendukung pelaksanaan proyek.

BAB IV PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

Sistem pengamanan yang diberikan oleh Polrestabes Palembang harus mampu menyesuaikan dengan aspek geografis kota yang unik untuk menangani berbagai macam event dan situasi keamanan di kota Palembang, mengingat Palembang memiliki peran penting dalam perdagangan dan budaya di Sumatera, kota ini sering menjadi tuan rumah berbagai acara besar yang memerlukan pengamanan ekstra. Palembang telah menyelenggarakan event-event besar seperti pertandingan olahraga internasional, konser musik, dan acara budaya, yang semuanya menarik perhatian dan partisipasi massa besar. Misalnya, Palembang bersama dengan Jakarta menjadi tuan rumah Asian Games pada tahun 2018, sebuah event olahraga terbesar di Asia yang memerlukan pengamanan ketat dan koordinasi yang luas. Selain itu, kota ini juga secara rutin menyelenggarakan festival lokal yang menggambarkan kekayaan budaya dan tradisi daerah. Untuk menghadapi event-event besar dan berbagai situasi seperti unjuk rasa, yang kadang dapat berakhir anarkis, dan persiapan pemilu serentak 2024, Polrestabes Palembang mengambil langkah strategis dengan mengintegrasikan sistem informasi berbasis digital. Sistem ini memungkinkan kepolisian untuk memantau situasi secara real-time, mengelola sumber daya dengan lebih efisien, dan berkomunikasi secara cepat dengan unit-unit dan lembaga terkait.



Mengacu pada geografi Palembang dengan sungai Musi yang membelah kota, sistem pengamanan digital dapat memanfaatkan teknologi geospasial untuk memetakan keramaian dan mengidentifikasi titik-titik kritis yang memerlukan pengawasan lebih. Dengan teknologi seperti pengenalan wajah dan analisis pola kerumunan, Polrestabes Palembang bisa lebih proaktif dalam mencegah dan

merespons kejadian yang tidak diinginkan. Selain itu, dalam konteks pemilu serentak 2024, penggunaan sistem informasi digital ini dapat memainkan peran penting dalam memastikan keamanan dan kelancaran proses demokrasi. Polrestabes Palembang dapat mengawasi distribusi logistik pemilu, memantau situasi di TPS, dan mengkoordinasikan dengan cepat jika terjadi gangguan keamanan.



Dalam setiap situasi, baik itu unjuk rasa, konser musik, atau pemilu, adanya sistem pengamanan yang kuat dan responsif sangat penting untuk menjaga agar kegiatan masyarakat dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Integrasi teknologi digital dalam sistem keamanan di Palembang merupakan langkah yang vital dalam memastikan bahwa kota ini tetap menjadi tempat yang aman untuk hidup, berbisnis, dan berkegiatan.

A. Capaian Pelaksanaan Tahapan Jangka Pendek

Dalam kerangka proyek perubahan ini, fokus utama akan diberikan pada jangka pendek, yang akan dilaksanakan dari Minggu pertama bulan September 2023 hingga Minggu pertama bulan November 2023. Jangka pendek ini bertepatan dengan periode pelaksanaan pelatihan kepemimpinan tingkat II yang sedang berlangsung. Selama jangka pendek ini, berbagai kegiatan dan inisiatif akan dijalankan dengan tujuan untuk mencapai hasil yang signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Hasil-hasil yang berhasil dicapai selama periode ini akan dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel yang terlampir di bawah ini. Dalam pelaksanaan proyek perubahan ini, jangka pendek memiliki peran kunci dalam memetakan dasar yang kuat untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi yang cermat terhadap setiap kegiatan pada

jangka pendek ini akan sangat penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan dan mencapai hasil yang diharapkan.

TABEL.10
CAPAIAN JANGKA PENDEK

NO	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN CAPAIAN
1.	Pembentukan Tim Efektif a. Pengembangan uraian tugas b. Diskusi tugas dan tanggung jawab c. Pembentukan Sprin	Surat Perintah Tim efektif	M 3 SEPT 2023	Seluruh Kegiatan Tercapai
2.	Focus Grup Discussion untuk rencana pembuatan Surat Edaran Kapolrestabes	Rancangan Surat Edaran	M 4 SEPT 2023	Seluruh Kegiatan Tercapai
3.	Mengajukan draft surat edaran kepada Kapolrestabes Palembang Untuk aplikasi Penempatan Personel Berbasis Digital dalam rangka Harkamtibmas di Kota Palembang a. Audiensi dengan Kapolrestabes b. Menyusun Surat edaran Kapolrestabes c. Pengesahan & Pengiriman Surat Keputusan Kapolrestabes Palembang	Surat Edaran/Kebijakan Kapolrestabes Palembang Tentang Sistem Integrasi informasi Berbasis Digital	M 4 SEPT 2023	Seluruh Kegiatan Tercapai
4.	Focus Group Discussion Untuk Rencana Pembuatan Aplikasi Penempatan Personel Berbasis Digital dalam rangka Harkamtibmas di Kota Palembang	Rancangan system integrasi informasi berbasis Digital Pembuatan surat undangan Penyiapan sarana & Prasarana FGD Pelaksanaan FGD Notulensi hasil FGD	M 1 OKT 2023	Seluruh Kegiatan Tercapai
5.	Pembuatan aplikasi Penempatan Personel Berbasis Digital dalam rangka Harkamtibmas di Kota Palembang a. Pengembangan Prototype System Berbasis Teknologi informasi b. pengembangan framework dari sistem Integrasi c. pengembangan sistem basis teknologi	Aplikasi	M 2 OKT 2023	Seluruh Kegiatan Tercapai

NO	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN CAPAIAN
6	Pembentukan SOP Penyusunan website Strategi Penempatan Personel Berbasis Digital dalam rangka Harkamtibmas di Kota Palembang a. Penyusunan draft SOP b. Pengesahan SOP	Surat Undangan Naskah SOP Dokumentasi Notulen	M 3 OKT 2023	Seluruh Kegiatan Tercapai
7.	Pembuatan Buku manual Book aplikasi Penempatan Personel Berbasis Digital dalam rangka Harkamtibmas di Kota Palembang a. Penyusunan Draft rancangan b. Penulisan Buku Manual Book c. Proses pencetakan	Buku Manual Book	M 4 OKT 2023	Seluruh Kegiatan Tercapai
8.	Terlaksananya PKS dengan Stakeholder di wilayah kota Palembang	Perjanjian Kerja Sama	M1 NOV 2023	Seluruh Kegiatan Tercapai
9.	Telaksananya Tactical Floor Game dalam rangka kegiatan strategi pengamanan kota bersama stakehder	Laporan kegiatan	M2 NOV 2023	Seluruh Kegiatan Tercapai
10.	Sosialisasi aplikasi Penempatan Personel Berbasis Digital dalam rangka Harkamtibmas di Kota Palembang & Stakeholder Terkait a. Pembuatan Surat Undangan Sosialisasi b. Penyiapan Sarana & Prasarana c. Pelaksanaan Sosiaalisasi	Surat Perintah Sosialisasi, Notulensi Hasil Sosialisasi	M3 NOV 2023	Seluruh Kegiatan Tercapai

Implementasi strategi penempatan personel pengamanan berbasis digital dalam rangka Harkamtibmas di Kota Palembang telah berhasil dilaksanakan dengan maksimal sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Proyek ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan efektivitas operasional keamanan dan ketertiban di kota kita. Dengan adopsi teknologi berbasis digital, kami telah berhasil memodernisasi pendekatan kami terhadap pengamanan dan penegakan hukum. Implementasi proyek ini mencakup berbagai aspek, termasuk penempatan personel pengamanan yang didukung oleh teknologi canggih seperti CCTV, perangkat pelacakan, dan sistem komunikasi terintegrasi. Hal ini memungkinkan petugas keamanan untuk dengan cepat merespons situasi darurat, memonitor aktivitas di berbagai titik strategis, dan berkoordinasi secara efisien dalam

menjaga ketertiban masyarakat. Selama pelaksanaan proyek ini telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, pihak keamanan, dan mitra teknologi. Kerja sama ini sangat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi proyek dan pemenuhan tujuan strategis kami.

Keberhasilan proyek ini juga tercermin dalam pencapaian jangka waktu yang telah ditentukan. Kami telah mengikuti rencana kerja dengan cermat, memastikan semua tahapan proyek berjalan sesuai rencana dan menghindari keterlambatan. Hasilnya, Kota Palembang kini memiliki infrastruktur keamanan yang lebih modern, responsif, dan efisien., hal ini dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

1. Membentuk Tim Efektif



Langkah awal dalam Implementasi Proyek Perubahan adalah membentuk Tim Efektif / Tim Kerja, hal ini dilaksanakan oleh Proyek Leader pada tanggal 20 September 2023 Proyek Leader mengundang Personel Polrestabes Palembang dan Akademisi untuk membentuk Tim efektif, serta memberika surat perintah tugas yang di tanda tangani oleh Kapolrestabes Palembang Kombes Pol DR. Harryo Sugihhartono, S.I.K., M.H. Membentuk tim efektif dalam suatu proyek perubahan memberikan manfaat signifikan. Produktivitas meningkat dengan pembagian tugas yang jelas, sementara keberagaman tim merangsang inovasi. Manajemen risiko yang lebih baik dicapai melalui kolaborasi.



SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin/ 2267 /IX/OPS.1./2023

Pertimbangan : bahwa dalam rangka melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII TA. 2023, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

- Dasar :
1. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Sprin/2033/VII/DIK.2.5./2023 tanggal 23 Juli 2023 tentang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023;
 2. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/5734/VI/DIK.2.5./2023/SSDM tanggal 23 Juli 2023 tentang penghadapan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun Anggaran 2023.

DIPERINTAHKAN

Kepada : PERSONEL YANG NAMA, PANGKAT, JABATAN DAN KESATUAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

- Untuk :
1. di samping melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai Tim Efektif Proyek Perubahan "STRATEGI PENEMPATAN PERSONIL PENGAMANAN BERBASIS DIGITAL DALAM RANGKA HARKAMTIBMAS KOTA PALEMBANG" dilingkungan Polrestabes Palembang;
 2. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023;
 3. melaporkan hasilnya kepada Kapolrestabes Palembang;
 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Palembang
pada tanggal : 28 September 2023

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG



HARRYO SUGIHHARTONO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73070704

Tembusan :

1. Kapolda Sumsel.
2. Wakapolda Sumsel.
3. Inwasda Polda Sumsel.
4. Karoops Polda Sumsel.

Keterlibatan dan kepemimpinan yang kuat memotivasi anggota. Komunikasi yang efektif dan adaptabilitas tim meminimalkan kesalahan dan mengakomodasi perubahan. Kualitas hasil proyek meningkat karena kerjasama tim yang baik, sementara pembagian pengetahuan dan pembelajaran bersama memperkuat kemampuan individu dan tim. Keberhasilan proyek tidak hanya tergantung pada aspek teknis, melainkan juga pada sinergi dan kerjasama tim yang kuat.

2. Focus Group Discussion untuk rencana pembuatan Surat Edaran Kapolrestabes Palembang

Seiring dengan persiapan pembuatan Surat Edaran Kapolrestabes Palembang, wacana mengadakan Focus Group Discussion (FGD) muncul sebagai sebuah strategi kunci. FGD ini bukan hanya sekedar pertemuan, melainkan sebuah meja bundar pengetahuan, di mana suara-suara dari berbagai lapisan masyarakat dan institusi berkumpul, bertujuan untuk menyelaraskan visi serta memahami harapan dan kebutuhan yang beragam.

Dalam ruang diskusi yang dinamis ini, anggota polisi, perwakilan masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya akan berbagi


pandangan, mengungkap masalah, dan mengeksplorasi solusi bersama. Ini bukan hanya tentang menciptakan sebuah dokumen, tetapi tentang merajut konsensus, menyatukan persepsi, dan memastikan bahwa setiap kata yang tertulis dalam Surat Edaran itu meresonansi dengan kebutuhan nyata di lapangan.



Melalui diskusi ini, Surat Edaran yang dihasilkan bukan sekadar instruksi, melainkan cerminan dari keinginan kolektif untuk menghadirkan perubahan yang positif. FGD menjadi kesempatan untuk mengedukasi peserta tentang nuansa kebijakan yang diusulkan, membangun keterlibatan dan dukungan yang esensial dari masyarakat.

Ketika rancangan Surat Edaran dibawa ke forum ini, ia diuji dan ditantang, memperkaya kontennya dengan ide-ide segar dan memperkuat fondasi implementasinya. Setiap tantangan yang diantisipasi dan setiap solusi yang dijabarkan menjadi bagian dari rencana yang komprehensif, meningkatkan kemungkinan keberhasilan edaran tersebut di masa depan.

Dengan mengadakan FGD, Kapolrestabes Palembang tidak hanya menunjukkan komitmen pada transparansi dan partisipasi publik, tetapi juga pada penciptaan kebijakan yang inklusif dan efektif. Surat Edaran yang lahir dari proses ini, diperkaya oleh umpan balik dan masukan, diharapkan tidak hanya diterima dengan baik oleh masyarakat tetapi



juga dihormati dan dijalankan dengan kesadaran penuh akan pentingnya setiap butir kebijakan yang disusun.

Dengan demikian, FGD menjadi lebih dari sekedar alat; ia menjadi lambang dari kepemimpinan yang mendengarkan, menghargai, dan beraksi berdasarkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Ini adalah langkah penting menuju penciptaan Surat Edaran yang bukan hanya kuat secara hukum, tetapi juga kaya akan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Surat Edaran Kapolrestabes Palembang merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Palembang untuk menyampaikan informasi, petunjuk, atau kebijakan tertentu. Proses pembuatannya dimulai dengan pengidentifikasian kebutuhan akan surat tersebut untuk menangani masalah spesifik atau menyampaikan informasi krusial. Setelah itu, isi surat disusun yang mencakup petunjuk, kebijakan baru, atau informasi tentang kegiatan khusus. Sebelum diterbitkan, surat ini harus ditinjau dan disetujui oleh Kapolrestabes atau pejabat berwenang. Setelah persetujuan, surat edaran dibuat secara resmi dan disebarluaskan kepada pihak-pihak terkait. Manfaat dari Surat Edaran Kapolrestabes Palembang sangat beragam, mulai dari menyebarkan informasi penting dari Kapolrestabes kepada masyarakat atau unit terkait, meningkatkan kesadaran publik tentang isu keamanan dan kebijakan baru, memfasilitasi koordinasi tindakan antar unit dalam kepolisian atau dengan instansi lain, membantu pengendalian situasi khusus seperti keadaan darurat, serta menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan oleh Kepolisian. Ini menjadikan surat edaran sebagai alat komunikasi dan operasional yang penting dalam pengelolaan isu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Langkah-langkah dalam pembuatan Surat Edaran Kapolrestabes Palembang dengan melaksanakan Focus Group Discussion yang dilaksanakan pada Minggu ke 4 bulan September 2023, dengan

melibatkan Tim Efektif, Kasat Sabhara dan seksi hukum Polrestabes Palembang, kegiatan meliputi :

a. **Identifikasi Kebutuhan :**

Identifikasi kebutuhan dilaksanakan untuk menanggapi suatu isu atau kebutuhan komunikasi khusus dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) **Analisis Situasi :** Project Leader dan Tim Efektif/Tim Kerja menganalisis situasi atau isu yang berkembang untuk menentukan apakah diperlukan surat edaran. Hal ini mungkin termasuk meninjau laporan kepolisian, tren keamanan, atau permintaan dari pihak eksternal.
- 2) **Konsultasi Internal:** Tim melakukan diskusi dan konsultasi dengan unit-unit terkait dalam kepolisian untuk mendapatkan pandangan lebih luas mengenai isu tersebut.
- 3) **Penentuan Tujuan:** Menentukan tujuan spesifik dari surat edaran, seperti menginformasikan kebijakan baru, memberikan arahan, atau merespons suatu kejadian.
- 4) **Keputusan untuk Menerbitkan:** Setelah analisis menyeluruh, Kapolrestabes atau pejabat yang berwenang membuat keputusan untuk menerbitkan surat edaran.

b. **Penyusunan Draf Surat:**

Setelah kebutuhan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menyusun draf surat. Dalam tahap ini, isi surat disusun dengan jelas dan tepat, mencakup semua informasi penting yang perlu disampaikan.

- 1) **Pembuatan Kerangka Isi:** Membuat kerangka kasar isi surat yang mencakup poin-poin penting yang perlu disampaikan.
- 2) **Penulisan Isi:** Menulis isi surat secara detail, memastikan bahwa semua informasi yang relevan dan penting termuat dengan jelas dan mudah dipahami.

- 3) **Penggunaan Bahasa yang Tepat:** Menggunakan bahasa yang formal, jelas, dan tepat guna untuk memastikan pesan disampaikan secara efektif.

c. **Peninjauan dan Revisi:**

Draf surat kemudian ditinjau untuk memastikan bahwa isi surat sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang berlaku. Revisi dilakukan jika diperlukan untuk memperbaiki atau mengklarifikasi informasi.

- 1) **Peninjauan oleh Tim atau Pejabat Berwenang :** Setelah draf selesai, surat tersebut ditinjau oleh tim internal atau pejabat yang berwenang untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan dan kebijakan yang berlaku.
- 2) **Meminta Masukan:** Mungkin diperlukan masukan dari unit lain atau para ahli untuk memastikan bahwa surat tersebut akurat dan efektif.
- 3) **Revisi:** Berdasarkan tinjauan dan masukan yang diterima, dilakukan revisi pada surat untuk mengoreksi atau memperbaiki isi dan formatnya.
- 4) **Pemeriksaan Akhir:** Melakukan pemeriksaan akhir untuk memastikan bahwa semua revisi telah diterapkan dan surat siap untuk proses persetujuan.

3. **Pengajuan Draf Surat Edaran Kapolrestabes Palembang**

Pengajuan Draf Surat Edaran Kapolrestabes Palembang tentang Strategi Penempatan Personel Pengamanan Berbasis Digital dalam rangka Harkamtibmas di Kota Palembang dengan menggunakan aplikasi "Antasena" adalah suatu inisiatif yang dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu. Draf surat edaran ini merupakan langkah awal yang penting dalam meningkatkan pengamanan dan responsivitas kepolisian di wilayah kota Palembang.



Kegiatan ini dimulai dengan penyusunan Draf Surat Edaran oleh sebuah tim yang terdiri dari personel kepolisian yang memiliki pengalaman di lapangan dan ahli teknologi. Dalam dokumen ini, akan diatur dengan rinci bagaimana aplikasi "Antasena" akan digunakan dalam penempatan personel pengamanan. Hal ini mencakup petunjuk tentang penggunaan aplikasi, pelaporan, pemantauan real-time, dan koordinasi antara personel. Manfaat dari pengajuan Draf Surat Edaran ini sangat signifikan. Pertama, penggunaan aplikasi "Antasena" akan meningkatkan efisiensi penempatan personel dengan optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia. Kepolisian dapat merespons dengan cepat terhadap situasi yang berkembang dengan lebih baik,

terutama dalam penanganan situasi darurat atau peristiwa penting yang memerlukan tindakan segera. Maksud dan tujuan dari pengajuan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
RESOR KOTA BESAR PALEMBANG



SURAT EDARAN
Nomor : SE / 1 / XI / 2023

Tentang

**STRATEGI PENEMPATAN PERSONEL PENGAMANAN BERBASIS DIGITAL
DALAM RANGKA HARKAMTIBMAS KOTA PALEMBANG**

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah;
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum;
 - e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - g. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat

surat edaran ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, adalah meningkatkan pengawasan dan koordinasi dalam penempatan personel pengamanan. Dengan adanya aplikasi "Antasena," semua pihak terkait dapat memantau aktivitas dan posisi personel secara real-time, yang akan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, tujuan lain adalah meningkatkan respons terhadap kejadian darurat atau peristiwa penting yang memerlukan tindakan cepat

dan terkoordinasi. Aplikasi ini memungkinkan komunikasi yang lebih efektif dan pemantauan yang lebih baik terhadap personel yang terlibat dalam tugas pengamanan. Selain itu, pengajuan Draf Surat Edaran ini juga merupakan upaya untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam operasi kepolisian sehari-hari. Ini mencerminkan komitmen Kapolrestabes Palembang untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan memanfaatkannya sebaik mungkin dalam menjaga keamanan masyarakat. Tujuan yang paling mendasar adalah meningkatkan tingkat keamanan masyarakat di Kota Palembang. Dengan memastikan penempatan personel pengamanan yang baik dan diawasi dengan cermat, diharapkan keamanan warga dapat ditingkatkan, dan masyarakat akan merasa lebih aman.

4. Focus Group Discussion untuk rencana pembuatan Aplikasi Penempatan Personel Berbasis Digital



Focus Group Discussion (FGD) untuk rencana pembuatan Aplikasi Penempatan Personel Berbasis Digital yang disebut "Antasena". FGD ini dilaksanakan pada minggu pertama bulan Oktober 2023, tepatnya pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, dan peserta yang hadir terdiri dari Project Leader, Tim Efekti/Tim Kerja, dan Programmer FGD ini diadakan dengan tujuan utama untuk menggali manfaat yang dapat diperoleh dan memahami kebutuhan serta harapan yang ada dalam proses pengembangan aplikasi ini.

Manfaat utama dari FGD ini adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif dan pandangan yang beragam dari peserta yang hadir. Project Leader dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang kebutuhan strategis dalam pengembangan aplikasi, sementara Tim Efekti/Tim Kerja dapat memberikan masukan tentang cara aplikasi akan digunakan dalam operasi sehari-hari mereka. Selain itu, Programmer dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang aspek-aspek teknis yang harus diperhitungkan dalam pembuatan aplikasi tersebut. Manfaat lainnya adalah adanya peluang untuk

mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin muncul selama pengembangan dan mencari solusi yang sesuai.

Tujuan dari FGD ini adalah sebagai berikut:

- a. **Memahami Kebutuhan Pengguna:** memahami kebutuhan dan preferensi pengguna aplikasi "Antasena". Dengan mengumpulkan masukan langsung dari Tim Efektif/Tim Kerja yang akan menggunakannya, aplikasi dapat dirancang dengan lebih akurat sesuai dengan kebutuhan mereka.
- b. **Perencanaan Strategis:** Project Leader dapat menggunakan hasil FGD sebagai landasan untuk merencanakan strategi pengembangan aplikasi. Mereka dapat memprioritaskan fitur-fitur yang penting dan mengarahkan proyek secara lebih efisien.
- c. **Pertimbangan Teknis:** Programmer dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang teknis aplikasi dan aspek-aspek yang harus diperhatikan selama pengembangan. Ini dapat membantu dalam menghindari masalah teknis di kemudian hari.
- d. **Desain User-Friendly:** merancang antarmuka pengguna yang ramah pengguna. Dengan memahami preferensi dan harapan pengguna, aplikasi dapat dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik.
- e. **Identifikasi Masalah Potensial:** mengidentifikasi masalah atau hambatan yang mungkin muncul selama pengembangan aplikasi, sehingga mereka dapat diatasi dengan tepat waktu.
- f. **Partisipasi Pemangku Kepentingan:** terlibat dalam proses pengembangan aplikasi dan lebih mungkin untuk mendukungnya. Dengan demikian, FGD bukan hanya sebagai forum untuk berdiskusi, tetapi juga sebagai langkah awal yang penting dalam mengarahkan pengembangan aplikasi "Antasena" menuju kesuksesan dengan memperhitungkan beragam perspektif dan kebutuhan yang ada.

5. Pembuatan Aplikasi Penempatan Personel Berbasis Digital

Pembuatan Aplikasi Penempatan Personel Berbasis Digital untuk mendukung kinerja dalam Harkamtimas (Pemeliharaan Keamanan,

Ketertiban, dan Ketentraman Masyarakat) di Kota Palembang memiliki dampak yang signifikan, dan dapat dianalisis berdasarkan teori keamanan dan manajemen strategi kepemimpinan.



Efisiensi dan Responsivitas Aplikasi ini meningkatkan efisiensi dalam manajemen penempatan personel, memungkinkan Polrestabes untuk merespons dengan cepat terhadap situasi darurat atau peristiwa penting. Ini sesuai dengan konsep keamanan yang menekankan perlunya respons yang cepat dan tepat dalam mengatasi ancaman.



Manajemen Sumber Daya Aplikasi ini memungkinkan manajemen yang lebih baik dari sumber daya manusia dalam konteks keamanan. Pemimpin dapat mengalokasikan personel sesuai dengan kebutuhan dan risiko yang ada, yang merupakan aspek penting dalam teori keamanan.

Transparansi dan Akuntabilitas Aplikasi ini memberikan transparansi yang lebih besar dalam manajemen penempatan, yang sesuai dengan prinsip-prinsip keamanan yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam tindakan keamanan publik.


```

Elements Console Sources Network Performance Memory Application Security Lighthouse Re
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head></head>
<body class="animision" style="animation-duration: 1500ms; opacity: 1;" == $0
  <!-- Header -->
  <header class="header-v4"></header>
  <!-- Slider -->
  <section class="section-slide"></section>
  <!-- Footer -->
  <footer class="bg3 p-t-30 p-b-32"></footer>
  <!-- Back to top -->
  <div class="btn-back-to-top" id="myBtn"></div>
  <!-- Modall -->
  <div class="wrap-modall js-modall p-t-60 p-b-20"></div>
  <style></style>
  <!--<script src="https://antasena.online/public/sprin/vendor/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
  <!--<script src="vendor/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script> -->
  <!--<script src="https://antasena.online/public/sprin/vendor/animision/js/animision.min.js"></script>
  <!--<script src="vendor/animision/js/animision.min.js"></script> -->
  <!--<script src="https://antasena.online/public/sprin/vendor/bootstrap/js/popper.js"></script>
  <!--<script src="vendor/bootstrap/js/popper.js"></script> -->
  <script src="https://antasena.online/public/sprin/vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
  <!--<script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> -->
  <!--<script src="https://antasena.online/public/sprin/vendor/select2/select2.min.js"></script>
  <!--<script src="vendor/select2/select2.min.js"></script> -->
  <script></script>
  <!--<script src="https://antasena.online/public/sprin/vendor/daterangepicker/moment.min.js"></script>
  <!--<script src="vendor/daterangepicker/moment.min.js"></script> -->
  <script src="https://antasena.online/public/sprin/vendor/daterangepicker/daterangepicker.js"></script>
  <!--<script src="vendor/daterangepicker/daterangepicker.js"></script> -->
  <!--<script src="https://antasena.online/public/sprin/vendor/slick/slick.min.js"></script>
  <!--<script src="vendor/slick/slick.min.js"></script> -->
  <script src="https://antasena.online/public/sprin/js/slick-custom.js"></script>
  <!--<script src="js/slick-custom.js"></script> -->
  <!--<script src="https://antasena.online/public/sprin/vendor/nanollap100/nanollap100.js"></script>
  <!--<script src="vendor/nanollap100/nanollap100.js"></script> -->
  </body>
  </html>

```

Pemimpin sebagai Pengambil Keputusan dapat menggunakan aplikasi ini sebagai alat untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam penempatan personel. Keselarasan dan Prioritas membantu pemimpin untuk menjaga keselarasan dan prioritas dalam tugas-tugas keamanan.





Mereka dapat mengidentifikasi area atau situasi yang memerlukan perhatian lebih besar dan menyesuaikan penempatan personel secara sesuai. Dengan fitur pelaporan dan pemantauan yang disediakan oleh aplikasi, pemimpin dapat terus memantau kinerja personel dan membuat perubahan strategis jika diperlukan. Ini sesuai dengan prinsip manajemen strategi yang menekankan pentingnya evaluasi dan adaptasi. Selain itu Aplikasi ini memungkinkan pemimpin untuk mengadopsi pendekatan kepemimpinan adaptif, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan situasi. Mereka dapat merespons dengan lebih baik terhadap ancaman atau keadaan darurat yang muncul.

Berikut adalah rangkaian kegiatan dalam pembuatan Aplikasi Penempatan Personel Berbasis Digital berbasis website yang diberi nama "Antasena," mulai dari perencanaan hingga penggunaan aplikasi tersebut:

- a. **Perencanaan Proyek:**
 - 1) Identifikasi Tujuan dan Kebutuhan Aplikasi.
 - 2) Rencanakan Anggaran dan Sumber Daya.
 - 3) Bentuk Tim Proyek.

- b. **Analisis Kebutuhan :**
 - 1) Lakukan Wawancara dengan Pemangku Kepentingan.
 - 2) Identifikasi Fitur Utama dan Persyaratan Aplikasi.

- c. **Desain Aplikasi:**
 - 1) Rancang Antarmuka Pengguna (UI/UX) Website.
 - 2) Buat Desain Wireframe dan Prototipe.
 - 3) Pilih Teknologi Web dan Arsitektur Perangkat Lunak.

- d. **Pengembangan Website:**
 - 1) Mulai Pengembangan Backend dan Frontend Website.
 - 2) Implementasikan Fitur-fitur Utama.
 - 3) Uji Coba dan Debug Website.



e. **Integrasi dan Pengujian**


- 1) Integrasi dengan Sistem Terkait.
- 2) Lakukan Pengujian Fungsional dan Pengujian Keamanan.
- 3) Koreksi Bug dan Perbaiki.

Seluruh rangkaian kegiatan ini, penting untuk melibatkan pemangku kepentingan, mendengarkan umpan balik mereka, dan terus meningkatkan website agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi. Dengan demikian, Website "Antasena" dapat menjadi alat yang efisien dan efektif dalam manajemen penempatan personel berbasis digital sesuai dengan tujuan awalnya.

6. **SOP Aplikasi Penempatan Personel Berbasis Digital**

Project Leader juga membuat SOP Penempatan Personel Pengamanan Berbasis Digital dalam rangka memelihara situasi kantibmas yang kondusif di kota Palembang, SOP tersebut di buat pada minggu ketiga bulan Oktober 2023 yang dilaksanakan beserta tim efektif di Polrestabes Palembang. Prosedur Operasional Standar (SOP) terintegrasi erat dengan berbagai teori manajemen dan operasional, dan membawa manfaat signifikan bagi organisasi. SOP mengambil prinsip dari teori manajemen klasik yang diperkenalkan oleh Frederick Taylor, yang menekankan pentingnya standarisasi tugas untuk efisiensi kerja. Dalam konteks ini, SOP memastikan bahwa semua tugas dilakukan sesuai dengan metode yang telah ditentukan, meminimalisir variasi dan meningkatkan produktivitas.

 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG	NOMOR : B / / XI / 2023 / Bag Ops
	TANGGAL PEMBUATAN : 3 Nopember 2023
	TANGGAL REVISI : 6 Nopember 2023
	TANGGAL PENGESAHAN : 8 Nopember 2023
DISAHKAN OLEH :	
 KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG POLDA SUMATERA SELATAN KEPALA DR. HERYO SUGIHARTONO, S.I.K., M.H KORBANIS BESAR POLISI NRP 73070704	
JUDUL SOP : TATA CARA INPUT DAN UPDATE DATA PERSONEL PENGAMANAN MELALUI APLIKASI WEBSITE ANTASENA	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANAAN :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan Kepolisian dengan Masyarakat; 7. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/323/IX/2005 tanggal 5 September 2005 tentang Penyelenggaraan Fungsi Kepolisian; 8. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Informasi dalam Kepolisian;	
KETERKAITAN :	PERALATAN PERLENGKAPAN :
	1. Internet 2. Komputer 3. ATK
PEMBUATAN :	PENCATATAN / PENDATAAN :
Penyusunan SOP : TATA CARA INPUT DAN UPDATE DATA PERSONEL PENGAMANAN MELALUI APLIKASI WEBSITE ANTASENA	



Dari perspektif teori sistem, SOP memandang organisasi sebagai kumpulan proses yang saling terkait, sebagaimana dikemukakan oleh Ludwig von Bertalanffy. SOP berfungsi sebagai instruksi operasional yang memastikan bahwa setiap bagian dari sistem organisasi bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan.

Manfaat SOP yang terkait dengan teori ini antara lain:

- a. **Konsistensi dan Kontrol Kualitas:**

SOP menetapkan sebuah pedoman yang jelas, mengurangi risiko kesalahan dan variabilitas dalam kualitas. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip W. Edwards Deming tentang pengendalian kualitas, yang mengadvokasi untuk proses yang terstandarisasi dalam mencapai kualitas yang tinggi.
- b. **Efisiensi Operasional:**

SOP membantu dalam penciptaan prosedur yang efisien, mengurangi waktu dan upaya yang dibutuhkan untuk melatih karyawan baru. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip efisiensi yang diusulkan oleh teori manajemen ilmiah.
- c. **Pengurangan Risiko:**

Dengan SOP, organisasi dapat mengurangi risiko operasional karena semua tindakan telah direncanakan dan didokumentasikan dengan baik. Ini mencerminkan teori pengurangan risiko yang menekankan pentingnya prediksi dan pencegahan.
- d. **Peningkatan Pelatihan:**

SOP bertindak sebagai alat pelatihan yang sangat efektif, memungkinkan transfer pengetahuan yang cepat dan efektif. Ini mengikuti teori pembelajaran organisasi yang menghargai dokumentasi dan standarisasi pengetahuan.
- e. **Adaptabilitas dan Fleksibilitas:**

Meskipun SOP adalah standar yang ditetapkan, proses pembaruan yang teratur memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau teknologi. Ini menggabungkan prinsip-prinsip dari teori sistem adaptif kompleks,

yang menekankan pentingnya adaptasi untuk kelangsungan hidup organisasi.

f. **Kepatuhan Regulasi:**

SOP membantu organisasi mematuhi regulasi dan standar industri yang berlaku, yang merupakan aspek kritis dari teori kepatuhan dan tata kelola perusahaan.

Dengan memadukan teori manajemen yang solid dengan praktik operasional yang terstruktur, SOP menjadi instrumen penting dalam mengarahkan organisasi menuju pencapaian tujuan mereka dengan efektif dan efisien. Implementasi SOP Penempatan Personel Pengamanan Berbasis Digital dalam rangka Harkamtibmas di Kota Palembang merupakan manifestasi dari penerapan prinsip-prinsip ini, menunjukkan komitmen terhadap operasional yang terorganisir dan tanggung jawab sosial dalam menjaga keamanan publik.

7. **Pembuatan Buku Manual**

Buku panduan adalah sebuah publikasi yang berisi informasi dan instruksi untuk membantu pembaca memahami, menggunakan, atau menguasai suatu topik atau produk tertentu. Buku panduan seringkali disusun secara sistematis dan mudah diikuti, dengan tujuan memberikan panduan langkah demi langkah dalam suatu proses atau menjelaskan fitur-fitur dari suatu produk.

Manfaat buku panduan antara lain:

- a. **Memudahkan Pembelajaran:** Buku panduan menyediakan informasi terstruktur yang memudahkan pembaca dalam belajar atau memahami suatu topik atau produk.
- b. **Referensi Cepat:** Buku panduan sering kali digunakan sebagai alat referensi yang memungkinkan pengguna menemukan informasi yang diperlukan dengan cepat.
- c. **Meningkatkan Efisiensi:** Dengan adanya instruksi yang jelas, pengguna dapat lebih efisien dalam menggunakan atau menerapkan sesuatu, mengurangi waktu pembelajaran atau troubleshooting.

- d. **Keseragaman Instruksi:** Buku panduan menyediakan standar prosedur atau instruksi yang seragam, sehingga semua pengguna memiliki panduan yang sama.
- e. **Mengurangi Risiko Kesalahan:** Informasi yang terstruktur dan jelas membantu mengurangi risiko kesalahan dalam penggunaan atau penerapan suatu produk atau konsep.
- f. **Dukungan untuk Pelatihan:** Buku panduan sering digunakan dalam konteks pelatihan untuk membantu peserta didik mengikuti materi kursus atau pelatihan.
- g. **Sumber Informasi yang Kredibel:** Buku panduan yang disusun oleh ahli atau produsen produk memberikan informasi yang kredibel dan dapat diandalkan.

Secara keseluruhan, buku panduan adalah sumber informasi yang penting dan berguna dalam berbagai bidang, mulai dari teknologi, pendidikan, hingga hobi dan kegiatan sehari-hari.

8. Terlaksananya Perjanjian Kerjasama Sama dengan Stakeholder di Kota Palembang



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG
DENGAN
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

NOMOR : B/55/XI/2023/ Restabes Plg
NOMOR : 06/PKS//XI/2023

**TENTANG
PENEMPATAN PERSONEL PENGAMANAN BERBASIS DIGITAL
DALAM RANGKA HARKAMTIBMAS DI KOTA PALEMBANG**

14
BAB X
PENUTUP
Pasal 29

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** serta **PARA PIHAK** memegang masing-masing 1 (satu) rangkap.

Perjanjian Kerja Sama Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Dr. HARRY SUGIHHARTONO, S.I.K., M.H
KOMISARIS BESAR POLISI NRP.73070704

PIHAK KEDUA



H. Drs. RATU DEWA, M.Si
Pj. WALIKOTA PALEMBANG

Pada bulan November 2023, sebuah langkah inovatif diambil oleh Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dan Pemerintah Kota Palembang dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) di kota Palembang. Perjanjian kerja sama ini merupakan langkah strategis dan progresif dalam merespons tantangan keamanan kontemporer yang memerlukan pendekatan adaptif dan inovatif, terutama dalam era digital.



Kesepakatan ini berfokus pada penempatan personel pengamanan berbasis digital, dimana teknologi digital akan digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penempatan personel pengamanan, memungkinkan respons yang cepat dan tepat terhadap situasi keamanan yang berubah-ubah. Strategi ini juga menekankan pentingnya kolaborasi erat antara Polrestabes Palembang dan Pemerintah Kota Palembang dalam merancang dan menerapkan solusi berbasis digital ini. Kerjasama ini melibatkan pertukaran data dan informasi, pemanfaatan sarana dan prasarana, penempatan personel pengamanan berbasis digital, serta penentuan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Ini mencakup pelatihan personel, pembuatan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang spesifik, serta penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sistem pengamanan digital yang diperlukan.

Salah satu komponen kunci dalam perjanjian ini adalah aplikasi Antasena, yang akan dikelola dan dirawat untuk memastikan pengoperasiannya yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tim pengelola aplikasi, yang terdiri dari tenaga IT profesional, akan bertanggung jawab atas pemeliharaan rutin, pengelolaan database, pembaruan sistem, dan penanganan insiden teknis. Aspek keamanan aplikasi Antasena juga menjadi prioritas utama, dengan perlindungan terhadap serangan cyber, kebocoran data, dan akses tidak sah. Audit keamanan akan dilakukan secara berkala untuk memastikan keefektifan langkah-langkah keamanan yang ada.



Perjanjian ini juga menyertakan ketentuan tentang sosialisasi, analisis dan evaluasi, pembiayaan, ketentuan lain-lain, dan jangka waktu. Sosialisasi akan dilakukan untuk memastikan semua pihak yang terlibat memahami hak dan kewajiban masing-masing serta untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang sistem pengamanan berbasis digital.

Analisis dan evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk memastikan semua aspek kerjasama berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perjanjian ini juga menetapkan protokol keamanan data yang ketat, memastikan kerahasiaan informasi yang

diperoleh sehubungan dengan perjanjian kerja sama. Perjanjian kerja sama ini dibuat dengan komitmen kuat dari kedua belah pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai di Kota Palembang, menunjukkan sinergi positif antara kepolisian dan pemerintah kota dalam memanfaatkan teknologi digital untuk peningkatan keamanan publik.

9. Terlaksananya Tactical Floor Game Strategi Pengamanan kota bersama Stakeholder



Pelaksanaan kegiatan Tactical Floor Game dalam strategi pengamanan kota Palembang melibatkan berbagai langkah dan komponen penting untuk menguji dan mematangkan rencana pengamanan serta respons terhadap berbagai situasi darurat atau ancaman keamanan. Pertama-tama, dalam tahap perencanaan, tim pelaksana harus menetapkan anggota yang akan terlibat dalam permainan dan memilih skenario situasi darurat yang akan dimainkan. Mereka juga harus merancang aturan main yang jelas dan adil untuk memastikan kelancaran permainan. Kemudian, dalam tahap pelaksanaan, para pemain atau stakeholder yang terlibat dalam permainan diberi peran sesuai dengan situasi darurat yang dimainkan. Mereka harus mempersiapkan diri dengan alat komunikasi dan perlengkapan yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka.

Selama permainan, pemain harus mengikuti aturan main, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pemain lain untuk menghadapi ancaman yang ada.



Proses pemantauan dan evaluasi menjadi kunci dalam tahap ini. Tim pengamat atau wasit bertugas memantau jalannya permainan, mencatat tindakan dan keputusan pemain, serta memastikan bahwa aturan main diikuti dengan benar. Mereka juga memiliki peran penting dalam mengidentifikasi peluang perbaikan dalam respons dan strategi yang digunakan. Setelah permainan selesai, sesi debriefing dan evaluasi digelar, di mana pemain dan tim pelaksana dapat mengevaluasi kinerja mereka, membahas pelajaran yang dipetik, dan mengidentifikasi area perbaikan yang perlu diperhatikan. Feedback dari para stakeholder juga sangat berharga dalam mengevaluasi rencana pengamanan dan respons yang telah diuji dalam Tactical Floor Game. Untuk mendukung pelaksanaan permainan ini, sarana dan prasarana yang diperlukan termasuk tempat pelaksanaan yang sesuai, alat komunikasi, sistem monitoring dan evaluasi, perlengkapan dan kendaraan yang dibutuhkan pemain, serta perangkat lunak simulasi khusus untuk merancang dan mengatur permainan.

Pelaksanaan kegiatan Tactical Floor Game dalam strategi pengamanan kota Palembang bersama para stakeholder merupakan simulasi permainan yang dirancang untuk menguji dan mematangkan

rencana pengamanan dan respons dalam menghadapi berbagai situasi darurat atau ancaman keamanan. Berikut adalah rincian terperinci mengenai pelaksanaan kegiatan ini, termasuk tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sarana dan prasarana yang digunakan:

a. Perencanaan Kegiatan Tactical Floor Game:

Tugas dan Tanggung Jawab: Tim perencana harus menentukan anggota yang akan terlibat dalam Tactical Floor Game, seperti perwakilan dari kepolisian, militer, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya. Setiap anggota tim memiliki tanggung jawab khusus dalam mempersiapkan permainan, termasuk pemilihan skenario, aturan main, dan alokasi peran.



Tugas dan Tanggung Jawab: Tim perencana harus memilih skenario situasi darurat atau ancaman keamanan yang relevan dan realistis yang akan dihadapi dalam permainan. Skenario ini harus mencakup berbagai aspek keamanan, seperti bencana alam, terorisme, kerusuhan, dan lain-lain. Tugas dan Tanggung Jawab: Tim perencana harus merancang aturan main yang jelas dan adil untuk Tactical Floor Game. Ini mencakup batasan, tata cara permainan, waktu, serta cara penilaian dan evaluasi. Setiap anggota tim atau stakeholder yang terlibat dalam permainan diberi peran dan tugas yang sesuai dengan peran mereka dalam situasi

darurat yang dimainkan. Mereka juga mempersiapkan alat komunikasi dan perlengkapan yang diperlukan.

Simulasi Permainan, Tim pelaksana memulai permainan dengan memainkan skenario yang telah dipilih. Mereka harus mengikuti aturan main, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan sesama pemain untuk menghadapi ancaman atau situasi darurat.

Dengan mengikuti SOP ini, Tactical Floor Game dapat dijalankan dengan baik untuk menguji, memantapkan, dan meningkatkan rencana pengamanan dan respons bersama stakeholder dalam menghadapi situasi darurat atau ancaman keamanan di kota Palembang. Dengan evaluasi yang cermat dan pembelajaran dari permainan ini, para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kesiapsiagaan mereka dalam menghadapi situasi nyata.

10. Sosialisasi Aplikasi Penempatan Personel Berbasis Digital dalam rangka Harkamtibmas di Kota Palembang

PLAY 97.5 FM

plug & play

**STRATEGI PENEMPATAN PERSONIL
PENGAMANAN BERBASIS DIGITAL DALAM
RANGKA HARKAMTIBMAS KOTA PALEMBANG**

AKBP M. Hadi Wijaya ST
(Kabag Ops Polrestabes Palembang)

**SELASA,
7 NOVEMBER 2023**
08.00 WIB

**RINNI
MALIK**

www.playfm.id
@975playfm
@975playfm
97.5 Play FM Palembang

"Sosialisasi Aplikasi Penempatan Personel Berbasis Digital dalam rangka Harkamtibmas di Kota Palembang" adalah sebuah proses yang bertujuan untuk mengenalkan dan mengintegrasikan sebuah aplikasi digital yang dirancang khusus untuk penempatan personel keamanan di Kota Palembang. Ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan Harkamtibmas, yang merupakan singkatan dari

Harkat dan Martabat Kepolisian dan Masyarakat,

sebuah konsep yang fokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.



Everett Rogers dalam teorinya Difusi Inovasi menjelaskan bahwa sebuah inovasi (dalam kasus ini, aplikasi penempatan personel berbasis digital) menyebar dalam sebuah masyarakat atau organisasi. Proses sosialisasi aplikasi ini melibatkan komunikasi tentang kegunaan dan cara kerja aplikasi untuk memudahkan adopsi di kalangan personel keamanan dan masyarakat. Model ini menekankan pada pentingnya komunikasi satu-ke-satu atau dalam kelompok kecil untuk efektifnya penyebaran informasi. Sesi pelatihan dan workshop tentang aplikasi ini juga menjadi salah satu model sosialisasi yang sangat efektif sekaligus sebagai informasi mengenai aplikasi ini disampaikan dan diterima dalam struktur organisasi kepolisian. Ini termasuk bagaimana pesan disesuaikan untuk berbagai tingkat hierarki dan bagian dalam organisasi. Sosialisasi aplikasi ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana aplikasi tersebut akan berintegrasi dan mempengaruhi sistem sosial di lingkungan kepolisian dan masyarakat.

Dengan mengaitkan proses sosialisasi aplikasi penempatan personel ini dengan teori-teori komunikasi, kita dapat lebih memahami bagaimana informasi tentang aplikasi tersebut disebarakan, diterima, dan diadopsi di lingkungan yang dituju. Ini penting untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban di Kota Palembang.



Dalam upaya untuk memperkuat Harkamtibmas di Kota Palembang, Kepolisian Resort Kota Besar Palembang telah menetapkan strategi komunikasi yang terstruktur dan terfokus. Stakeholders internal yang meliputi Kapolrestabes, Wakapolrestabes, dan Para Pejabat Utama (PJU) Polrestabes Palembang, memiliki peranan sebagai 'Promoters' utama dalam mendorong inisiatif ini. Mereka bertanggung jawab untuk menginstruksikan dan menugaskan tugas-tugas yang terkait dengan implementasi dan pengelolaan aplikasi penempatan personel berbasis digital. Dalam lanskap digital yang terus berkembang, Polrestabes Palembang memperkenalkan aplikasi website "Antasena" – sebuah terobosan dalam penempatan personel pengamanan. Melalui sosialisasi yang terstruktur, aplikasi ini tidak sekadar menjadi alat, tetapi juga simbol dari evolusi dinamis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berlandaskan Teori Difusi Inovasi, Polrestabes Palembang memulai dengan membangun kesadaran. Di ruang-ruang rapat, melalui email, dan di panggilan-panggilan konferensi, informasi tentang "Antasena" mulai mengalir. Aplikasi ini tidak hanya dijelaskan melalui pengumuman formal, tetapi juga melalui demonstrasi langsung yang menyoroti fungsi dan manfaatnya. Pemimpin opini di dalam kepolisian, diakui karena keahlian dan pengaruhnya, diberi kesempatan pertama untuk menjajal aplikasi ini, menjadi duta dalam menarik rekan-rekan mereka ke arus perubahan.



Dalam struktur hierarkis Polrestabes, dimana setiap instruksi memiliki beratnya sendiri, model komunikasi berjenjang diaktifkan. Pesan dari atas disampaikan dengan jelas, memastikan bahwa tiap personel memahami peran mereka dalam mengintegrasikan "Antasena" ke dalam rutinitas kerja. Sementara itu, komunikasi antar rekan sejawat berperan sebagai resonansi yang memperkuat pesan dan menumbuhkan keterlibatan kolektif. Mengadopsi Teori Penggunaan dan Kepuasan Media, "Antasena" dirancang untuk tidak hanya informatif tetapi juga intuitif. Ini memenuhi kebutuhan pengguna – dari kecepatan dalam penempatan personel hingga keakuratan data – sambil memberikan kepuasan langsung melalui pengalaman pengguna yang mulus. Interaktivitas menjadi kunci; setiap klik mengundang partisipasi, setiap masukan memicu adaptasi, membuat pengguna merasa terlibat secara pribadi dalam keamanan kolektif. Di dalam perjalanan sosialisasi ini, Polrestabes Palembang tidak berhenti pada satu pengumuman atau satu pelatihan. Berpegang pada Model Proses Komunikasi Berkelanjutan, pendidikan tentang "Antasena" diberikan

sebagai aliran yang tidak pernah berhenti. Regular update, sesi pembelajaran, dan forum diskusi menjadi bagian dari kalender, memastikan bahwa aplikasi ini terus hidup dan berkembang bersama mereka yang menggunakannya.


Evaluasi berkelanjutan melengkapi siklus ini, menutup lingkaran antara inovasi dan praktik. Setiap tanggapan dari pengguna menjadi titik data, setiap saran menjadi peluang, mendorong "Antasena" untuk terus beradaptasi, terus meningkat, selaras dengan dinamika yang tidak pernah statis dari Kota Palembang.

B. Manfaat capaian tahapan jangka pendek Nilai Ekonomis

Nilai ekonomis dari rancangan proyek perubahan ini, dapat dinilai dari sisi efisiensi dan efektivitas. Dalam pendekatan berbasis digital, biaya operasional dapat ditekan karena infrastruktur fisik yang dibutuhkan lebih sedikit, dan intervensi dapat dilakukan secara online. Sehingga penempatan personel pengamanan dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Secara umum manfaat proyek perubahan ditinjau nilai ekonomis berdasarkan klasifikasi efektivitas dan efisiensi yang diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1. Efisiensi**, yaitu menekan biaya sehingga hemat biaya daripada Sistem penempatan personel secara manual. Penempatan personel pengamanan konvensional seringkali memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga apabila memanfaatkan penggunaan Teknologi Digital dapat dihemat biaya administratif dan logistik sebesar 10 juta rupiah per tahun.

Sistem digital yang canggih ini telah mendefinisikan efisiensi dengan memungkinkan pusat komando untuk mengalokasikan personel keamanan secara real-time berdasarkan analisis data yang akurat. Algoritma prediktif mengidentifikasi pola kriminalitas dan kerawanan keamanan, memastikan personel dikerahkan sebelum insiden bereskalasi. Dengan demikian, keberadaan petugas tidak hanya terasa lebih "nyata" oleh masyarakat, tetapi juga lebih diperhitungkan oleh mereka yang berniat mengganggu ketertiban.




Efisiensi yang diperoleh dari sistem ini juga berarti penghematan sumber daya. Anggaran yang tadinya mungkin terbuang sia-sia untuk penugasan yang kurang optimal kini dialihkan ke area yang membutuhkan peningkatan keamanan. Penggunaan teknologi GPS dan mobile apps memastikan personel keamanan selalu berada di jalur yang paling efektif, mengurangi waktu respons dan meningkatkan kemungkinan pencegahan kejahatan. Pelaporan dan dokumentasi yang dilakukan secara digital mengurangi kertas kerja yang tidak perlu, menyederhanakan proses administratif dan mempercepat aliran informasi. Ini tidak hanya berarti lingkungan kerja yang lebih bersih dan kurang berantakan, tetapi juga sebuah sistem yang lebih tanggap dan dapat diandalkan.

2. Efektivitas,

efektivitas, penempatan personel pengamanan berbasis digital di kota Palembang telah membawa dimensi baru dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Efektivitas ini dapat dilihat dalam beberapa aspek kunci:

- a. Ketepatan Sasaran Penempatan Personel: Sistem digital memungkinkan peta panas kejahatan yang dinamis, yang menunjukkan area dengan aktivitas kriminal yang tinggi. Dengan penempatan yang berbasis pada data aktual, personel pengamanan dapat ditempatkan di lokasi-lokasi yang paling membutuhkan, sehingga meningkatkan efektivitas pencegahan dan penindakan.
- b. Respon yang Lebih Cepat terhadap Insiden: Teknologi berbasis digital mengurangi waktu yang diperlukan untuk merespons insiden. Dengan sistem komunikasi yang terintegrasi, personel di lapangan dapat menerima notifikasi dan instruksi dalam hitungan detik, memungkinkan mereka untuk bertindak dengan segera.
- c. Pelacakan dan Pengawasan yang Lebih Baik: Sistem digital menyediakan alat pelacakan dan pengawasan yang memungkinkan koordinasi yang lebih efisien di antara unit



pengamanan. GPS dan aplikasi berbasis mobile memastikan bahwa setiap personel dapat dipantau posisinya, memastikan bahwa mereka aman dan efektif dalam menjalankan tugas.


- d. Peningkatan Kualitas Pelaporan dan Akurasi Data: Dengan sistem digital, pelaporan insiden menjadi lebih akurat dan tepat waktu. Data yang terkumpul memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pola kejahatan, yang bisa digunakan untuk memperbaiki strategi pengamanan dan pelatihan personel.
- e. Pengurangan Kesalahan Manusia: Sistem berbasis digital membantu mengurangi kesalahan manusia dengan menyediakan protokol standar dan checklist dalam bentuk digital yang harus diikuti oleh personel, mengurangi variabilitas dalam penanganan situasi.
- f. Dukungan Keputusan Berdasarkan Bukti: Sistem digital mengumpulkan berbagai data yang bisa diolah menjadi informasi berharga untuk mendukung keputusan strategis. Hal ini memastikan bahwa keputusan yang dibuat berdasarkan bukti yang solid dan analisis yang mendalam.
- g. Pengelolaan Sumber Daya yang Dinamis: Dengan sistem yang mampu mengalokasikan sumber daya secara dinamis, personel dan peralatan dapat dialokasikan sesuai dengan permintaan yang berubah-ubah, memaksimalkan penggunaan aset yang tersedia.
- h. Keterlibatan Masyarakat: Aplikasi dan platform digital memberikan saluran bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan mereka, melalui pelaporan insiden atau aktivitas mencurigakan, yang meningkatkan efektivitas pengamanan secara keseluruhan.

Melalui semua aspek ini, strategi penempatan personel pengamanan berbasis digital di Palembang tidak hanya efisien tetapi juga efektif, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif untuk pertumbuhan dan kemakmuran kota.

C. Kepemimpinan Strategis



Kepemimpinan strategis adalah suatu bentuk kepemimpinan yang fokus pada perencanaan dan pengembangan visi jangka panjang serta strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Ini melibatkan pemimpin dalam mengidentifikasi arah strategis yang tepat, mengembangkan rencana tindakan, dan menggerakkan organisasi atau tim untuk mencapai visi dan tujuan jangka panjang tersebut. Pelaksanaan Proyek Perubahan pada suatu institusi tidaklah muda karena ada penolakan baik secara langsung maupun tidak langsung dari unsur pelaksanaan, hal ini membutuhkan kemampuan seorang pemimpin dalam mewujudkan terlaksananya proyek perubahan serta mempertimbangkan resiko dan mitigasinya dengan melihat peluang maupun kendala yang akan timbul. Upaya yang dilakukan adalah melakukan kordinasi dengan stakeholders terkait tentang manfaat rehabilitasi berbasis digital. Peran serta kepemimpinan strategis sebagai seorang team leader adalah kunci dalam mencapai kesuksesan dalam mengelola dan memimpin sebuah tim. Kepemimpinan strategis melibatkan penggunaan wawasan, perencanaan, dan pengambilan keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Berikut ini adalah beberapa elemen penting yang terkait dengan peran serta kepemimpinan strategis sebagai team leader, seorang team leader harus memiliki visi yang jelas tentang arah yang ingin dicapai timnya. Mereka perlu merumuskan rencana strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana ini harus mencakup tujuan jangka panjang, langkah-langkah yang dibutuhkan, serta sumber daya yang diperlukan. Selain itu kepemimpinan strategis melibatkan kemampuan dalam mengambil keputusan strategis yang berdampak besar pada tim dan organisasi secara keseluruhan. Keputusan ini harus didasarkan pada analisis data, pemahaman mendalam tentang lingkungan bisnis, dan evaluasi risiko.



Setelah merumuskan rencana strategis, seorang team leader perlu mengembangkan rencana aksi yang lebih rinci. Rencana ini harus membagi tugas, menetapkan tenggat waktu, dan menentukan bagaimana setiap anggota tim akan berkontribusi.

Tidak lupa salah satu elemen penting dalam kepemimpinan strategis adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Seorang team leader harus mampu menjelaskan visi, tujuan, dan rencana aksi kepada anggota timnya. Mereka juga harus mendengarkan dan memahami masukan dari tim serta mengkomunikasikan perkembangan dan perubahan strategis yang relevan. Seorang team leader harus mampu memotivasi dan memandu anggota tim untuk mencapai tujuan strategis. Ini bisa mencakup memberikan umpan balik positif, memberikan dukungan, serta mengatasi hambatan yang mungkin muncul dalam mencapai tujuan. Pengukuran Kinerja : Kepemimpinan strategis melibatkan pengukuran kinerja secara teratur untuk memastikan bahwa tim berada di jalur yang benar menuju tujuan strategis. Data kinerja membantu team leader untuk menilai kemajuan dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Hal utama team leader perlu memiliki kemampuan adaptasi dan inovasi. Mereka harus siap untuk merespons perubahan lingkungan bisnis dan mengeksplorasi cara-cara baru untuk mencapai tujuan strategis.

Dalam kepemimpinan strategis, etika dan integritas sangat penting. Seorang team leader harus bertindak dengan kejujuran dan mengambil keputusan yang mempertimbangkan dampaknya pada berbagai pemangku kepentingan. Kepemimpinan strategis sebagai seorang team leader membantu memastikan bahwa tim berfokus pada tujuan jangka panjang dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya. Dengan visi yang kuat, perencanaan strategis, dan kemampuan dalam memotivasi serta memandu tim, seorang leader dapat membantu organisasi mencapai keberhasilan jangka panjangnya. Pada jangka menengah dan jangka panjang peran kepemimpinan visioner dengan memanfaatkan digitalisasi sangat dibutuhkan dalam mendukung keberlanjutan Rehabilitasi berbasis digital bagi korban penyalahgunaan narkoba untuk menekan maupun memutus mata rantai peredaran narkoba di Indonesia khususnya di Kota Palembang.

D. Implementasi Strategis Marketing dan Desiminasi



Implementasi strategis pemasaran dan diseminasi adalah dua konsep penting dalam manajemen pemasaran dan berhubungan dengan cara perusahaan menerapkan strategi pemasaran dan cara mengkomunikasikan pesan pemasaran kepada pelanggan dan pemangku kepentingan.

Implementasi Strategis Pemasaran adalah langkah-langkah konkret diambil oleh perusahaan untuk menjalankan rencana pemasaran yang telah dirancang dalam kerangka strategi pemasaran. Ini melibatkan tindakan nyata dan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan pemasaran yang telah ditetapkan. Beberapa komponen implementasi strategis pemasaran meliputi Alokasi Sumber Daya penetapan anggaran dan sumber daya untuk berbagai inisiatif pemasaran, termasuk iklan, promosi, penjualan, dan pengembangan produk. Melakukan kampanye pemasaran yang mencakup iklan, promosi, pemasaran konten, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mencapai target audiens dan tujuan pemasaran. Manajemen Produk tentang bagaimana mengelola siklus hidup produk, termasuk perencanaan peluncuran produk baru, pembaruan produk, dan penghapusan produk yang tidak lagi relevan. Riset Pasar sangat dibutuhkan untuk memahami preferensi pelanggan, tren industri, dan kompetisi, serta menerapkan wawasan ini dalam strategi pemasaran.

Melakukan pengukuran dan pemantauan terhadap efektivitas kampanye dan aktivitas pemasaran untuk mengevaluasi apakah strategi pemasaran berjalan sesuai rencana. Diseminasi adalah proses menyebarkan informasi atau pesan kepada audiens yang dituju. Dalam konteks pemasaran, diseminasi melibatkan pengiriman pesan pemasaran kepada calon pelanggan, pelanggan potensial, atau pemangku kepentingan lainnya dengan cara yang efektif dan sesuai. Ini bisa melibatkan berbagai saluran

komunikasi seperti iklan, media sosial, publikasi, pemasaran konten, dan lain sebagainya. Beberapa komponen diseminasi pemasaran meliputi: Penentuan Target Audiens: Mengidentifikasi siapa yang menjadi target dari pesan pemasaran, berdasarkan karakteristik demografis, geografis, psikografis, dan perilaku.



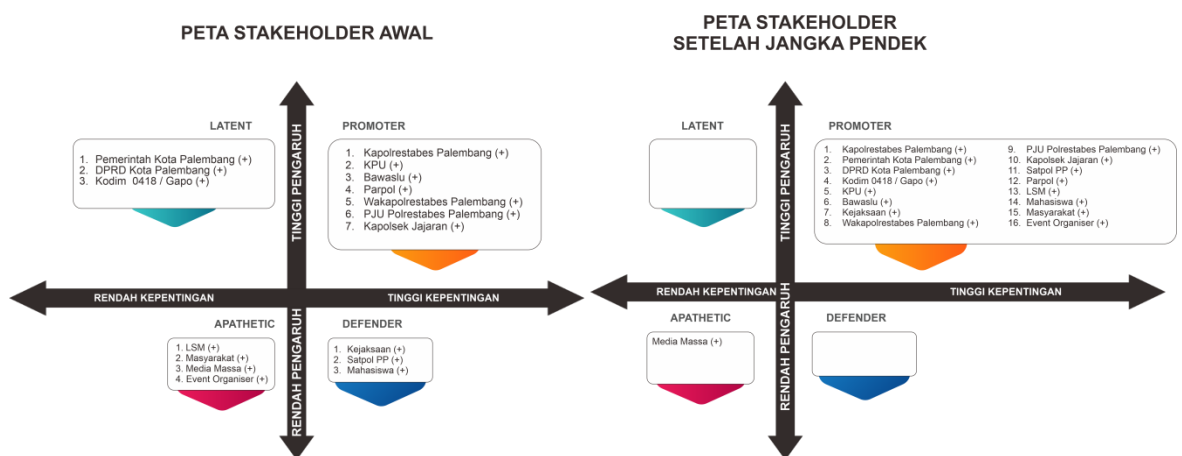
Selanjutnya Strategi Komunikasi merencanakan bagaimana pesan pemasaran akan disampaikan kepada target audiens, baik melalui saluran online maupun offline, dan dengan menggunakan berbagai bentuk media. Menciptakan pesan yang menarik, informatif, dan relevan bagi target audiens agar dapat mempengaruhi pemikiran dan tindakan mereka.

1. **Peta Stakeholders**


Implementasi strategis pemasaran (strategic marketing implementation) dan diseminasi adalah dua konsep penting dalam manajemen pemasaran dan berhubungan dengan cara perusahaan menerapkan strategi pemasaran dan cara mengkomunikasikan pesan pemasaran. Implementasi strategis pemasaran dan diseminasi memainkan peran kritical dalam manajemen pemasaran, terutama dalam konteks seperti penempatan personel pengamanan oleh Polrestabes Palembang dan stakeholder terkait. Bagaimana strategi pemasaran diterapkan (implementasi strategis) dan bagaimana pesan disampaikan (diseminasi) akan sangat mempengaruhi efektivitas program-program yang dijalankan. Pemetaan stakeholder dapat dilakukan dengan mengkategorikan mereka menjadi empat kelompok

berdasarkan tingkat kepentingan dan kekuatan pengaruhnya terhadap proyek atau inisiatif. Dalam konteks ini, kita bisa menggunakan model pemetaan stakeholder yang membedakan mereka menjadi Promoters, Latents, Defenders, dan Apathetics.

Memahami siapa Promoters, Latents, Defenders, dan Apathetics dalam konteks inisiatif atau proyek membantu dalam merancang strategi komunikasi dan interaksi yang paling efektif dengan masing-masing grup. Promoters dan Defenders adalah target utama untuk membangun dukungan kuat, sementara Latents adalah kelompok yang bisa diaktifkan jika dikelola dengan benar. Apathetics biasanya memerlukan sedikit perhatian kecuali jika dinamika berubah sehingga mereka berpindah ke salah satu dari tiga kategori lainnya.



Peta stakeholder merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai pemangku kepentingan dalam sebuah proyek atau inisiatif. Pergeseran dalam peta stakeholder dari kondisi awal ke kondisi setelah jangka pendek, dalam peta stakeholder awal, kelompok 'Promoter' yang memiliki kepentingan tinggi dan pengaruh tinggi termasuk Kapolrestabes Palembang dan beberapa lembaga pemerintah serta keamanan lainnya. Sementara itu, kelompok 'Apathetic' yang memiliki pengaruh rendah dan kepentingan rendah termasuk LSM, masyarakat umum, media massa, dan event organizer. Kelompok 'Defender' dengan kepentingan tinggi tetapi pengaruh rendah meliputi Kejaksaan, Satpol PP, dan mahasiswa.



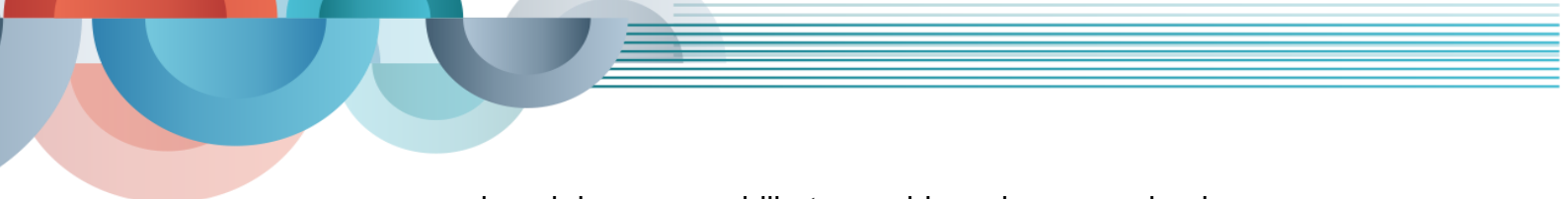
Setelah periode jangka pendek, terjadi pergeseran signifikan dalam peta stakeholder. Dalam kondisi ini, kelompok 'Promoter' bertambah anggotanya dengan masuknya masyarakat dan mahasiswa, menandakan peningkatan partisipasi dan keterlibatan mereka dalam inisiatif yang dijalankan. Di sisi lain, media massa tetap di Apathetic, hal ini menunjukkan kurangnya perhatian atau kepentingan mereka terhadap inisiatif tersebut.

Strategi komunikasi yang telah diterapkan termasuk dialog terbuka dengan stakeholder untuk memahami dan menanggapi kebutuhan dan harapan mereka. Peningkatan transparansi dan keterlibatan langsung, seperti forum publik, workshop, dan penggunaan media sosial, juga dapat memainkan peran penting dalam mengubah persepsi dan sikap stakeholder. Dengan menggunakan strategi komunikasi yang efektif dan memanfaatkan kekuatan serta peluang yang ada, sambil meminimalisir kelemahan dan mengantisipasi ancaman, peta stakeholder dapat terus berevolusi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi atau inisiatif secara keseluruhan.

2. **4P 1C (Product, Price, Promotion, Place dan customer)**

Strategi penempatan personel pengamanan berbasis digital, seperti melalui aplikasi website Antasena, dapat dikaitkan dengan konsep 4P dan 1C dalam konteks Harkamtibmas di kota Palembang sebagai berikut:

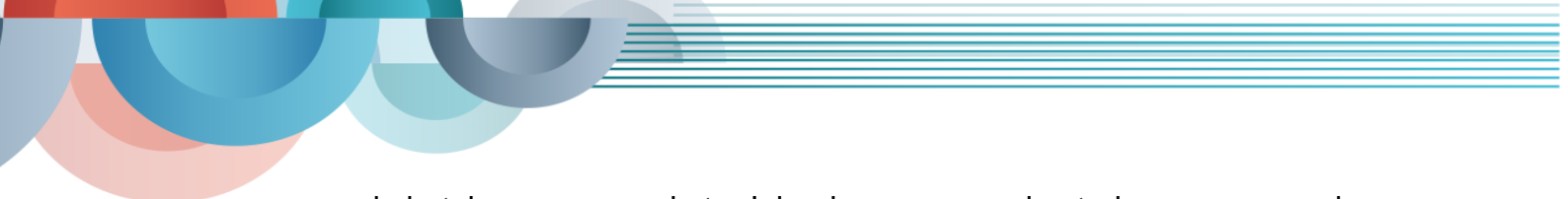
- a. **Product (Produk):** Dalam konteks ini, produk adalah layanan pengamanan berbasis digital yang ditawarkan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Aplikasi Antasena bisa menjadi alat bantu bagi masyarakat untuk melaporkan kejadian, meminta bantuan, atau mendapatkan informasi terkait keamanan. Layanan ini harus dirancang dengan fitur yang mudah digunakan, responsif, dan relevan dengan kebutuhan keamanan masyarakat Palembang.
- b. **Price (Harga):** Meskipun layanan keamanan berbasis digital ini mungkin disediakan oleh pemerintah atau otoritas keamanan



sebagai layanan publik tanpa biaya langsung bagi pengguna, konsep harga masih relevan dalam bentuk alokasi sumber daya dan pendanaan. Strategi 'harga' mungkin termasuk penentuan anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, serta investasi dalam teknologi dan pelatihan personel.

- c. **Promotion (Promosi):** Promosi untuk aplikasi Antasena bisa melibatkan kampanye kesadaran publik mengenai keberadaan dan kegunaan aplikasi. Ini bisa mencakup iklan di media sosial, acara komunitas, workshop, dan kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk menyebarkan informasi. Promosi bertujuan untuk mendorong adopsi aplikasi oleh masyarakat dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam menjaga Harkamtibmas.
- d. **Place (Tempat):** Dalam hal digital, 'tempat' bisa diartikan sebagai ketersediaan aplikasi melalui berbagai platform digital yang dapat diakses oleh masyarakat. Ini termasuk kehadiran aplikasi di berbagai toko aplikasi, website pemerintah, dan platform lainnya. Pastikan aplikasi mudah diunduh, diakses, dan digunakan oleh target demografi di Palembang.
- e. **Customer (Pelanggan):** Dalam kasus ini, 'pelanggan' adalah masyarakat Palembang yang membutuhkan keamanan dan ketertiban. Pendekatan berbasis pelanggan berarti memahami kebutuhan keamanan spesifik komunitas, merancang aplikasi yang user-friendly, dan memberikan layanan yang efisien dan efektif. Memastikan bahwa aplikasi tersebut dapat melayani berbagai lapisan masyarakat, dengan mempertimbangkan keragaman demografis dan kebutuhan khusus.

Menggabungkan prinsip 4P dan 1C dengan strategi penempatan personel pengamanan berbasis digital dapat membantu memastikan bahwa aplikasi tersebut dirancang, dipromosikan, dan diimplementasikan dengan cara yang menysar dan memenuhi



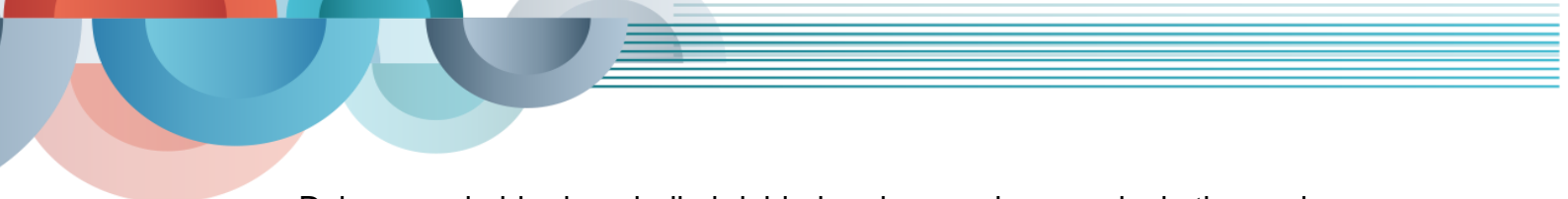
kebutuhan masyarakat. Ini akan memperkuat kepercayaan dan keterlibatan publik, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas kebijakan Harkamtibmas di Palembang.

E. Keberlanjutan Proyek Perubahan

Keberlanjutan dalam proyek perubahan adalah sebuah konsep vital yang menekankan pentingnya mempertahankan dan mengembangkan perubahan atau inisiatif yang telah diimplementasikan dalam organisasi, melewati fase awal pelaksanaannya. "Perubahan" di sini bisa melibatkan berbagai elemen, seperti modifikasi dalam proses bisnis, transformasi organisasional, pergeseran budaya, atau strategi baru yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja atau dampak positif jangka panjang. Keberlanjutan menjadi penting karena banyak proyek perubahan mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan jangka panjangnya akibat kurangnya integrasi dan pemeliharaan dalam operasional sehari-hari organisasi.

Untuk menjamin keberlanjutan, diperlukan perencanaan matang, komunikasi efektif, dan komitmen yang kuat dari seluruh pihak yang terlibat, termasuk dukungan dari mentor yang berpengalaman. Dukungan mentor ini adalah kunci untuk meminimalkan risiko, memaksimalkan peluang keberhasilan, dan memfasilitasi adaptasi yang lebih cepat dan efektif terhadap perubahan. Jaminan keberlanjutan dalam konteks Penempatan personel pengamanan berbasis digital dalam rangka Harkamtibmas di Kota Palembang akan lebih diperkuat dengan penerbitan peraturan oleh Kapolrestabes Palembang. Peraturan ini akan bertindak sebagai pedoman kerja yang membantu memastikan bahwa inovasi dan perubahan yang telah diimplementasikan tidak hanya efektif tetapi juga berkelanjutan. Ini akan membantu semua pihak yang terlibat untuk berada dalam satu halaman dan mempertahankan fokus pada tujuan jangka panjang dari proyek perubahan, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan dan dampak positifnya.

Dalam pelaksanaan dan keberlanjutan proyek penempatan personel pengamanan berbasis digital dalam rangka Harkamtibmas di Kota Palembang, dukungan dari berbagai stakeholders adalah elemen krusial.



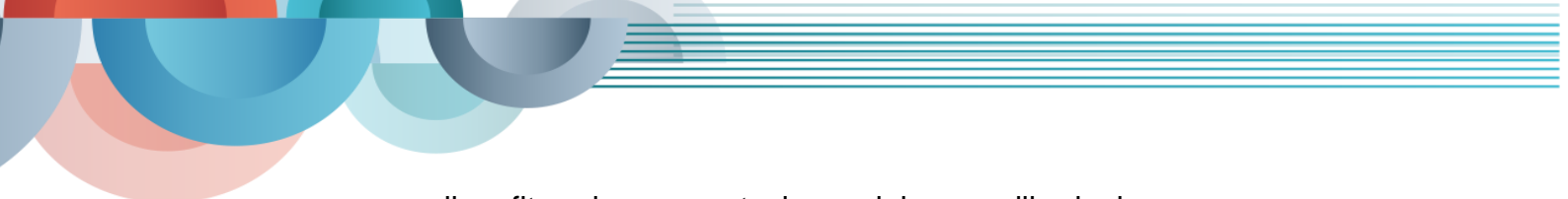
Dukungan dari berbagai pihak ini bukan hanya akan meningkatkan peluang keberhasilan proyek, tetapi juga memastikan bahwa inisiatif ini berkelanjutan, efektif, dan memberikan dampak positif yang diinginkan.

F. Monitoring dan evaluasi

Keberhasilan sebuah aplikasi website tidak hanya tergantung pada peluncurannya yang inovatif, tetapi juga pada pemeliharaan dan peningkatannya berkelanjutan. Dalam konteks ini, aplikasi website "Antasena" menjadi contoh yang menarik. Dengan implementasi strategis monitoring dan evaluasi, "Antasena" tidak hanya mencapai keunggulan operasional tetapi juga memastikan kepuasan stakeholder dan tim pengembang.

Menurut *Fred D. Davis* pada tahun 1989 dalam disertasinya di MIT Sloan School of Management menjelaskan Teori keberterimaan tentang suatu aplikasi, yang sering disebut sebagai Technology Acceptance Model (TAM), adalah model yang dirancang untuk memprediksi seberapa mungkin suatu teknologi akan diterima oleh pengguna. Bagi para stakeholder, Monitoring dan Evaluasi bukan sekadar alat, melainkan sebuah jembatan yang menghubungkan visi mereka dengan realitas operasional. Dengan Monitoring dan Evaluasi mendapatkan kejelasan yang tidak ternilai tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan website, memungkinkan mereka untuk mengarahkan sumber daya dan perhatian ke area paling membutuhkan. Data yang dikumpulkan membantu dalam mengidentifikasi tren, memperbaiki kekurangan, dan mengoptimalkan fitur untuk meningkatkan kualitas layanan. Risiko yang dihadapi, baik teknis maupun operasional, dapat diidentifikasi lebih awal, memungkinkan tindakan pencegahan yang efektif. Dalam hal ini, Monitoring dan Evaluasi menjadi fondasi bagi pengambilan keputusan yang berbasis data, menjamin investasi yang dilakukan tidak hanya aman tetapi juga menghasilkan.

Di sisi lain, tim pengembang mendapatkan manfaat yang sama pentingnya dari Monitoring dan Evaluasi. Melalui umpan balik dan insight yang terus-menerus, mereka dapat memprioritaskan tugas pengembangan,



menyesuaikan fitur, dan mengatasi masalah yang dihadapi pengguna secara real-time. Monitoring dan Evaluasi berfungsi sebagai kompas yang mengarahkan mereka dalam iterasi produk, memastikan bahwa setiap pembaruan tidak hanya memenuhi tetapi melebihi ekspektasi pengguna. Pengawasan kinerja yang konstan ini mengkristalisasi menjadi peningkatan efektivitas dan efisiensi, menjadikan "Antasena" sebuah produk yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan pasar.

Saling terkait, stakeholder dan tim pengembang menemukan nilai tambah melalui transparansi dan akuntabilitas ditingkatkan oleh Monitoring dan Evaluasi. Kolaborasi antara kedua pihak menjadi lebih terstruktur dan berorientasi tujuan, dengan data yang dikumpulkan berfungsi sebagai bahasa universal untuk memperjelas setiap diskusi dan keputusan. Selanjutnya, Monitoring dan Evaluasi memungkinkan pengukuran *Return on Investment* (ROI) secara akurat, membuktikan nilai aplikasi tidak hanya dalam istilah teknis tetapi juga dalam kontribusi ekonomi.

Secara keseluruhan, Monitoring dan Evaluasi dalam konteks "Antasena" berfungsi lebih dari sekedar alat untuk pemeliharaan website; ini adalah katalisator untuk inovasi, kerjasama, dan keberhasilan berkelanjutan. Dalam lingkungan yang cepat berubah, kemampuan untuk beradaptasi dan berkembang tidak hanya menjadi keunggulan tetapi juga kebutuhan. Di sinilah Monitoring dan Evaluasi berperan, mengubah tantangan menjadi peluang, dan memastikan bahwa "Antasena" tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang dalam lanskap digital yang kompetitif.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 24 Nopember 2023. Adapun kegiatan pada tahap ini sebagai berikut:


Untuk mengetahui kemanfaatan dan keberhasilan Proyek perubahan yang dilaksanakan, Project leader menyebarkan quisioner kepada masing-masing responden sebagai berikut:

1. Hasil quisioner pada stakeholder internal terhadap 37 responden Stakeholders dapat dilihat dari data berikut:

Tabel quisioner


NO	PERNYATAAN	SS	S	KS	STS	JML	SKOR MAX	%	HASIL
1	Penggunaan aplikasi ANTASENA mudah dipahami dan mudah digunakan	32	5	-	-	142	148	96%	SS
2	Aplikasi ANTASENA dapat diakses melalui HP,Laptop dan komputer	35	2	-	-	143	148	97%	SS
3	aplikasi ANTASENA mempermudah Stakeholders dalam melakukan penyimpanan administrasi pembelajaran secara digitalisasi	34	3	-	-	144	148	97%	SS
4	aplikasi ANTASENA dapat memberikan informasi data gadik secara update melalui data profil pada masing-masing akun Stakeholders	31	6	-	-	143	148	97%	SS
5	Aplikasi ANTASENA memberikan ruang kepada Stakeholders untuk berbagi informasi melalui sharing knowledge	34	3	-	-	141	148	95%	SS
6	aplikasi ANTASENA dapat memberikan infomasi dan laporan secara cepat dan mudah	33	4	-	-	141	148	95%	SS
7	aplikasi ANTASENA memberikan informasi secara transparan terkait hasil penilaian Stakeholders oleh siswa	31	6	-	-	143	148	95%	SS
8	aplikasi ANTASENA mempermudah Stakeholder dalam mengakses penempatan personel yang telah di upload Operator satker	28	4	-	-	143	148	97%	SS
9	aplikasi ANTASENA dapat digunakan pada saat penentuan Personel yang akan diperintahkan mengamankan berdasarkan tingkat kerawanan	29	8	-	-	140	148	95%	SS
10	aplikasi ANTASENA memberikan manfaat bagi Stakeholder dan Personel dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya	31	6	-	-	143	148	97%	SS
	TOTAL	282	36	-	-	1423	1480	96%	SS

Berdasarkan data survei penggunaan aplikasi ANTASENA, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini sangat dihargai oleh para penggunanya. Secara umum, aplikasi ini mencapai tingkat kepuasan yang tinggi dengan skor keseluruhan sebesar 96%. Aspek-aspek utama yang menonjol dari aplikasi ANTASENA adalah kemudahan



penggunaannya, ketersediaannya di berbagai perangkat seperti HP, laptop, dan komputer, serta efektivitasnya dalam mempermudah penyimpanan administrasi secara digital. Selain itu, aplikasi ini juga dipuji karena memberikan informasi yang up-to-date, mendukung berbagi pengetahuan, dan menyediakan informasi secara transparan. Secara keseluruhan, aplikasi ANTASENA diterima baik sebagai alat yang memudahkan tugas dan fungsi stakeholder, dengan menawarkan solusi efisien dan efektif dalam pengelolaan administrasi dan informasi. Pertama dan terutama, aplikasi ANTASENA dikenal karena kemudahannya dalam penggunaan, di mana 32 responden menilai penggunaannya mudah dipahami dan 5 responden setuju. Hal ini menunjukkan desain antarmuka pengguna yang intuitif, yang memudahkan pengguna dari berbagai latar belakang untuk berinteraksi dengan aplikasi ini. Skor efektivitas ini mencapai 96%, menegaskan kualitas pengalaman pengguna yang tinggi. Kemudian, adaptabilitas aplikasi ini dengan berbagai perangkat seperti HP, laptop, dan komputer mendapat apresiasi tinggi, dengan 35 responden menyatakan kepuasannya, memberikan skor 97%. Kemampuan ini memperluas jangkauan penggunaan aplikasi dan memudahkan akses informasi di berbagai situasi dan lokasi.

Dalam konteks administrasi digital, ANTASENA dinilai mempermudah proses penyimpanan administrasi pembelajaran, dengan 34 responden memberikan penilaian positif. Ini menunjukkan efektivitas aplikasi dalam mengelola data dan proses administratif secara digital, memberikan skor 97%. Lebih lanjut, aplikasi ini juga mendapatkan pujian dalam hal penyediaan informasi yang terupdate melalui data profil pada masing-masing akun stakeholder. Dengan 31 responden yang sangat puas, aplikasi ini dinilai berhasil dalam menyajikan informasi yang relevan dan terkini, lagi-lagi mencapai skor 97%. Selain itu ANTASENA memberikan platform yang efektif bagi stakeholder untuk berbagi informasi, di mana 34 responden merasa sangat puas. Ini menunjukkan peran penting aplikasi dalam mendukung kolaborasi dan berbagi pengetahuan, dengan skor 95%. Fitur aplikasi dalam



memberikan informasi dan laporan yang cepat dan mudah juga mendapat respons positif, dengan 33 responden menyatakan kepuasannya. Hal ini menunjukkan efisiensi aplikasi dalam menyampaikan informasi penting, memberikan skor 95%.


Dari sudut transparansi, ANTASENA dinilai memberikan informasi yang jelas mengenai penilaian stakeholder oleh siswa, dengan 31 responden sangat puas, mencapai skor 95%. Dalam hal penempatan personel, aplikasi ini membantu stakeholder dalam mengakses informasi penempatan dengan mudah, mendapatkan penilaian positif dari 28 responden dan skor 97%.

Fitur aplikasi dalam penentuan personel untuk mengamankan area berdasarkan tingkat kerawanan juga mendapat apresiasi, dengan 29 responden menyatakan kepuasannya, menghasilkan skor 95%.

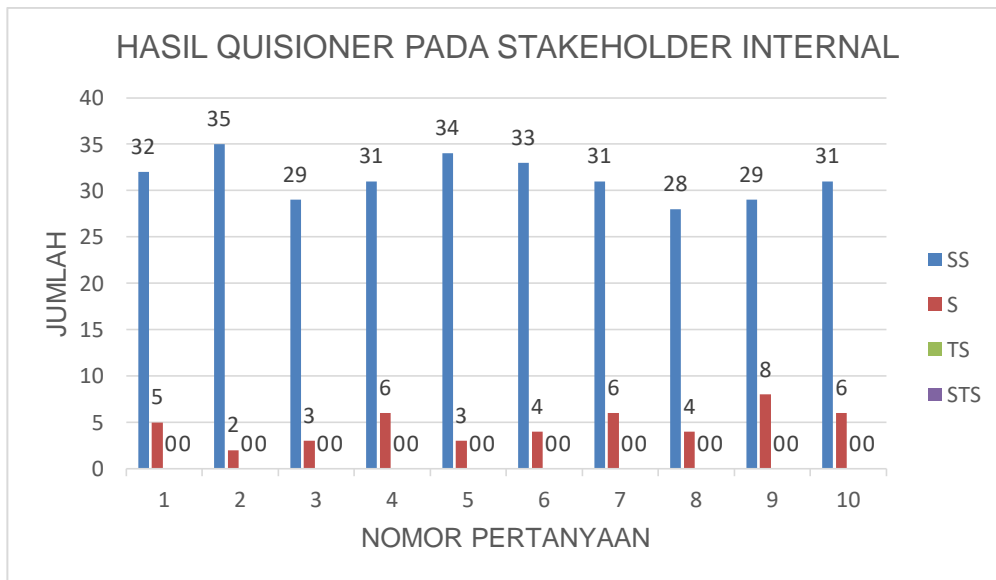
Keseluruhan, survei ini menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi terhadap aplikasi ANTASENA, dengan nilai total 96%. Aplikasi ini telah terbukti sebagai alat yang penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kolaborasi di antara para stakeholder, menandai langkah maju yang signifikan dalam pengelolaan informasi dan administrasi digital.

Manfaat yang dirasakan oleh stakeholder dari penggunaan aplikasi ANTASENA cukup beragam dan signifikan, mencakup aspek efisiensi, kemudahan akses, dan peningkatan kolaborasi. Berikut adalah ringkasan dari manfaat tersebut:

- a. Efisiensi dalam Administrasi: ANTASENA memudahkan proses administrasi, terutama dalam hal penyimpanan dan pengelolaan data secara digital. Ini mengurangi beban kerja manual dan meningkatkan kecepatan serta akurasi dalam pengelolaan informasi.
- b. Aksesibilitas Multi-Platform: Dengan kemampuannya untuk diakses melalui berbagai perangkat seperti HP, laptop, dan komputer, aplikasi ini memastikan bahwa stakeholder dapat mengakses informasi penting dari mana saja dan kapan saja, meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas kerja.

- 
- c. Informasi Terupdate: ANTASENA menyediakan data terkini melalui profil pengguna, memastikan bahwa stakeholder selalu memiliki akses ke informasi terbaru. Ini sangat penting untuk pengambilan keputusan yang cepat dan efektif.
 - d. Transparansi Informasi: Aplikasi ini menawarkan transparansi dalam penyajian informasi, termasuk hasil penilaian, yang penting untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan dalam setiap proses.
 - e. Fasilitas Berbagi Pengetahuan: ANTASENA memberikan platform untuk berbagi informasi, memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar stakeholder, yang dapat meningkatkan inovasi dan pembelajaran bersama.
 - f. Manajemen Personel yang Efektif: Dalam hal penempatan dan pengelolaan personel, aplikasi ini mempermudah stakeholder dalam mengakses informasi terkait, memastikan penempatan yang efektif berdasarkan kebutuhan dan kapasitas.
 - g. Kemudahan dalam Melaporkan dan Mendapatkan Informasi: ANTASENA memungkinkan penyampaian informasi dan laporan secara cepat dan mudah, yang sangat berguna dalam situasi yang memerlukan respon cepat dan tepat.
 - h. Manfaat Fungsional Luas: Secara umum, aplikasi ini memberikan manfaat yang luas bagi stakeholder dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mereka, meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja.
- Dengan demikian, ANTASENA terbukti menjadi alat yang berharga bagi stakeholder, memberikan solusi yang efisien dan efektif untuk berbagai tantangan dalam pengelolaan informasi dan administrasi.

Grafik capaian hasil quisioner



Berdasarkan grafik capaian hasil kuesioner yang ditampilkan, dapat dianalisis bahwa respons stakeholder internal terhadap aplikasi ANTASENA sangat positif. Ini tercermin dari jumlah responden yang "Sangat Setuju" (SS) dan "Setuju" (S) untuk setiap pernyataan yang dievaluasi.

Berikut adalah beberapa poin analisis dari data tersebut:

- Tingkat Kesepakatan Tinggi:** Untuk hampir semua pernyataan, mayoritas stakeholder memberikan respon "Sangat Setuju", yang menandakan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap aspek-aspek yang ditanyakan dalam kuesioner. Pernyataan 1 dan 2, yang berkaitan dengan kemudahan penggunaan aplikasi dan aksesibilitasnya melalui berbagai perangkat, mencatat jumlah terbanyak untuk kategori "Sangat Setuju".
- Konsistensi Respon Positif:** Konsistensi dalam respon "Sangat Setuju" melintasi semua pernyataan mengindikasikan bahwa aplikasi ANTASENA secara keseluruhan diterima dengan baik oleh stakeholder internal.
- Tidak Ada Ketidaksetujuan:** Tidak adanya respon "Tidak Setuju" (TS) atau "Sangat Tidak Setuju" (STS) untuk semua pernyataan

menunjukkan bahwa tidak ada aspek negatif yang signifikan dari aplikasi yang dirasakan oleh responden.

- d. **Area untuk Peningkatan:** Walaupun respon positif mendominasi, terdapat pernyataan tertentu (seperti nomor 9) di mana jumlah "Setuju" lebih tinggi dibandingkan "Sangat Setuju". Ini bisa menunjukkan area yang mungkin memerlukan perhatian lebih atau peningkatan dalam aplikasi.
- e. **Skor Keseluruhan:** Skor keseluruhan yang tinggi (96%) menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat baik dari stakeholder internal terhadap aplikasi ANTASENA. Namun, masih ada ruang untuk mencapai kepuasan penuh (100%).
- f. **Prioritas Pengembangan:** Data ini dapat digunakan untuk menentukan area mana yang perlu diprioritaskan untuk pengembangan lebih lanjut. Misalnya, pernyataan dengan skor "Sangat Setuju" yang lebih rendah bisa menjadi fokus untuk ditingkatkan.

Secara keseluruhan, hasil kuesioner menegaskan bahwa aplikasi ANTASENA telah berhasil memenuhi dan kemungkinan melampaui ekspektasi stakeholder internal dalam banyak aspek. Analisis ini penting untuk panduan strategis dalam pengembangan aplikasi lebih lanjut.

.2. Hasil kuisoner pada Eksternal

Melalui lensa kuesioner eksternal, organisasi dapat menangkap suara dari pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya, yang menjadi nadi kehidupan setiap proyek perubahan. Kuesioner ini bukan sekadar mengumpulkan data, melainkan menyediakan peta jalan yang jelas mengenai harapan pasar dan reaksi terhadap inovasi yang diusulkan. Setiap tanggapan yang terkumpul menjadi bagian dari kolase yang lebih besar, membantu untuk memvalidasi atau menyesuaikan asumsi yang telah dibuat oleh para perancang perubahan.

Hasil quisioner pada stakeholder eksternal sebanyak 47 responden dapat dilihat dari data berikut:

NO	PERNYATAAN	SS	S	KS	STS	JML	SKOR MAX	%	HASIL
1	menurut saudara Aplikasi ANTASENA mudah diakses	43	3	-	-	181	184	98%	SS
2	Menurut saudara fitur ANTASENA pada stakeholder sudah sesuai dengan kebutuhan	42	4	-	-	179	184	97%	SS
3	Menurut saudara fitur ANTASENA dapat dipahami stakeholders	44	2	-	-	182	184	99%	SS
4	Menurut saudara aplikasi ANTASENA mudah digunakan	44	2	-	-	181	184	98%	SS
5	menurut saudara fitur ANTASENA pada akun stakeholder perlu ditambah	29	17	-	-	155	184	84%	SS
6	menurut saudara aplikasi ANTASENA perlu adanya pengembangan	29	16	1	-	164	184	89%	SS
7	menurut saudara penempatan personel melalui ANTASENA lebih efektif	38	7	1	-	175	184	95%	SS
8	menurut saudara aplikasi ANTASENA pada Stakeholder memberikan informasi penempatan personel	36	10	-	-	171	184	93%	SS
9	menurut saudara pada akun Stakeholder ANTASENA memberikan informasi riwayat penempatan personel sehingga menghindari duplikasi	42	4	-	-	182	184	99%	SS
10	menurut saudara Berita yang terdapat pada aplikasi ANTASENA memberikan informasi bermanfaat untuk Stakeholder	43	3	-	-	180	184	98%	SS
	TOTAL	390	68	-	-	1750	1840	95%	SS

Dari data tersebut didapatkan bahwa 95% Stakeholder eksternal sangat setuju dengan any aksi perubahan berupa Sistem pengelolaan Informasi Gadik (ANTASENA) pada Pusdikmin Lemdiklat Polri karena

mudah diakses dan memberi manfaat terhadap peningkatan pelayanan kepada peserta didik

1) Hasil quisioner pada tim efektif

hasil aksi perubahan berdasarkan monitoring dan evaluasi melalui quisioner pada tim efektif sejumlah 8 responden dapat dilihat dari data berikut:


No	Pertanyaan	sangat Mudah	Mudah	Tidak Mudah	cukup mudah	JML	SKOR	%	HASIL
1	menurut saudara apakah Aplikasi ANTASENA mudah dioperasikan/digunakan	7	1	-	-	30	32	94 %	SM
2	Menurut saudara apakah proses pengolahan data pada ANTASENA mudah	7	1	-	-	31	32	97 %	SM
3	menurut saudara apakah penggunaan fitur pada aplikasi ANTASENA mudah dipahami	7	1	-	-	31	32	97 %	SM
4	aplikasi ANTASENA memudahkan pencatatan dan penyimpanan data secara aman dan mudah pada saat dibutuhkan	8	-	-	-	32	32	100 %	SS
5	aplikasi ANTASENA memudahkan monitoring administrasi dan kinerja Personel	8	-	-	-	32	32	100 %	SS
6	ANTASENA memudahkan Operator dalam pelaksanaan administrasi pada satuan kerja	5	3	-	-	29	32	91 %	SS
7	Menurut saudara apakah ANTASENA dapat meningkatkan kinerja Personel dalam pengamanan di kota Palembang	7	1	-	-	32	32	100 %	SS
8	menurut saudara apakah fitur aplikasi ANTASENA perlu ditambah/dikembangkan	7	1	-	-	31	32	97 %	SP
9	Menurut saudara	8	-	-	-	32	32	100	SS

No	Pertanyaan	sangat Mudah	Mudah	Tidak Mudah	cukup mudah	JML	SKOR	%	HASIL
	apakah fitur ANTASENA sudah sesuai dengan kebutuhan pengelolaan administrasi Penempatan personel Pengamanan							%	
	Jumlah	64	8	-	-	279		100%	

Berdasarkan data yang disajikan, aplikasi ANTASENA telah menunjukkan performa yang luar biasa dalam mempermudah operasional dan administrasi personel. Dengan tingkat persetujuan yang tinggi dari para responden, aplikasi ini telah mendapatkan pengakuan yang kuat dalam aspek kemudahan pengoperasian, pemahaman fitur, dan pengelolaan data. Secara keseluruhan, aplikasi ANTASENA dipersepsikan sebagai sangat mudah dioperasikan, dengan 7 dari 8 responden memberikan penilaian tertinggi dan hanya satu responden yang menilai sebagai mudah, menghasilkan skor kepuasan 94%. Hal ini menunjukkan bahwa antarmuka pengguna dan fungsionalitas aplikasi sangat sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Dalam hal proses pengolahan data, aplikasi ini dinilai hampir sempurna, dengan 97% responden menyatakan bahwa pengolahannya mudah, yang mencerminkan desain sistem yang intuitif dan efisiensi dalam pemrosesan data. Fitur aplikasi ANTASENA juga dinilai mudah dipahami, dengan skor yang sama tingginya, menunjukkan bahwa pengguna dapat dengan cepat memanfaatkan potensi penuh dari aplikasi tanpa hambatan signifikan.

Menonjol dalam survei adalah penilaian untuk pencatatan dan penyimpanan data serta untuk monitoring administrasi dan kinerja personel, yang keduanya mendapat skor sempurna, 100%. Ini menunjukkan bahwa ANTASENA telah menjadi alat yang sangat berharga dalam mengamankan dan mengakses data serta dalam mengawasi kinerja personel secara efisien. Satu area yang menarik adalah bahwa walaupun aplikasi tersebut sangat dihargai, masih ada



permintaan untuk perkembangan lebih lanjut, dengan 97% responden menyarankan penambahan atau pengembangan fitur lebih lanjut, yang menunjukkan ruang untuk inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan.

Dengan demikian aplikasi ANTASENA dianggap sebagai platform yang sangat efektif dan efisien yang mendukung operasi administratif dan kinerja personel. Respon yang positif dan permintaan untuk pengembangan lebih lanjut menandakan adanya peluang untuk terus meningkatkan dan memperkaya aplikasi ini agar lebih menyelaraskan dengan kebutuhan pengguna yang berkembang.

G. Mata Pelatihan Pilihan Mendukung Proyek Perubahan

Hubungan antara proyek perubahan strategi Penempatan Personel Pengamanan berbasis digital dalam rangka Harkamtibmas di kota Palembang, Mata Pelatihan Pilihan dalam Rancangan Proyek Perubahan ini adalah Merumuskan Kebijakan Publik Menggunakan Big Data Analysis kemudian di dukung dengan Menguasai Seni Berkomunikasi dalam Hubungan Kerja dan Mengaktifkan Transformasi Digital pada Sektor Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan Kebijakan Publik Menggunakan Big Data Analysis:

Merumuskan kebijakan publik menggunakan analisis big data merupakan pendekatan inovatif yang mengubah cara pemerintah dan pembuat kebijakan memahami dan menangani isu-isu sosial, ekonomi, dan keamanan. Pendekatan ini mengandalkan kekuatan data besar (big data) untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dan akurat mengenai berbagai aspek kehidupan masyarakat.



Dalam konteks urban yang kompleks seperti kota Palembang, kebijakan publik yang efektif memerlukan pemahaman yang komprehensif tentang berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan berkembangnya teknologi digital, terkumpulnya data dalam jumlah besar dari berbagai sumber seperti media sosial, sensor kota, transaksi ekonomi, dan catatan pemerintahan. Analisis big data memungkinkan pengolahan data ini untuk mengekstrak pola, tren, dan hubungan yang tidak tampak pada pandangan pertama.

a. Proses Analisis Big Data dalam Pembuatan Kebijakan:

- 1) **Pengumpulan Data:** Mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik terstruktur maupun tidak terstruktur.
- 2) **Pengolahan dan Analisis Data:** Menggunakan algoritma canggih dan teknik analitik untuk memproses dan menganalisis data besar.
- 3) **Ekstraksi Wawasan:** Mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan yang relevan dari data untuk mendapatkan wawasan.

- 4) **Formulasi Kebijakan:** Menerjemahkan wawasan tersebut menjadi kebijakan yang tepat sasaran, efisien, dan efektif.

b. Manfaat Merumuskan Kebijakan dengan Big Data:

- 1) **Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti:** Membantu pembuat kebijakan membuat keputusan yang lebih informatif dan berbasis bukti nyata.
- 2) **Responsivitas:** Memungkinkan pemerintah untuk lebih responsif terhadap perubahan dinamika sosial dan ekonomi.
- 3) **Efisiensi Sumber Daya:** Mengoptimalkan alokasi sumber daya dengan lebih akurat menargetkan area yang membutuhkan intervensi.
- 4) **Prediksi dan Pencegahan:** Memungkinkan identifikasi dini tren atau masalah yang mungkin muncul, sehingga memungkinkan tindakan preventif.
- 5) **Implementasi dalam Konteks Harkamtibmas di Palembang:** Dalam konteks Harkamtibmas, analisis big data dapat digunakan untuk mengidentifikasi area dengan tingkat kriminalitas tinggi, memahami pola kejahatan, dan merumuskan strategi pengamanan yang lebih efektif. Data dari laporan kepolisian, media sosial, dan sumber lain dapat dianalisis untuk memahami faktor pendorong kriminalitas dan meresponsnya dengan kebijakan yang tepat, seperti penempatan personel keamanan, program pencegahan kejahatan, dan inisiatif pembangunan sosial.


Merumuskan kebijakan publik menggunakan analisis big data membuka jalan untuk pembuatan kebijakan yang lebih adaptif, cerdas, dan berorientasi pada masa depan. Di kota Palembang, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan publik tetapi juga mendukung penciptaan lingkungan yang aman, sejahtera, dan inklusif bagi semua warganya.

2. Menguasai Seni Berkomunikasi dalam Hubungan Kerja:

Komunikasi efektif adalah kunci penting dalam kesuksesan proyek, terutama dalam proyek yang melibatkan pengamanan berbasis digital. Hal ini tidak hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang membangun hubungan kerja yang baik antara berbagai pihak, termasuk aparat keamanan, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Berikut adalah bagaimana mata kuliah dalam seni berkomunikasi dapat berperan penting dalam membantu project leader dalam proyek ini:



- a. **Teori Komunikasi dalam Manajemen Proyek:** Teori komunikasi seperti Model Komunikasi *Shannon-Weaver* yang menjelaskan tentang pengirim, pesan, dan penerima, dapat diterapkan untuk memastikan bahwa pesan disampaikan secara efektif. Dalam konteks proyek pengamanan digital, penting untuk memastikan bahwa informasi teknis disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh semua pihak.
- b. **Keterampilan Mendengarkan Aktif:** Mata kuliah ini akan mengajarkan pentingnya mendengarkan aktif. Dalam manajemen proyek, mendengarkan tidak hanya berarti memahami kata-kata yang diucapkan, tetapi juga memahami konteks dan kebutuhan pemangku kepentingan. Ini sangat penting dalam proyek



pengamanan digital, di mana kebutuhan dan kekhawatiran keamanan dari berbagai pihak mungkin berbeda.

- a) **Negosiasi dan Penyelesaian Konflik:** Kemampuan untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik adalah keterampilan kunci dalam proyek perubahan. Proyek pengamanan digital sering kali melibatkan keputusan yang dapat menimbulkan ketidaksepakatan atau konflik. Memahami teori dan praktik negosiasi akan membantu dalam mencapai konsensus dan mempertahankan hubungan kerja yang harmonis.
- b) **Keterampilan Presentasi dan Persuasi:** Dalam mengelola proyek perubahan, project leader seringkali perlu mempresentasikan ide dan mengajak orang lain untuk mendukung inisiatif tersebut. Melalui pelatihan dalam keterampilan presentasi dan persuasi, project leader dapat lebih efektif dalam menyampaikan visi proyek dan meyakinkan stakeholder tentang manfaatnya.
- c) **Komunikasi Lintas Budaya:** Dalam proyek yang melibatkan berbagai pihak dari latar belakang yang berbeda, memahami komunikasi lintas budaya sangat penting. Ini membantu dalam memastikan bahwa pesan tidak hanya disampaikan, tetapi juga diterima dan dipahami dengan benar oleh semua pihak.
- d) **Pemanfaatan Teknologi dalam Komunikasi:** Dalam era digital, memanfaatkan teknologi komunikasi seperti media sosial, aplikasi kolaborasi, dan platform virtual untuk komunikasi proyek adalah penting. Memahami cara terbaik untuk menggunakan alat-alat ini dapat meningkatkan efisiensi dan jangkauan komunikasi.


Melalui pengembangan keterampilan komunikasi ini, project leader akan lebih mampu untuk mengelola hubungan kerja, memahami dan memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan, serta efektif dalam menyampaikan pesan dan visi proyek. Kompetensi ini tidak hanya meningkatkan peluang keberhasilan proyek perubahan berbasis digital, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk kerjasama yang produktif dan berkelanjutan.

3. Mengaktifkan Transformasi Digital pada Sektor Pemerintahan:

Mengaktifkan Transformasi Digital dalam Strategi Penempatan Personel Pengamanan Berbasis Digital untuk Harkamtibmas di Kota Palembang. Dalam upaya meningkatkan Harkamtibmas (Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) di Kota Palembang, penerapan transformasi digital dalam strategi penempatan personel pengamanan memegang peranan krusial. Transformasi digital ini melibatkan penggunaan teknologi canggih dalam pemantauan dan alokasi sumber daya keamanan, serta memastikan respons cepat dan efektif terhadap situasi keamanan. Sistem Pengawasan Digital dan Analisis Data: Penerapan sistem CCTV canggih dan teknologi pengawasan lainnya yang terintegrasi dengan pusat data keamanan. Melalui analisis data dari sistem ini, polisi dapat mengidentifikasi area-area kritis yang memerlukan peningkatan keamanan dan memantau situasi di lapangan secara *real-time*.



Penggunaan Aplikasi Mobile untuk Patroli: Pengembangan aplikasi mobile yang memungkinkan personel keamanan untuk melaporkan kejadian, berbagi informasi, dan menerima instruksi secara cepat. Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk memantau lokasi personel secara real-time, memastikan distribusi sumber daya yang efisien.



Pelatihan Digital untuk Personel Keamanan: Menyediakan pelatihan digital bagi personel keamanan untuk meningkatkan keterampilan dalam menggunakan teknologi pengamanan baru. Pelatihan ini meliputi pengoperasian perangkat keras dan lunak keamanan, analisis data, serta respons taktis dalam situasi darurat. Mengintegrasikan sistem keamanan dengan platform informasi publik sehingga masyarakat dapat terlibat langsung dalam upaya pemeliharaan keamanan. Misalnya, melalui aplikasi yang memungkinkan masyarakat melaporkan kejadian keamanan atau mendapatkan informasi tentang situasi keamanan di lingkungan mereka. Memanfaatkan teknologi analisis prediktif untuk mengidentifikasi pola-pola kejahatan dan merencanakan penempatan personel keamanan secara strategis. Hal ini membantu dalam pencegahan kejahatan dengan cara yang lebih proaktif.

Membangun kerjasama dengan stakeholder lain seperti pemerintah lokal, komunitas, dan sektor swasta untuk mengembangkan solusi keamanan berbasis digital yang komprehensif. Ini termasuk berbagi data dan sumber daya untuk memperkuat upaya keamanan secara keseluruhan. Melakukan kontrol dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas sistem keamanan digital dan strategi penempatan personel. Hal ini penting untuk memastikan bahwa strategi tersebut selalu relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan keamanan yang berubah-ubah.

Dengan menerapkan transformasi digital dalam strategi penempatan personel pengamanan, Kota Palembang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Teknologi digital memberikan kemampuan untuk merespons lebih cepat terhadap situasi darurat, mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik, dan meningkatkan kolaborasi antara aparat keamanan dan masyarakat. Ini merupakan langkah penting dalam memastikan keamanan dan ketenangan warga di Palembang.

H. Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi SDM dalam Proyek Perubahan

Adopsi sebuah inovasi atau perubahan memiliki konsekuensi munculnya kebutuhan kompetensi baru yang harus dikuasai siapapun yang terdampak atas inovasi tersebut. Pada bagian ini dijelaskan kebutuhan pengembangan kompetensi bagi pegawai pada unit kerja dimana perubahan dilakukan atau stakeholder yang terdampak atas proyek perubahan peserta pelatihan.

Pemberdayaan organisasi pembelajaran dalam pelaksanaan strategi pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) memiliki peran yang sangat krusial dalam konteks proyek perubahan, terutama dalam bidang rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Fokus utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendorong pertumbuhan dan adaptasi, baik pada tingkat individu maupun organisasi. Dalam setting rehabilitasi, ini berarti tidak hanya meningkatkan kompetensi profesional petugas medis dan konselor, tetapi juga memfasilitasi perubahan budaya dan proses kerja yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan pasien.

Dalam proyek perubahan seperti ini, penerapan strategi pengembangan kompetensi SDM dimulai dengan identifikasi kebutuhan pelatihan yang paling mendesak misalnya, pelatihan dalam metode terapi baru, pendekatan psikososial, atau teknologi terkait. Selanjutnya, sebuah kurikulum pelatihan yang komprehensif dikembangkan, seringkali melibatkan pakar dari berbagai disiplin ilmu. Organisasi pembelajaran memastikan bahwa pengetahuan ini tidak hanya diterapkan tetapi juga dibagikan dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, petugas rehabilitasi dilengkapi dengan alat dan metode terbaru, memungkinkan mereka untuk merespons lebih efektif terhadap beragam tantangan yang mereka hadapi, mulai dari kecanduan fisik hingga masalah kesehatan mental yang berkomplikasi.

Keberhasilan strategi ini juga bergantung pada kemampuan organisasi untuk belajar dari keberhasilan dan kegagalan. Ini termasuk memonitor hasil pasien dan menyesuaikan pendekatan berdasarkan bukti empiris.

Organisasi yang berfokus pada pembelajaran akan lebih gesit dalam mengadaptasi perubahan dan lebih efektif dalam mengimplementasikan inovasi. Evaluasi berkelanjutan dan reviu sistematis dari data pasien memungkinkan tim untuk memahami dampak dari metode atau teknologi baru, dan untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Secara keseluruhan, pemberdayaan organisasi pembelajaran dalam strategi pengembangan kompetensi SDM adalah sebuah pendekatan holistik yang memfasilitasi perubahan yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Ini tidak hanya meningkatkan kapabilitas individu tetapi juga memperkuat seluruh sistem rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Ini menciptakan siklus umpan balik positif di mana peningkatan kompetensi SDM mengarah pada perawatan yang lebih efektif, yang selanjutnya memotivasi tim untuk terus belajar dan beradaptasi, sehingga membentuk fondasi yang kokoh untuk proyek perubahan yang berkelanjutan dan sukses.

Identifikasi dan penjelasan ini disertai dengan strategi untuk meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan tersebut. Rencana strategi pengembangan kompetensi untuk adopsi proyek perubahan paling tidak memuat siapa pihak yang terdampak proyek perubahan, kompetensi baru apa saja yang dibutuhkan, dan bagaimana cara (strategi) pengembangannya. Poin-poin tersebut dapat dirangkum ke dalam tabel seperti berikut:

Tabel 11
Strategi Pengembangan Kompetensi

Pihak Terdampak	Perubahan Kompetensi yang dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi (Klasikal/Non Klasikal)	Hasil
Aparat Kepolisian di Polrestabes Palembang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan Integrasi Data Digital 2. Kemampuan Analisis Data 3. Kemampuan Komunikasi dan Kolaborasi. 4. Kemampuan Keamanan Cyber 	<p>Secara klasikal : Pelatihan Klasikal</p> <p>Non Klasikal :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Workshop dan Pelatihan On-the-Job b. Kerjasama dan Kolaborasi dengan Bidang IT c. Memanfaatkan sumber daya online 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kemampuan Integrasi Data Digital: Peserta akan mampu menggabungkan berbagai sumber data digital ke dalam sistem yang terpadu, memudahkan analisis dan pengambilan keputusan. b. Kemampuan Analisis Data: Peserta akan memiliki keterampilan untuk menganalisis data secara

Pihak Terdampak	Perubahan Kompetensi yang dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi (Klasikal/Non Klasikal)	Hasil
		<p>seperti kursus daring, webinar, dan materi pelatihan Digital untuk terus meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang teknologi informasi</p>	<p>efektif, mengidentifikasi tren dan pola yang relevan untuk keamanan publik.</p> <p>c. Kemampuan Komunikasi dan Kolaborasi: Peserta akan menunjukkan peningkatan dalam bekerja secara sinergis dengan unit lain dan stakeholders, serta berkomunikasi dengan jelas dan efektif.</p> <p>d. Kemampuan Keamanan Cyber: Peserta akan memahami dan dapat menerapkan praktik-praktik keamanan cyber untuk melindungi data dan infrastruktur TI.</p>
Stakeholders Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman tentang Integrasi Informasi Berbasis Digital. 2. Kemampuan Mengelola Data Digital 3. Kemampuan Berkomunikasi dan Berkolaborasi 	<p>Secara klasikal :</p> <p>Pelatihan formal atau seminar dapat diselenggarakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang integrasi informasi berbasis Digital dan manfaatnya.</p> <p>Non Klasikal :</p> <p>a. Aktif berkolaborasi dengan pihak terkait dalam proyek perubahan</p> <p>b. Memanfaatkan sumber daya online seperti artikel, tutorial, dan materi pelatihan yang tersedia di internet untuk memperdalam pemahaman mereka tentang teknologi informasi.</p>	<p>a. Pemahaman tentang Integrasi Informasi Berbasis Digital: Stakeholders eksternal akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana data dan informasi digital dapat diintegrasikan untuk mendukung keputusan keamanan.</p> <p>b. Kemampuan Mengelola Data Digital: Stakeholders akan mengembangkan kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan data digital dalam mendukung kegiatan mereka.</p> <p>c. Kemampuan Berkomunikasi dan Berkolaborasi: Peningkatan dalam berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam proyek perubahan, serta kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas tentang kebutuhan dan hasil yang diharapkan.</p>

Pihak Terdampak	Perubahan Kompetensi yang dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi (Klasikal/Non Klasikal)	Hasil
Tim Efektif	Kemampuan manajemen proyek, keterampilan kepemimpinan, kolaborasi tim dan pemahaman tentang proyek perubahan	Secara klasikal, Pelatihan dalam manajemen proyek, kepemimpinan tim, dan kolaborasi. Secara Non Klasikal, analisa dan pembelajaran dari pengalaman nyata dalam mengelola proyek perubahan	<p>a. Kemampuan Manajemen Proyek: Anggota tim akan memperlihatkan peningkatan dalam mengelola dan menyelaraskan proyek, dengan memastikan bahwa tujuan dan tenggat waktu tercapai.</p> <p>b. Keterampilan Kepemimpinan: Para pemimpin dalam tim akan menunjukkan kemampuan yang lebih kuat dalam menginspirasi dan memotivasi anggota tim, serta mengambil keputusan yang tepat dan tepat waktu.</p> <p>c. Kolaborasi Tim: Tim akan lebih efektif dalam bekerja bersama, dengan anggota yang mampu bekerja lintas fungsi dan mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama.</p> <p>d. Pemahaman tentang Proyek Perubahan: Semua anggota tim akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dinamika perubahan dan bagaimana mengelola adaptasi dalam organisasi atau sistem keamanan.</p>

Optimalisasi pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terutama di dalam Tim Efektif Proyek Perubahan adalah langkah strategis dalam menjamin keberlanjutan proyek penempatan personel pengamanan berbasis digital dalam rangka harkamtibmas di kota Palembang. Anggota tim ini tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana, tetapi juga menjadi nadi vital yang menggerakkan seluruh elemen proyek mulai dari perencanaan hingga implementasi. Oleh karena itu, meningkatkan kompetensi mereka dalam berbagai aspek seperti pelatihan komputer, public speaking, serta pengetahuan medis dalam penanggulangan pertama terhadap korban


penyalahgunaan narkoba adalah investasi langsung terhadap kualitas dan efektivitas proyek ini.



Dalam konteks ini, pelatihan komputer sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh tim memahami dan dapat memanfaatkan perangkat digital dan perangkat lunak yang digunakan dalam proyek, seperti sistem informasi kegiatan atau tingkat kerawanan. Keterampilan public speaking juga menjadi penting, terutama dalam melakukan advokasi atau mempresentasikan proyek kepada stakeholder atau komunitas. Sementara itu, pengetahuan pengamanan akan membekali tim dengan pemahaman dasar mengenai penanganan awal pengamanan, yang bisa menjadi faktor krusial dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.

I. Hasil Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri (Kompetensi Team Leader)

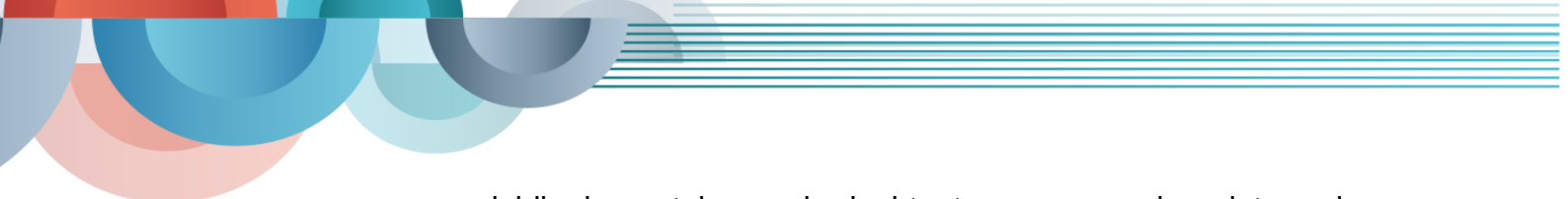
Setelah menyelesaikan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2023, saya telah mengalami transformasi signifikan dalam kompetensi sebagai Team Leader. Pelatihan ini tidak hanya memperluas wawasan saya tentang strategi organisasi yang efektif, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana memotivasi dan menginspirasi tim. Salah satu pencapaian utama adalah pengembangan keterampilan komunikasi dan manajemen konflik. Melalui berbagai sesi interaktif dan studi kasus, saya belajar cara efektif untuk menyelesaikan perselisihan dan meningkatkan kerjasama tim, yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Penerapan teori motivasi *Maslow* dalam praktik



kepemimpinan telah membawa perubahan dramatis. Dengan memahami kebutuhan beragam anggota tim, saya berhasil menerapkan pendekatan yang lebih personal dan empatik, yang secara signifikan meningkatkan moral dan kinerja tim.

Integrasi Teori X dan Y *McGregor* juga telah membawa perubahan dalam gaya kepemimpinan saya. Dengan menyesuaikan pendekatan kepemimpinan berdasarkan dinamika tim, saya menemukan keseimbangan antara pemberian arahan dan pemberdayaan, memungkinkan anggota tim untuk mengambil inisiatif dan tanggung jawab lebih besar dalam tugas mereka. Penerapan Teori Kepemimpinan Situasional *Hersey-Blanchard* telah membantu saya dalam mengidentifikasi tingkat kematangan dan kesiapan anggota tim. Hal ini memungkinkan saya untuk memberikan dukungan dan bimbingan yang sesuai, memastikan bahwa setiap anggota tim mendapatkan kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal.


Fokus pada pengembangan diri berkelanjutan juga telah menjadi aspek penting dalam perjalanan kepemimpinan saya. Saya telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keterampilan analitis dan pengambilan keputusan, yang sangat membantu dalam strategi pengelolaan proyek dan pencapaian target. Pemberdayaan dan delegasi telah menjadi pilar utama dalam gaya kepemimpinan saya. Melalui pemberian tanggung jawab yang lebih besar kepada anggota tim, saya telah menyaksikan peningkatan inovasi dan kreativitas, serta kepemilikan yang lebih kuat atas hasil kerja. Pengelolaan stres dan resiliensi menjadi fokus utama. Melalui teknik yang dipelajari, baik saya maupun tim saya telah menjadi lebih tangguh dalam menghadapi tantangan dan tekanan, memungkinkan kami untuk tetap fokus dan efektif dalam mencapai tujuan kami. Secara keseluruhan, pelatihan ini telah memberikan saya alat dan wawasan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang lebih efektif, membantu saya membimbing tim saya menuju keberhasilan yang lebih besar, khususnya dalam meningkatkan sistem penempatan personel pengamanan berbasis digital di Kota Palembang. Kini,



saya merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang dan memimpin tim saya menuju pencapaian lebih tinggi.

Langkah-langkah yang telah disebutkan untuk meningkatkan sistem Penempatan personel pengamanan berbasis digital dalam rangka Harkamtibmas di Kota Palembang sangatlah komprehensif. Berikut adalah beberapa peningkatan dan penambahan yang bisa dilakukan untuk menyempurnakannya:

1. **Analisis SWOT dan Pemetaan Risiko:** Selain identifikasi kebutuhan dan tujuan, lakukan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) untuk memahami secara mendalam kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam proyek ini. Pemetaan risiko yang terperinci juga penting untuk mengidentifikasi dan mitigasi potensi hambatan.
2. **Integrasi Sistem Informasi Geografis (GIS):** Tim ahli dapat mengintegrasikan teknologi GIS untuk memetakan dan menganalisis data terkait penempatan personel pengamanan. Ini akan membantu dalam membuat keputusan yang lebih tepat mengenai penyebaran sumber daya dan respons terhadap insiden.
3. **Pelatihan dalam Analisis Data dan Keamanan Siber:** Meluaskan cakupan pelatihan untuk mencakup analisis data dan keamanan siber. Ini akan sangat berguna dalam menghadapi tantangan di era digital, khususnya dalam mengelola dan melindungi data terkait keamanan.
4. **Mekanisme Feedback dan Evaluasi Berkelanjutan:** Menerapkan sistem feedback dan evaluasi berkelanjutan bagi peserta. Ini tidak hanya untuk memonitor kemajuan mereka, tetapi juga untuk terus meningkatkan program pelatihan dan pendampingan.
5. **Pengembangan Keterampilan Kepemimpinan dan Manajemen Tim:** Fokus pada pengembangan keterampilan kepemimpinan dan manajemen tim sebagai bagian dari program pelatihan. Keterampilan ini krusial untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas tim dalam situasi darurat.
6. **Penggunaan Teknologi Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR):** Mengintegrasikan AR dan VR dalam pelatihan untuk simulasi skenario keamanan yang realistis. Ini akan membantu peserta dalam



memahami dan menyiapkan diri untuk berbagai situasi keamanan yang mungkin terjadi.

7. **Kolaborasi dengan Stakeholder Eksternal:** Membangun kemitraan dengan lembaga pendidikan, organisasi keamanan, dan lembaga pemerintah untuk mendapatkan akses ke sumber daya, wawasan industri, dan dukungan tambahan.
8. **Pengembangan Program Kesehatan Mental dan Kesejahteraan:** Memperkenalkan program kesehatan mental dan kesejahteraan untuk mendukung kebutuhan emosional dan psikologis personel. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa mereka tetap sehat dan produktif dalam jangka panjang.


Dengan memperkaya program pengembangan potensi diri ini dengan elemen-elemen tambahan tersebut, diharapkan akan terjadi peningkatan yang signifikan dalam kinerja dan efektivitas sistem penempatan personel pengamanan berbasis digital di Kota Palembang.

BAB V

PENUTUP

Tren kegiatan masyarakat dan aksi unjuk rasa di Kota Palembang dari tahun 2020 hingga 2023. Dalam periode tersebut, fluktuasi data mencerminkan pola aktivitas masyarakat yang berubah-ubah peningkatan kebijakan keamanan atau mungkin dampak dari pandemi yang membatasi pertemuan publik. Aksi unjuk rasa juga menunjukkan pola serupa, dengan puncak aktivitas pada momen tertentu, kemungkinan dipicu oleh isu-isu sosial yang mendapat perhatian masyarakat. menyoroti posisi Palembang sebagai salah satu kota dengan tingkat kriminalitas yang relatif tinggi di Indonesia, mengindikasikan bahwa ada ruang signifikan untuk peningkatan dalam tata kelola keamanan kota. Data ini menyerukan peningkatan strategi keamanan dan penempatan sumber daya pengamanan yang lebih strategis. Grafik keempat, yang menunjukkan jumlah tindak pidana dari tahun 2021 hingga 2023, menggambarkan naik turunnya angka kejahatan, menuntut pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan situasi di lapangan.

Untuk penanggulangan hal tersebut di butuhkan pendekatan yang dinamis dan adaptif terhadap keamanan di Kota Palembang adalah penting. Melalui integrasi teknologi digital dalam sistem pengamanan, potensi untuk memperbaiki penempatan personel pengamanan dan respons terhadap insiden keamanan menjadi lebih besar. Namun, penggunaan teknologi harus dikombinasikan dengan pemahaman mendalam tentang kondisi sosial untuk mengatasi kegiatan masyarakat dan aksi unjuk rasa yang bersifat reaktif terhadap isu tertentu. Selain itu, data menunjukkan pentingnya evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan dari strategi pengamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan menanggapi secara proaktif terhadap unjuk rasa dan kegiatan masyarakat lainnya. Dengan demikian, kolaborasi antara pihak berwenang, komunitas, dan teknologi adalah kunci untuk memastikan bahwa keamanan dan ketertiban di Kota Palembang dapat dikelola dengan lebih efektif dan inklusif. Penempatan personel pengamanan berbasis digital dalam rangka Harkamtibmas di Kota Palembang sebuah terobosan yang mengintegrasikan teknologi ke dalam paradigma memberikan rasa aman kepada masyarakat. Pendekatan ini memanfaatkan perangkat lunak canggih, platform online, dan bisa diakses melalui seluler untuk



menyediakan serangkaian layanan. Kelebihan dari model ini termasuk aksesibilitas yang lebih luas, fleksibilitas dalam penjadwalan sesi, dan potensi untuk menjangkau individu yang berada di lokasi terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas.

Namun, penting untuk memahami bahwa Penempatan personel pengamanan berbasis digital dalam rangka Harkamtibmas di Kota Palembang bukanlah satu-satunya atau solusi universal untuk mengamankan kota Palembang. Oleh karena itu, pendekatan yang menggabungkan elemen penempatan personel pengamanan berbasis digital dan intervensi konvensional dapat menawarkan strategi yang lebih holistik dan inklusif. Mengkombinasikan kekuatan dari kedua metode ini akan menciptakan sebuah model pengamanan yang lebih komprehensif, efektif dan berkelanjutan.

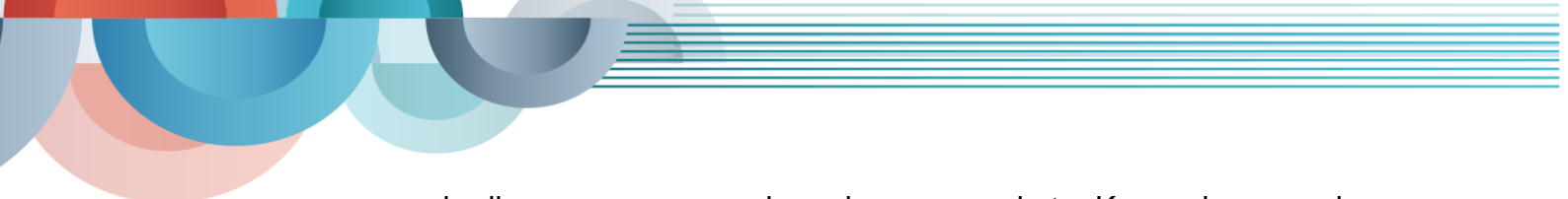
A. Lesson learned

Pelajaran yang bisa dipetik tentang kepemimpinan dalam proyek perubahan Penempatan personel pengamanan berbasis digital dalam rangka Harkamtibmas di Kota Palembang merupakan strategi Kepemimpinan Berbasis Visioner ada suatu modal untuk seorang pemimpin yang memiliki visi kuat tentang tujuan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berbasis digital. Visi ini harus jelas dan menginspirasi anggota tim serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dan mendukung proyek, tentunya di dukung oleh Inklusi dan Kolaborasi yang efektif dalam proyek perubahan ini melibatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Pemimpin harus bersikap terbuka terhadap pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan, harus siap untuk merespons masukan dan umpan balik dari tim dan pemangku kepentingan.

Pengalaman kepemimpinan dalam proyek ini dapat memberikan pelajaran berharga tentang mengelola perubahan kompleks dalam lingkungan yang sensitif. Kemampuan untuk menghadapi tantangan, berkomunikasi efektif, dan tetap berfokus pada hasil positif adalah inti dari kepemimpinan yang berhasil dalam proyek perubahan Penempatan personel pengamanan berbasis digital dalam rangka Harkamtibmas di Kota Palembang.

Selama proses proyek ini, beberapa pelajaran penting dapat diambil:

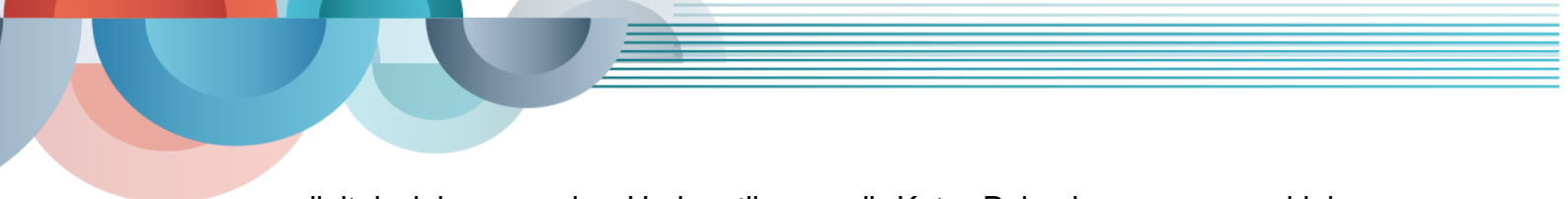
1. **Kolaborasi yang Kuat:** Kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pihak berwenang, stakeholders, dan komunitas, sangat penting dalam

- 
- memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kesepahaman dan kerjasama yang kuat dapat meningkatkan efektivitas upaya pencegahan.
2. **Pendekatan Berbasis Data:** Pengumpulan dan analisis data permasalahan di Kota Palembang sangat penting untuk merancang solusi yang efektif. Data dapat menjadi dasar bagi kebijakan dan program pencegahan yang lebih baik.
 3. **Pemberdayaan Masyarakat:** Mengikutsertakan masyarakat dalam upaya pemeliharaan situasi kamtibmas adalah langkah yang positif. Masyarakat dapat berperan aktif dalam mendeteksi dan melaporkan setiap kejadian.
 4. **Sosialisasi dan Pelatihan:** Sosialisasi dan pelatihan kepada personel terkait sangat penting untuk memastikan pemahaman yang baik tentang program Penempatan personel pengamanan berbasis digital dalam rangka Harkamtibmas di Kota Palembang. Hal ini juga membantu dalam mengimplementasikan program dengan baik.
 5. **Evaluasi Terus Menerus:** Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan adalah kunci keberhasilan dalam memelihara situasi kamtibmas yang kondusif di kota Palembang. Dengan mengukur dan mengevaluasi program secara teratur, perbaikan dapat dilakukan sesuai kebutuhan.

B. Kesimpulan

Berdasarkan data yang disajikan, jelas bahwa Penempatan personel pengamanan berbasis digital dalam rangka Harkamtibmas di Kota Palembang menawarkan sebuah revolusi dalam cara kita memberikan rasa aman kepada masyarakat. Program ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengamanan tetapi juga membuka peluang untuk stabilitas kamtibmas berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, kelebihan utama dari pendekatan digital termasuk aksesibilitas yang lebih besar, fleksibilitas dalam layanan, serta dukungan sosial dan emosional yang lebih efisien.

Teknologi digital memberikan kesempatan untuk edukasi, konseling, dan pemantauan yang lebih mudah diakses, sambil mempertahankan tingkat privasi yang tinggi. Selain itu, Penempatan personel pengamanan berbasis



digital dalam rangka Harkamtibmas di Kota Palembang memungkinkan adanya kolaborasi lintas sektor yang lebih efektif, memfasilitasi keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam strategi pencegahan dan pemulihan. Dalam era digital saat ini, rehabilitasi berbasis digital bukan sekedar alat tambahan, melainkan menjadi instrumen penting yang memiliki potensi untuk mengubah paradigma dalam memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Oleh karena itu, penempatan personel pengamanan berbasis digital dalam rangka Harkamtibmas di Kota Palembang harus dianggap sebagai komponen integral dalam strategi nasional dan lokal untuk pencegahan dan penanganan masalah gangguan kamtibmas dikota Palembang.

C. Rekomendasi

Keberlanjutan penempatan personel pengamanan berbasis digital dalam rangka Harkamtibmas di Kota Palembang sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat maupun pelaku usaha sehingga perlu direkomendasikan. Mengingat tingginya roda perekonomian di Kota Palembang, kami merekomendasikan sebagai berikut:

1. Kepada Kapolda Sumatera Selatan:
 - a. Penerapan Penempatan personel pengamanan berbasis digital dalam rangka Harkamtibmas di Kota Palembang: Agar dapat mengadopsi dan menstandarisasi penggunaan platform penempatan personel berbasis digital di seluruh Polres yang berada di bawah Polda Sumatera Selatan.
 - b. Peraturan Pendukung: Menerbitkan atau merevisi Peraturan Kapolda Sumatera Selatan untuk memasukkan kebijakan Penempatan personel pengamanan berbasis digital dalam rangka Harkamtibmas di Kota Palembang sebagai salah satu opsi resmi dalam kecepatan memberikan pengamanan pada kegiatan masyarakat.
 - c. Koordinasi Multi-Agensi: Mengkoordinasikan dengan instansi terkait seperti Kelembagaan, instansi dan Kementerian untuk memastikan efikasi dan efisiensi program.

2. Kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di Sumatera Selatan:

a. **Dukungan Infrastruktur dan Teknologi:**

- 1) Mengalokasikan anggaran untuk pengembangan infrastruktur digital yang mendukung implementasi sistem penempatan personel keamanan berbasis digital.
- 2) Memastikan ketersediaan dan keandalan jaringan komunikasi serta teknologi informasi di semua wilayah untuk memfasilitasi penyebaran dan pengoperasian sistem ini secara efektif.

b. **Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:**

- 1) Menyediakan pelatihan khusus bagi tenaga keamanan dan personel terkait lainnya dalam mengoperasikan dan memanfaatkan sistem digital.
- 2) Menyelenggarakan program pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat serta pelaku usaha dalam bidang keamanan digital.

c. **Kerjasama dengan Polda dan Instansi Terkait:**

- 1) Menjalin kerjasama yang erat dengan Kapolda Sumatera Selatan dalam mengimplementasikan dan mengkoordinasikan strategi keamanan berbasis digital.
- 2) Bekerja sama dengan lembaga pendidikan, industri teknologi, dan instansi pemerintah lainnya untuk mendukung pengembangan dan penerapan teknologi keamanan.

d. **Pengembangan Fasilitas Rehabilitasi dan Dukungan Sosial:**

- 1) Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan atau peningkatan fasilitas rehabilitasi yang mendukung kebutuhan korban tindak kejahatan dan penyalahgunaan narkoba.
- 2) Menyediakan program dukungan sosial dan psikologis yang terintegrasi dengan fasilitas rehabilitasi.

e. **Pengawasan dan Evaluasi:**

- 1) Melakukan pengawasan rutin dan evaluasi berkala terhadap implementasi dan efektivitas program keamanan digital.
- 2) Mengadakan kajian dampak untuk mengukur efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kejahatan.

f. **Peningkatan Keterlibatan Masyarakat:**

- 1) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program keamanan, baik dalam pemberian masukan, pengawasan, maupun sebagai bagian dari inisiatif keamanan komunitas.
- 2) Mengadakan program edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya keamanan digital dan peran masyarakat dalam mendukung kebijakan ini.

Dengan rekomendasi ini, diharapkan akan ada langkah konkret yang dapat diambil oleh berbagai pihak terkait untuk memaksimalkan keberlanjutan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Sumatera Selatan

Melalui proyek perubahan “Sistem Penempatan Personil Pengamanan Berbasis Digital di Polrestabes Palembang” diharapkan memberi dampak positif terhadap kinerja Polrestabes Palembang dalam rangka meningkatkan pelayanan pengamanan di kota Palembang. Melalui Analisa kebijakan, terselenggarakannya Kegiatan FGD, Sistem Penempatan Personel Berbasis Digital, tersusunnya Standar Operasional Prosedur tentang Sistem integrasi informasi database berbasis Digital, tersusunnya buku Manual panduan Sistem Penempatan Personel Berbasis Digital, pelatihan peningkatan kemampuan SDM, terlaksananya sosialisasi & implementasi aplikasi sistem informasi secara Digital ke stakeholder, terlaksananya PKS dengan Stakeholder di wilayah kota Palembang ,terlaksananya Tactical Floor Game dalam rangka kegiatan sistim pengamanan kota. Dengan terintegrasinya informasi berbasis Digital dapat minimalisir kegiatan masyarakat yang tidak diamankan sehingga tercapai harkamtibmas yang kondusif di kota Palembang.

LAMPIRAN

1. Sprin Tim Efektif :
https://drive.google.com/file/d/1zR4TBP5Elabsvf_ZUGFOSSOzT4ruyeXQ/view?usp=drive_link
2. Surat Edaran Kapolrestabes Palembang Nomor 2 Tahun 2023
https://drive.google.com/file/d/16NTYK4r62L6scdV02AIUuzR3vCKy53zd/view?usp=drive_link
3. Buku Panduan Antasena
https://drive.google.com/file/d/1secU2wCfJHBFpNR8GJAdk08S5adNJI0u/view?usp=drive_link
4. Perjanjian Kerja Sama antara Polrestabes Palembang dengan Pemerintah Kota Palembang
https://drive.google.com/file/d/1CFOjh0OuYci-bXAreflej7BTR6U_KZ35/view?usp=drive_link
5. Perkapolrestabes Palembang
https://drive.google.com/file/d/10hFkxMc1FoR3X_5Z7yEgh033axbVTuV/view?usp=drive_link
6. SOP
https://drive.google.com/file/d/15-uABrJ4446mONv1IY0jTuJw3eb91Cyk/view?usp=drive_link
7. Sprin Operator Antasena
https://drive.google.com/file/d/1wFDAPweT3LAdcpRwUSWAUsf7bFLqCk0N/view?usp=drive_link
8. Laporan Hasil TFG
https://drive.google.com/file/d/1qZBjTIPSI4hF7ZG9bFskKiFiiGql6fXR/view?usp=drive_link
9. Laporan Sispam Kota
https://drive.google.com/file/d/1nbSHkwP01ykAlzc08f8vXR4wCnGVc5Si/view?usp=drive_link
10. Dukungan Dandim 0418
https://drive.google.com/file/d/1SskQUpBSrKBMJm8BRTn5wSn1PAESEq0/view?usp=drive_link
11. Dukungan Pj. Walikota Palembang
https://drive.google.com/file/d/18XfGaUUGoixSj29Sxu0JU_xz-prMKGmO/view?usp=drive_link
12. Dukungan Ketua DPRD Kota Palembang
https://drive.google.com/file/d/1Tp_Ka-Fjv2lvcTifSID7rD7IWlqeME7O/view?usp=drive_link
13. Dukungan Ketua NCW
https://drive.google.com/file/d/1U3mzpD7TswElizj9rrQi2gnPAbVResdV/view?usp=drive_link

14. Sosialisasi Media Online

- a. Tiktok
<https://vt.tiktok.com/ZSN91taga/>
- b. Snack Vidio
<https://sck.io/p/AIOrndqB>
- c. Berita Online
<https://marbun.my.id/berita-strategi-penempatan-personel-berbasis-digital-polrestabes-palembang.html>
- d. Academi.edu
[https://www.academia.edu/109957218/IMPLEMENTASI_PROYEK_PERUBAHAN_STRATEGI_PENEMPATAN_PERSONIL_PENGAMANAN_BERBASIS_DIGITAL_DALAM_RANGKA_HARKAMTIBMAS_DI_KOTA_PALEMBANG OI
eh](https://www.academia.edu/109957218/IMPLEMENTASI_PROYEK_PERUBAHAN_STRATEGI_PENEMPATAN_PERSONIL_PENGAMANAN_BERBASIS_DIGITAL_DALAM_RANGKA_HARKAMTIBMAS_DI_KOTA_PALEMBANG_Oleh)
- e. Youtube
<https://www.youtube.com/watch?v=SxblwkjQsj4>